

Kata Pengantar

Penyusunan laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri merupakan pelaksanaan dari ketentuan dari Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri edisi Triwulan I Tahun 2014 disusun berdasarkan i) hasil rapat pemantauan Triwulan I Tahun 2014 yang dilaksanakan di Bappenas pada bulan April 2014, ii) hasil laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Bappenas dari Kementerian/Lembaga selaku instansi pelaksana sampai dengan tanggal 31 Maret 2014, dan iii) hasil kunjungan lapangan.

Laporan edisi Triwulan I Tahun 2014 terdiri dari 2 Buku yaitu buku pertama merupakan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang berisikan gambaran umum pelaksanaan pinjaman luar negeri, kinerja pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri serta laporan dari proyek-proyek yang telah selesai pelaksanaannya yang informasinya diperoleh dari laporan akhir proyek (*Project Completion Report*) dan buku kedua merupakan Lampiran Laporan yang berisi data, status penyerapan dan pelaksanaan serta permasalahan dan rencana tindak lanjut seluruh proyek yang sedang berjalan (*on-going*).

Laporan edisi Triwulan I Tahun 2014 memberikan informasi perkembangan kinerja pelaksanaan pinjaman luar negeri dari setiap pemberi dana pinjaman serta dari Kementerian/Lembaga selaku instansi pelaksana yang dilihat dari sisi penyerapan dana dan pencapaian indikator *output* atau kemajuan pelaksanaan fisik. Pencapaian indikator *output* dilakukan berdasarkan rencana pencapaian indikator *output* yang telah dirumuskan. Selain itu, laporan ini menyampaikan pemantauan hibah luar negeri yang pembiayaan hibahnya bersumber dari Hibah Lembaga PBB (*United Nations Development Programme/UNDP*) dan Pemerintah Amerika Serikat (*Millennium Challenge Corporation/MCC*) dengan metode deskriptif.

Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pelaksanaan proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri termasuk permasalahan yang dihadapi oleh setiap proyek pada Triwulan I Tahun 2014 dan kami harapkan jika diperlukan dapat dilakukan tindak lanjut oleh pihak-pihak terkait. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Armida S. Alisjahbana

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I GAMBARAN UMUM	1
Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman.....	2
Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	4
Permasalahan Dalam Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri.....	6
Pinjaman Proyek yang Berakhir Masa Berlakunya dan yang Baru Efektif Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2014.....	7
Pelaksanaan Hibah Luar Negeri.....	7
BAB II KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI	9
Kreditor Multilateral	9
Bank Dunia	10
ADB	23
IDB.....	29
Multilateral Lain	35
Kreditor Bilateral	38
JICA	39
Australia.....	47
Jerman	48
Korea	50
Perancis dan AFD.....	53
RR Tiongkok.....	56
Spanyol.....	58
Proyek Fasilitas Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing (LPKE/KSA)	60
BAB III KINERJA PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI	65
Hibah Lembaga PBB.....	66
<i>United Nations Development Programme (UNDP)</i>	66
Hibah Pemerintah Amerika Serikat	76
<i>Program Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact</i>	76
BAB IV LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI	81
<i>Domestic Gas Market Development Project (4810-IND)</i>	81
<i>Rural Infrastructure Support to PNPM-II/RIS-PNPM II (2575-INO)</i>	84
<i>Vocational Education Strengthening Project/INVEST (2416-INO)</i>	86
BAB V PENUTUP	91
Kesimpulan.....	91
Tindak Lanjut	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Triwulan I Tahun 2013 & 2014.....	1
Tabel 1.2	Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman	2
Tabel 1.3	Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab.....	4
Tabel 1.4	Proyek yang Berakhir Masa Berlakunya di Triwulan I Tahun 2014.....	7
Tabel 1.5	Proyek yang Baru Efektif di Triwulan I Tahun 2014.....	7
Tabel 1.6	Pelaksanaan Hibah Luar Negeri Triwulan I Tahun 2014	8
Tabel 2.1	Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral.....	9
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	9
Tabel 2.3	Penyerapan Pinjaman Bank Dunia Menurut Instansi Penanggung Jawab Pada Triwulan I TA 2014.....	11
Tabel 2.4	Realisasi Penyerapan Pinjaman ADB Menurut Instansi Penanggung Jawab, Triwulan I TA 2014	24
Tabel 2.5	Pinjaman ADB dengan $PV \leq -30$ (Triwulan IV 2013 dan Triwulan I 2014).....	26
Tabel 2.6	Penyerapan Pinjaman IDB Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab pada Triwulan I TA 2014	29
Tabel 2.7	Perbandingan Nilai PV Proyek pinjaman IDB dengan Kinerja Penyerapan Rendah($PV \leq -30$) pada Triwulan I 2014 dan Triwulan IV TA 2013	30
Tabel 2.8	Penyerapan Pinjaman dari Lembaga Multilateral Lain Menurut Instansi Penanggung Jawab	35
Tabel 2.9	Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral.....	38
Tabel 2.10	Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	39
Tabel 2.11	Pinjaman Proyek yang Dibiayai JICA sampai dengan Triwulan I TA 2014	40
Tabel 2.12	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014.....	40
Tabel 2.13	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014.....	41
Tabel 2.14	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014.....	42
Tabel 2.15	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014.....	43
Tabel 2.16	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014.....	43
Tabel 2.17	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014.....	44
Tabel 2.18	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014.....	44
Tabel 2.19	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014.....	44
Tabel 2.20	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014.....	45
Tabel 2.21	Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014.....	45
Tabel 2.22	<i>Progress Variant</i> Proyek Pinjaman JICA	46
Tabel 2.23	Daftar Pinjaman Proyek JICA yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014 dan Status Dana Pinjaman yang Belum Ditarik.....	46
Tabel 2.24	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Jerman Triwulan I TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab	48
Tabel 2.25	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Korea menurut Instansi Penanggung Jawab	51
Tabel 2.26	<i>Progress Variant</i> Proyek Pinjaman Korea.....	52
Tabel 2.27	Daftar Pinjaman Proyek Korea yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014.....	53
Tabel 2.28	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Perancis Triwulan I TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab	53
Tabel 2.29	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman AFD Triwulan I TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab	53

Tabel 2.30	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman RR Tiongkok menurut Instansi Penanggung jawab..	57
Tabel 2.31	<i>Progress Variant</i> Proyek Pinjaman JICA	58
Tabel 2.32	Daftar Pinjaman Proyek RR Tiongkok yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014.....	58
Tabel 2.33	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Spanyol Pada Triwulan I TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab	58
Tabel 2.34	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman LPKE/KSA Pada Triwulan I TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab	60
Tabel 2.35	Total Alokasi, Komitmen Pinjaman dan Penyerapan Kumulatif Pinjaman Proyek LPKE/KSA.....	61
Tabel 2.36	Target dan Realisasi Penyerapan TA 2014	61
Tabel 2.37	Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE Kepolisian Republik Indonesia	62
Tabel 2.38	Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE PT PLN	62
Tabel 3.1	Hibah Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab.....	65
Tabel 3.2	<i>Outcome</i> Komponen Program 1.....	66
Tabel 3.3	<i>Outcome</i> 1 Komponen Program 2.....	68
Tabel 3.4	<i>Outcome</i> 2 Komponen Program 2.....	68
Tabel 3.5	<i>Outcome</i> 3 Komponen Program 2.....	69
Tabel 3.6	<i>Outcome</i> 1 Komponen Program 3.....	70
Tabel 3.7	<i>Outcome</i> 2 Komponen Program 3.....	71
Tabel 3.8	<i>Outcome</i> 3 Komponen Program 3.....	71
Tabel 3.9	<i>Outcome</i> 1 Komponen Program 4.....	73
Tabel 3.10	<i>Outcome</i> 2 Komponen Program 4.....	74
Tabel 3.11	<i>Outcome</i> 3 Komponen Program 4.....	74
Tabel 3.12	Gambaran umum Hibah Program <i>MCC Compact</i>	76
Tabel 3.13	Komponen Pembiayaan Program <i>MCC Compact</i>	76
Tabel 3.14	Penyerapan Program <i>MCC Compact</i>	77
Tabel 3.15	Pengesahan Hibah Langsung <i>Program Implementation Agreement-Grant Agreement</i> MCC TW I Tahun 2014.....	78
Tabel 3.16	Penyerapan Anggaran Satker Pengelola Hibah MCC TW I Tahun 2014	79
Tabel 3.17	Rencana Penyerapan Anggaran Hibah Satker Pengelola Hibah MCC TW I Tahun 2014 ...	79
Tabel 3.18	<i>Outcome Vocational Education Strengthening Project</i>	87
Tabel 4.1	Profil <i>Domestic Gas Development Project</i>	81
Tabel 4.2	Manfaat dari Proyek <i>Domestic Gas Market Development Project</i>	83
Tabel 4.3	Profil Proyek <i>Rural Infrastructure Support to PNPM-II</i>	84
Tabel 4.4	<i>Workshop dan Training</i> Proyek <i>Rural Infrastructure Support to PNPM-II</i>	84
Tabel 4.5	Jenis Infrastruktur Terbangun Tahun 2010 dan Tahun 2011	85
Tabel 4.6	Profil <i>Vocational Education Strengthening Project</i>	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penyerapan pada Triwulan I Tahun 2014 Berdasarkan Sumber Pinjaman.....	3
Gambar 1.2 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman	4
Gambar 1.3 Komposisi dan Besaran Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab 6	
Gambar 2.1 Pinjaman Proyek Bank Dunia Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	10
Gambar 2.2 Proporsi Jumlah Pinjaman Bank Dunia Menurut Sektor Triwulan I Tahun 2014.....	12
Gambar 2.3 Realisasi penyerapan Dana Pinjaman Bank Dunia Menurut Sektor, Triwulan I Tahun 2014.....	13
Gambar 2.4 Jumlah Pinjaman Proyek ADB Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	23
Gambar 2.5 Jumlah Pinjaman Proyek IDB Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	29
Gambar 3.1 Rumah Sakit Mengadopsi <i>Public Complaint Mechanism</i> (PCM)	73
Gambar 3.2 Perdamaian dan Manajemen Konflik.....	75
Gambar 3.3 Desa Tangguh Bencana	75
Gambar 4.1 Lokasi <i>Domestic Gas Market Development Project</i>	82
Gambar 4.2 Infrastruktur Terbangun Tahun 2010 dan Tahun 2011	85
Gambar 4.3 Pelaksanaan Proyek <i>Rural Infrastructure Support to PNPM-II</i>	86
Gambar 4.4 Siswi SMK Melakukan Perakitan <i>Notebook</i> Dan Pelatihan Nautika Kapal Penangkapan Ikan di SMKN 1 Mundu Cirebon.....	87
Gambar 4.5 Fasilitas Pendukung Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan di SMKN 27 Jakarta dan Siswi SMK Mengikuti Kompetisi Perhotelan Tingkat Dunia.	89

BAB I GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Triwulan I Tahun Anggaran 2014 berisikan pemantauan kinerja pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri. Pemantauan dilakukan terhadap proyek-proyek yang sudah efektif masa berlakunya dan belum melewati tanggal berakhirnya pinjaman (*closing date*). Kinerja pelaksanaan pinjaman luar negeri dalam laporan ini selain dilihat dari tingkat penyerapan dana, juga difokuskan pada realisasi pencapaian *output*/fisik. Dalam laporan disampaikan pula pelaksanaan hibah luar negeri walaupun belum menggambarkan kinerja hibah secara menyeluruh.

Penyusunan laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri bertujuan untuk menyampaikan perkembangan kinerja pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri, identifikasi permasalahan dan tindak lanjut, serta evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang telah selesai yang diperoleh dari laporan akhir proyek atau *Project Completion Report* (PCR). Dari kegiatan pemantauan diharapkan mendapatkan pelajaran dan pengalaman (*lesson learned*) yang berguna untuk meningkatkan kinerja kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri baik dalam pelaksanaan maupun perencanaan.

Pada Triwulan I TA 2014 terdapat 143 proyek (152 *Loan Agreement*) yang dipantau dengan nilai total pinjaman sebesar ekuivalen USD 19.317,86 juta. Total penyerapan kumulatif sampai dengan Triwulan I TA 2014 (posisi 31 Maret 2014) adalah sebesar ekuivalen USD 7.305,95 juta atau 37,82% dari total nilai pinjaman. Realisasi penyerapan pada TA 2014 periode Januari – Maret 2014 sebesar ekuivalen USD 826,65 juta atau 27,49% dari target penyerapan TA 2014 sebesar ekuivalen USD 3.007,1 juta.

Tabel 1.1 Perbandingan Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Triwulan I Tahun 2013 & 2014

(Ekuivalen Juta USD)

Triwulan I Tahun	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	TA		
			Jumlah	%		Target	Realisasi	%
2013	159	17.568,52	6.814,22	38,79	10.754,30	4.114,57	181,31	4,41
2014	143*)	19.317,86	7.305,95	37,82	12.011,94	3.007,10	826,65	27,49

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Catatan: *) Terdiri dari 143 proyek dengan 152 *Loan Agreement*

Jika dilihat dari Tabel 1.1, jumlah proyek yang dipantau pada tahun 2013 berjumlah 159 proyek dan tahun 2014 berjumlah 143 (152 *Loan Agreement*). Berkurangnya jumlah proyek di tahun 2014 antara lain disebabkan proyek-proyek pada tahun 2014 yang memiliki *Loan Agreement* lebih dari satu dan sumber pinjamannya sama akan dihitung sebagai satu proyek. Pada Triwulan I TA terdapat 4 proyek yang baru efektif yaitu dari Bank Dunia 1 proyek dengan nilai pinjaman sebesar USD 325 juta, ADB 1 proyek dengan nilai pinjaman sebesar USD 45,52 juta, dan pemerintah Korea 2 proyek dengan nilai pinjaman sebesar USD 85,04 juta. Persentase realisasi penyerapan terhadap target pada Triwulan I, Tahun Anggaran 2014 mencapai 27,49%, lebih tinggi dari persentase realisasi penyerapan pada Triwulan I, Tahun Anggaran 2013 yang hanya mencapai 4,41%.

PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN SUMBER PINJAMAN

Sumber pinjaman luar negeri terdiri dari Kreditor Multilateral, Kreditor Bilateral, dan Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). Sumber pinjaman Kreditor Multilateral merupakan lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa Negara, seperti Bank Dunia, *Asian Development Bank (ADB)*, *Islamic Development Bank (IDB)*, *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, dan *Saudi Fund*. Sumber pinjaman Kreditor Bilateral merupakan pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing, seperti *Japan Bank for International Cooperation (JICA)*, Australia, RR Tiongkok, Jerman, Korea, Spanyol, Perancis, dan AFD. Kreditor Swasta Asing (KSA) diwakili oleh lembaga keuangan nasional dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti PT. BNI cabang Singapura, Tokyo, dan Hongkong. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) merupakan lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan serta melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti *BNP Paribas*, *Exim Bank of Korea*, *Export-Import Bank of China*, dan *Fortis Bank Belanda*. Rekapitulasi pinjaman luar negeri berdasarkan sumber pinjaman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

(Ekuivalen Juta USD)

No	Sumber Pinjaman	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	% Terhadap Total Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2014		
							Target	Realisasi	%
I	Kreditor Multilateral	54	6.513,88	33,72	1.780,81	4.733,07	867,43	30,57	3,52
	Bank Dunia	25	4.833,12	25,02	1.408,38	3.424,74	490,96	21,58	4,40
	ADB	10 ¹⁾	721,77	3,74	243,14	478,63	139,98	6,45	4,61
	IDB	14 ¹⁾	760,78	3,94	49,49	711,29	218,51	1,05	0,48
	IFAD	4	162,21	0,84	79,80	82,41	17,98	1,49	8,33
	<i>Saudi Fund</i>	1	36,00	0,19	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
II	Kreditor Bilateral	62	7.424,45	38,43	3.129,71	4.294,76	965,98	89,17	9,23
	JICA	38	5.857,13	30,32	2.563,37	3.293,76	703,15	43,07	6,12
	Australia	1	278,69	1,44	225,94	52,75	13,78	1,02	7,42
	Jerman	3	86,29	0,45	32,89	53,40	29,06	0,44	1,52
	Korea	7	353,36	1,83	53,44	299,93	37,16	0,00	0,00
	Perancis	4	265,41	1,37	66,73	198,69	20,27	0,00	0,00
	AFD	3	129,50	0,67	39,00	90,50	34,50	0,00	0,00
	RR Tiongkok	4	399,71	2,07	119,56	280,15	96,21	37,18	38,64
Spanyol	2	54,37	0,28	28,78	25,59	31,87	7,46	23,42	
III	KSA/LPKE	27²⁾	5.379,53	27,85	2.395,42	2.984,11	1.173,69	706,90	60,23
TOTAL		143¹⁾	19.317,86	100,00	7.305,95	12.011,94	3.007,10	826,65	27,49

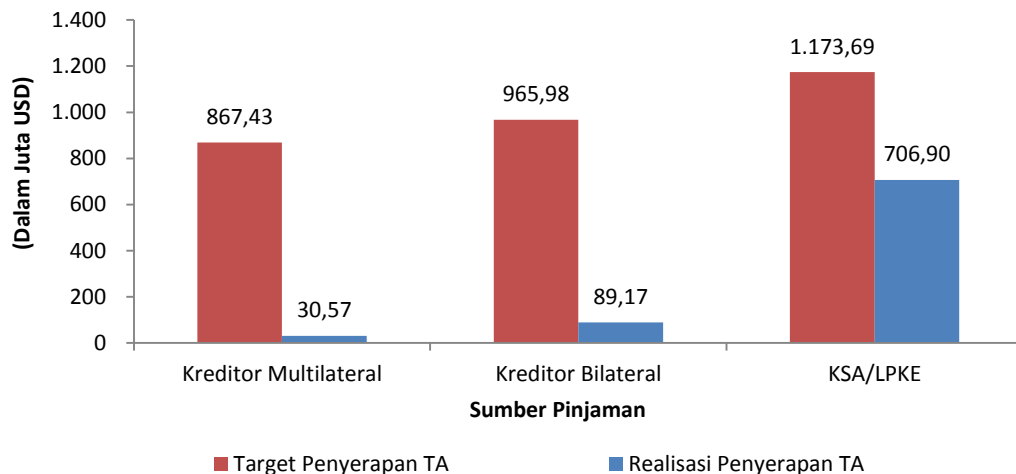
Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Catatan : 1) Terdiri dari 143 proyek dengan 152 Loan Agreement: ADB terdiri dari 10 proyek dengan 11 Loan Agreement

& IDB terdiri dari 14 proyek dengan 22 Loan Agreement

2) Alokasi KE dengan jumlah proyek efektif sebanyak 65 proyek

Dari 143 proyek yang dipantau berdasarkan sumber pinjamannya, proyek yang berasal dari Kreditor Multilateral berjumlah 54 proyek dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 6.513,88 juta, dari sumber pinjaman Kreditor Bilateral berjumlah 62 proyek dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 7.424,45 juta dan proyek yang berasal dari Kreditor KSA/LPKE berjumlah 27 proyek dengan nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 5.379,53 juta.



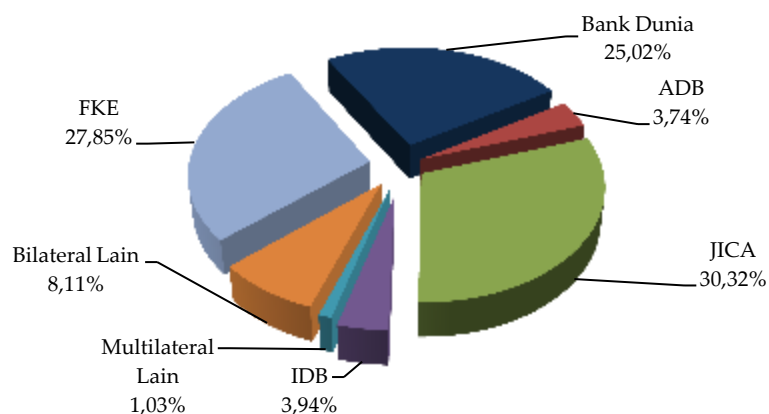
Gambar 1.1 Penyerapan pada Triwulan I Tahun 2014 Berdasarkan Sumber Pinjaman

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Target TA 2014 dari Kreditor Multilateral sebesar ekuivalen USD 867,43 juta dengan realisasi penyerapan sebesar USD 30,52 juta atau 3,52%. Persentase realisasi penyerapan sumber pinjaman IDB merupakan yang terendah karena pada triwulan ini sebanyak 9 proyek (terdiri dari 15 *Loan Agreement*) memiliki *progress variant* (PV) ≤ -30 , yang artinya sangat lambat pelaksanaannya (*serious delay*). Permasalahan utama yang diidentifikasi sebagai penyebab keterlambatan adalah proses pengadaan barang dan jasa yang menghabiskan waktu lebih lama dari yang dijadwalkan. Proyek-proyek yang termasuk kedalam kategori *serious delay* tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.

Pada Kreditor Bilateral, target pada TA 2014 sebesar ekuivalen USD 965,98 juta dengan realisasi penyerapan sebesar USD 89,17 juta atau 9,23%. Persentase penyerapan tertinggi berasal dari sumber pinjaman RR Tiongkok (China) 38,64% dan persentase penyerapan terendah berasal dari sumber pinjaman Jerman, Korea, Perancis dan AFD. Sumber pinjaman Korea, Perancis dan AFD sampai saat ini belum melakukan penyerapan disebabkan sebagian besar proyek-proyek yang dibiayai oleh ketiga sumber pinjaman tersebut masih dalam proses pengadaan barang dan jasa serta terdapat permasalahan dalam pembebasan lahan, khususnya pada proyek IP-532 *Asahan 3 Hydro Electric Power Plant* yang dilaksanakan oleh PT. PLN sehingga pelaksanaan proyek menjadi tertunda.

Komposisi pinjaman luar negeri Triwulan I TA 2014 berdasarkan sumber pinjaman dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.2 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Keterangan: - Multilateral lain terdiri sumber pinjaman IFAD dan Saudi Fund

- Bilateral lain terdiri dari sumber pinjaman Australia, Jerman, Korea, Perancis, AFD, RR Tiongkok dan Spanyol

PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Pada Triwulan I TA 2014 terdapat 143 proyek yang dilaksanakan oleh 26 Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemda selaku instansi penanggung jawab. Dari jumlah tersebut, 117 proyek merupakan pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, 24 proyek merupakan pinjaman proyek yang diteruskanpinjamkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 2 proyek diterushibahkan ke Pemda DKI. Rekapitulasi pinjaman luar negeri berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	% Terhadap Total Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Kementerian/Lembaga	117	14.578,15	75,46	6.035,68	41,40	8.542,48	2.590,08	817,84	31,58
Kemendagri	3	1.244,39	6,44	651,56	52,36	592,83	138,72	10,10	7,28
Kemenhan	21	5.307,78	27,48	2.371,57	44,68	2.936,21	1.140,59	706,90	61,98
Kemenkeu	2	169,97	0,88	24,68	14,52	145,29	3,30	0,03	0,91
Kementan	3	147,07	0,76	33,73	22,93	113,34	32,32	4,21	13,03
Kemenhub	7	1.009,35	5,22	151,32	14,99	858,03	233,70	11,38	4,87
Kemendikbud	12 ²⁾	656,77	3,40	170,69	25,99	486,09	186,39	6,39	3,43
Kemenkes	3	76,89	0,40	66,81	86,88	10,09	1,11	0,00	0,00
Kemenag	4 ²⁾	172,05	0,89	0,70	0,41	171,35	45,77	0,04	0,09
Kemen KP	4	139,38	0,72	19,83	14,23	119,55	25,42	0,63	2,48
Kemen PU	40 ²⁾	4.873,66	25,23	2.334,73	47,86	2.538,94	653,83	73,89	11,30
Kemenristek	1	95,00	0,49	0,03	0,03	94,97	12,02	0,02	0,17
Kemenakertrans	1	32,50	0,17	0,00	0,00	32,50	0,38	0,00	0,00
BPS	1	65,00	0,34	0,00	0,00	65,00	0,26	0,00	0,00
Bappenas	3	235,38	1,22	112,84	47,94	122,54	31,20	4,25	13,62

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	% Terhadap Total Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Kemenkominfo	1	28,50	0,15	11,56	40,58	16,93	3,67	0,00	0,00
Kepolisian RI	6	92,47	0,48	4,06	4,39	88,41	29,12	0,00	0,00
Badan Otorita Batam	1	50,00	0,26	0,00	0,00	50,00	1,50	0,00	0,00
BPKP	1	57,75	0,30	1,91	3,31	55,84	11,93	0,00	0,00
BMKG	1	41,65	0,22	20,26	48,65	21,39	20,26	0,00	0,00
LIPI	1	20,20	0,10	12,62	62,45	7,59	6,57	0,00	0,00
BIG	1	62,39	0,32	46,79	74,99	15,60	12,03	0,00	0,00
Diteruspinjamkan (SLA)	24	4.250,02	22,00	1.162,73	27,36	3.087,30	236,39	8,81	3,73
PT. PLN	19	3.456,43	17,89	1.016,45	29,41	2.439,99	179,14	8,81	4,92
PT. Pertamina	2	564,00	2,92	3,15	0,56	560,84	22,69	0,00	0,00
PT. SMI	2	200,00	1,04	143,13	71,57	56,87	33,40	0,00	0,00
PT. PII	1	29,60	0,15	0,00	0,00	29,60	1,16	0,00	0,00
Diterushibahkan	2	489,69	2,53	107,53	21,96	382,15	180,63	0,00	0,00
Pemda DKI	2	489,69	2,53	107,53	21,96	382,15	180,63	0,00	0,00
TOTAL	143¹⁾	19.317,86	100,00	7.305,95	37,82	12.011,94	3.007,10	826,65	27,49

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Catatan : 1) Terdiri dari 143 proyek dengan 152 Loan Agreement

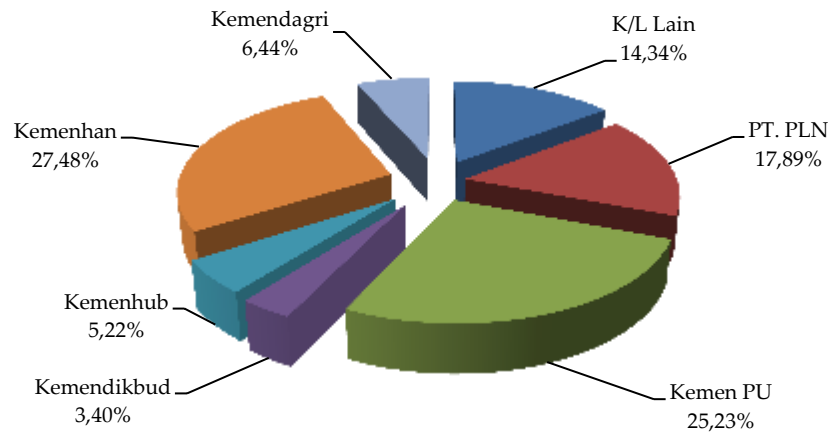
2) Kemendikbud terdiri dari 12 proyek dengan 17 Loan Agreement, Kemenag terdiri dari 4 proyek dengan 5 Loan Agreement, dan Kemen PU terdiri dari 40 proyek dengan 43 Loan Agreement.

Pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga nilainya sebesar ekuivalen USD 14.578,15 juta dengan penyerapan kumulatif mencapai ekuivalen USD 6.035,68 juta dan realisasi penyerapan pada Triwulan I TA 2014 mencapai ekuivalen USD 817,84 juta atau sebesar 31,58% dari target penyerapan ekuivalen USD 2.590,08 juta. Sementara pinjaman proyek yang diteruspinjamkan (SLA) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nilainya mencapai ekuivalen USD 4.250,02 juta dengan penyerapan kumulatif sebesar ekuivalen USD 1.162,73 juta. Realisasi penyerapan pada Triwulan I TA 2014 mencapai USD 8,81 juta atau 3,73% dari target penyerapan USD 236,39 juta. Pinjaman proyek yang diterushibahkan kepada Pemda DKI nilainya mencapai ekuivalen USD 489,69 juta dengan penyerapan kumulatif sebesar ekuivalen USD 107,53 juta.

Pada triwulan ini beberapa Kementerian/Lembaga dan BUMN belum melakukan penyerapan dana karena masih proses lelang seperti proyek di lingkungan BPKP dan PT. Pertamina. Demikian pula dengan proyek BPS masih belum melakukan penyerapan karena proyek ini baru direstrukturisasi dan saat ini sedang dilaksanakan percepatan pengadaan untuk komponen *Owner Agent* agar segera dapat mendukung penguatan sistem statistik nasional. Sementara PT. SMI telah mengajukan penarikan dan masih proses pencairan. Proyek-proyek lain yang belum melakukan penarikan karena masih memproses revisi DIPA yaitu proyek-proyek di Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sementara pinjaman proyek PT. PII dan Badan Otorita Batam belum melakukan penarikan dana karena proyek tersebut baru efektif di triwulan ini. Proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang efektif pada Desember 2013 yang lalu diharapkan dapat memulai *startup workshop* pada bulan Mei atau Juni 2014. Pemda DKI sampai pada Triwulan I TA 2014 belum melakukan penyerapan dana karena terdapat masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan fisik proyek adalah belum adanya rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sehingga pekerjaan fisik

proyek (pembongkaran stadion Lebak Bulus) belum dapat dilaksanakan. Badan Informasi Geospasial masih dalam proses *invoice* sehingga belum ada penarikan di triwulan ini.

Komposisi dan besaran pinjaman luar negeri dari masing-masing Kementerian/Lembaga dan BUMN selaku instansi penanggung jawab dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.3 Komposisi dan Besaran Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

PERMASALAH DALAM PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI

Beberapa permasalahan dan isu yang diidentifikasi dari rapat pemantauan Triwulan I Tahun 2014 dan laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri yaitu:

- **Pengadaan lahan** seperti terjadi pada proyek di lingkungan PT. PLN antara lain adanya kegiatan yang melewati kawasan hutan lindung sehingga memerlukan ijin dari Kementerian Kehutanan. Selain itu juga, penyediaan lahan terkendala belum dialokasikannya anggaran pembebasan lahan oleh pemerintah daerah (APBD).
- **Pencairan dana pinjaman** terkendala adanya penerapan sistem baru (SPAN) di Kementerian Keuangan, sehingga beberapa proyek belum dapat memproses pencairan dananya pada Triwulan I ini seperti proyek PNPM dan proyek *Scholarships Program for Strengthening Reforming Institutions (SPIRIT)*.
- **Revisi DIPA** karena proyek belum mengalokasikan anggaran pada salah satu paket kontrak seperti yang terjadi pada proyek *Hasanuddin University Engineering Faculty Development Project*, terjadinya perubahan nomor akun loan pada proyek SMART-D, penambahan anggaran dan pencantuman DIPA yang terjadi pada proyek yang dibiayai sumber pinjaman Perancis.
- **No Objection Letter** yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PINJAMAN PROYEK YANG BERAKHIR MASA BERLAKUNYA DAN YANG BARU EFEKTIF PADA TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2014

Terdapat 2 proyek yang tutup di Triwulan I TA 2014, kedua proyek tersebut yaitu proyek *Tanjung Priok Gas Fired PP Ext.* Yang dibiayai oleh JICA dan proyek *Rehabilitation Drainage System of Banda Aceh* yang dibiayai oleh pemerintah Perancis. Untuk lebih detail proyek yang tutup pada triwulan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Proyek yang Berakhir Masa Berlakunya di Triwulan I Tahun 2014

(Ekuivalen Juta USD)

No	Kode Loan	Instansi Penanggung Jawab	Nama Proyek	Masa Laku Loan	Nilai Loan	Sisa Loan
JICA						
1	IP-515	PT. PLN	<i>Tanjung Priok Gas Fired PP Ext.</i>	24/09/2004-24/03/2014	574,50	14,08
Perancis						
2	CID 3004 01B	Perancis	<i>Rehabilitation Drainage System of Banda Aceh</i>	09*/09/2009-31/03/2014	50,41	4,11

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Sementara itu, terdapat 4 proyek yang baru efektif dari sumber pinjaman Bank Dunia, ADB, dan Korea di Triwulan I Tahun 2014. Detail proyek-proyek baru tersebut dapat dilihat berikut ini:

Tabel 1.5 Proyek yang Baru Efektif di Triwulan I Tahun 2014

(Ekuivalen Juta USD)

No	Kode Loan	Instansi Penanggung Jawab	Nama Proyek	Masa Laku Loan	Nilai Loan
Bank Dunia					
1	8280-ID	PT. PLN	<i>Scattered Transmission and Substation in Indonesia (Phase II)/IPTD II</i>	26/03/2014-31/12/2018	325,00
ADB					
2	3094-INO	Kemen KP	<i>Coremap CTI</i>	24/02/2014-30/06/2019	45,52
Korea					
3	INA-20	Badan Otorita Batam	<i>Development of Sewerage System in Batam Island</i>	21/03/2014-21/01/2019	50,02
4	INA-21	POLRI	<i>Fast Patrol Boats for Indonesian National Police Project</i>	21/03/2014-21/01/2018	35,02
TOTAL					455,56

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI

Pada Triwulan I Tahun 2014, terdapat 105 proyek hibah yang dilaporkan oleh 12 Kementerian/Lembaga dengan total nilai hibah sebesar ekuivalen USD 871.962.689. Dari 12 Kementerian/Lembaga, Kementerian Pertanian mengelola 79 proyek dengan total nilai hibah sebesar ekuivalen USD 125.811.658, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengelola 6 proyek dengan total nilai hibah ekuivalen USD 23.910.877, dan Bappenas mengelola 5 proyek dengan total nilai hibah ekuivalen USD 614.481.879.

Tabel 1.6 Pelaksanaan Hibah Luar Negeri Triwulan I Tahun 2014

(Ekuivalen USD)

Hibah	Jumlah	Nilai
Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang	58	610.372.023
Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga	27	150.094.207
Hibah Lainnya	20	111.496.459
TOTAL	105	871.962.689

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

- **Pemantauan hibah luar negeri bersumber dari Hibah Lembaga PBB (United Nations Development Programme/UNDP).**

Pemantauan hibah yang berasal dari kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNDP difokuskan pada pencapaian *output* dan *outcome* yang tertuang dalam *Country Programme Action Plan* (CPAP) 2011-2015. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pada Triwulan I Tahun 2014, telah dilakukan *review* tahunan bersama oleh Pemerintah Indonesia dan UNDP terhadap pencapaian *output* dan *outcome* untuk proyek-proyek UNDP. Terdapat 4 (empat) komponen program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan UNDP. Keempat komponen program tersebut adalah Pencapaian MDGs dan Penanggulangan Kemiskinan, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Peningkatan Tata Kelola yang Demokratis, dan Penanggulangan Krisis dan Pemulihan.

- **Pemantauan hibah luar negeri bersumber dari Hibah Pemerintah Amerika Serikat (Millennium Challenge Corporation/MCC).**

Program *Millennium Challenge Corporation* (MCC) *Compact* adalah program hibah yang bersumber dari institusi independen Pemerintah AS yang menyalurkan bantuan dengan misi penurunan angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Instansi penanggung jawab untuk program MCC *Compact* ini adalah Kementerian PPN/Bappenas dan akan berlaku sampai dengan tanggal 1 April 2018 dengan nilai hibah sebesar USD 600 juta. Program MCC *Compact* memiliki beberapa komponen kegiatan, diantaranya *Green Prosperity*, *Community-based Health and Nutrition*, dan *Procurement Modernization*.

BAB II

KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI

KREDITOR MULTILATERAL

Pada triwulan I TA 2014 jumlah proyek pinjaman dari kreditor multilateral adalah sebanyak 54 proyek, jumlah ini menurun sebanyak 13 proyek dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu sejumlah 67 proyek. Hal ini disebabkan karena pendekatan perhitungan proyek tidak berdasarkan jumlah *Loan Agreement* sehingga untuk beberapa *Loan Agreement* yang merupakan 1 proyek dihitung menjadi 1 proyek saja. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 25 proyek pinjaman dari Bank Dunia, 10 proyek pinjaman dari ADB, 14 proyek pinjaman dari IDB, 4 proyek pinjaman IFAD, dan 1 proyek pinjaman dari *Saudi Fund*, seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral

(Ekuivalen Juta USD)

No	Sumber Pinjaman	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
1	Bank Dunia	25	4.833,12	1.408,38	29,14	3.424,74	490,96	21,58	4,40
2	ADB	10 ¹⁾	721,77	243,14	33,69	478,63	139,98	6,45	4,61
3	IDB	14 ¹⁾	760,78	49,49	6,51	711,29	218,51	1,05	0,48
4	IFAD	4	162,21	79,80	49,10	82,41	17,98	1,49	8,33
5	<i>Saudi Fund</i>	1	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Total		54²⁾	6.513,88	1.780,81	27,34	4.733,07	867,43	30,57	3,52

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Catatan : 1) ADB terdiri dari 10 proyek dengan 11 *Loan Agreement* & IDB terdiri dari 14 proyek dengan 22 *Loan Agreement*

2) Terdiri dari 54 proyek dengan 63 *Loan Agreement*

Penyerapan kumulatif hingga triwulan ini mencapai 27,34% (USD 1.780,81 juta) dari total nilai pinjaman sebesar USD 6.513,88 juta, sedangkan realisasi pinjaman pada triwulan ini mencapai 3,52% dari target atau senilai USD 867,43 juta. Menurut instansi penanggung jawab, sebanyak 46 proyek pinjaman dari kreditor multilateral dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan sebanyak 7 proyek deterspinjamkan (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*). Nilai total pinjaman yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebesar USD 4.744,28 juta dengan penyerapan kumulatif hingga triwulan ini mencapai USD 1.595,79 juta (33,64%), sedangkan nilai pinjaman yang diteruskanpinjamkan mencapai USD 1.769,60 dengan penyerapan kumulatif hingga triwulan ini sebesar USD 185,03 juta (10,46%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut ini:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Multilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh K/L		46	4.744,28	1.595,79	33,64	3.148,49	747,75	30,40	4,07
1	Kemendagri	3	1.244,39	651,56	52,36	592,83	138,72	10,10	7,28
2	Kemenkeu	2	169,97	24,68	14,52	145,29	3,30	0,03	0,91
3	Kementan	3	147,07	33,73	22,93	113,34	32,32	4,21	13,03
4	Kemendagri	1	87,55	0,58	0,66	86,97	2,62	0,10	3,82

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
5	Kemendikbud	8 ¹⁾	355,56	70,06	19,70	285,5	110,70	0,92	0,83
6	Kemenag	4 ¹⁾	172,05	0,70	0,41	171,35	45,77	0,04	0,09
7	Kemen KP	3	109,38	11,27	10,30	98,11	13,74	0,63	4,59
8	Kemen PU	16 ¹⁾	2.067,81	753,69	36,35	1.314,32	351,14	11,50	3,26
9	Kemenristek	1	95,00	0,03	0,03	94,97	12,02	0,02	0,17
10	Kemenakertrans	1	32,50	0,00	0,00	32,50	0,38	0,00	0,00
11	BPS	1	65,00	0,00	0,00	65,00	0,26	0,00	0,00
12	Bappenas	2	140,25	47,58	33,93	92,67	24,85	2,85	11,47
13	BPKP	1	57,75	1,91	3,31	55,84	11,93	0,00	0,00
Diteruspinjamkan (SLA)		7	1.769,60	185,03	10,46	1.284,57	119,68	0,18	0,15
14	PT. PLN	3	1.240,00	41,90	3,38	1.198,10	62,43	0,18	0,29
15	PT. Pertamina	1	300,00	0,00	0,00	300,00	22,69	0,00	0,00
16	PT. SMI	2	200,00	143,13	71,57	56,87	33,4	0,00	0,00
17	PT. PII	1	29,60	0,00	0,00	29,60	1,16	0,00	0,00
TOTAL		54²⁾	6.513,88	1.780,81	27,34	4.733,07	867,43	30,57	3,52

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

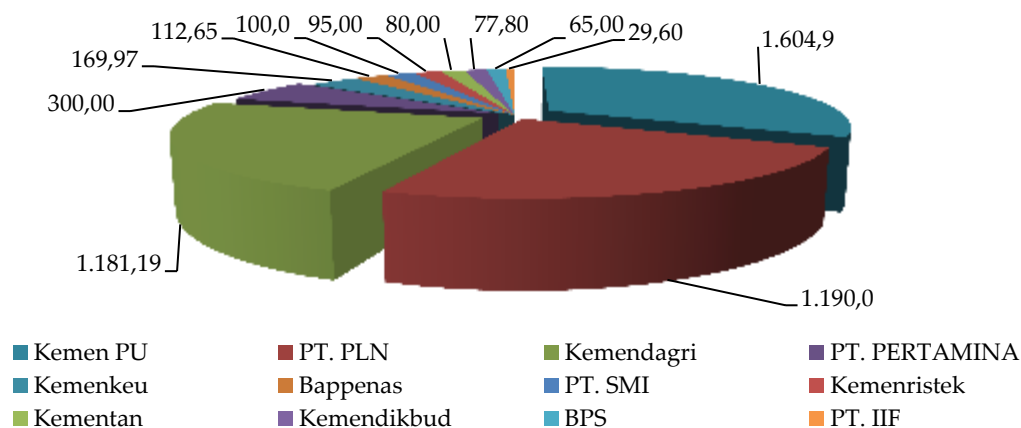
Catatan : 1) Kemendikbud terdiri dari 8 proyek dengan 13 Loan Agreement, Kemenag terdiri dari 4 proyek dengan 5 Loan Agreement, dan Kemen PU terdiri dari 16 proyek dengan 19 Loan Agreement.

2) Terdiri dari 54 proyek dengan 63 Loan Agreement

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kinerja pelaksanaan proyek-proyek pinjaman dari lembaga multilateral berdasarkan lembaga pemberi pinjaman. Pembahasan terdiri dari gambaran umum pinjaman, kinerja pelaksanaan permasalahan dan tindak lanjut serta hasil kunjungan lapangan.

Bank Dunia

Jumlah pinjaman Bank Dunia yang sedang berjalan pada Triwulan I Tahun 2014 yaitu sebesar USD 4.833,12 juta, terdiri dari 19 proyek yang dilaksanakan oleh K/L dengan nilai pinjaman sebesar USD 3.213,52 juta dan 6 proyek yang diteruspinjamkan kepada BUMN dengan nilai pinjaman sebesar USD 1.619,6 juta.



Gambar 2.1 Pinjaman Proyek Bank Dunia Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Kementerian/Lembaga pengelola pinjaman dengan nilai terbesar triwulan ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dengan proporsi sebesar 29,63% dari total nilai pinjaman Bank Dunia. Selanjutnya, PT. PLN yang proporsi pinjamannya sebesar 24,64% dan diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri dengan proporsi pinjaman sebesar 24,44% (termasuk komponen *re-financing*). Lembaga yang mengelola jumlah pinjaman terkecil adalah PT. PII yang hanya melaksanakan 1 proyek dengan pinjaman sebesar USD 29,60 juta atau 0,61% dari total pinjaman Bank Dunia yang sedang berjalan.

Terdapat 1 proyek pinjaman Bank Dunia yang baru efektif pada triwulan ini yaitu 8280-ID *Scattered Transmission and Substation in Indonesia Phase II (IPTD II)* dengan nilai pinjaman sebesar USD 325 juta dan dilaksanakan oleh PT. PLN. Proyek tersebut efektif pada tanggal 26 Maret 2014 dan akan dilaksanakan hingga 31 Desember 2018. Pada triwulan ini tidak terdapat proyek pinjaman Bank Dunia yang berakhir/tutup.

1. Kinerja Pelaksanaan

Kinerja pelaksanaan dan pencapaian *result framework* sesuai dengan dokumen perencanaan proyek yang telah disepakati, meskipun demikian, kinerja penyerapan dana pinjaman menurut Kementerian/Lembaga akan tetap mengawali pembahasan sebagai indikasi awal kinerja pelaksanaan proyek.

Kinerja Penyerapan Menurut Instansi Penanggung Jawab

Penyerapan kumulatif proyek pinjaman Bank Dunia sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2014 mencapai 29,14% dari total nilai pinjaman. Kementerian PU, PT. PLN dan Kementerian Dalam Negeri sebagai pengelola pinjaman terbesar, sampai dengan triwulan ini telah menyerap dana (kumulatif) masing-masing secara berurutan sebesar 40,48%; 2,61% dan 50,76%. Sementara itu, PT. PII sebagai pengelola pinjaman Bank Dunia dengan nilai terkecil hingga saat ini belum ada penyerapan dana karena proyek tersebut baru efektif. Informasi mengenai penyerapan pinjaman Bank Dunia pada masing-masing Kementerian/Lembaga disajikan dengan lebih lengkap pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Penyerapan Pinjaman Bank Dunia Menurut Instansi Penanggung Jawab Pada Triwulan I TA 2014

(Dalam Juta USD)

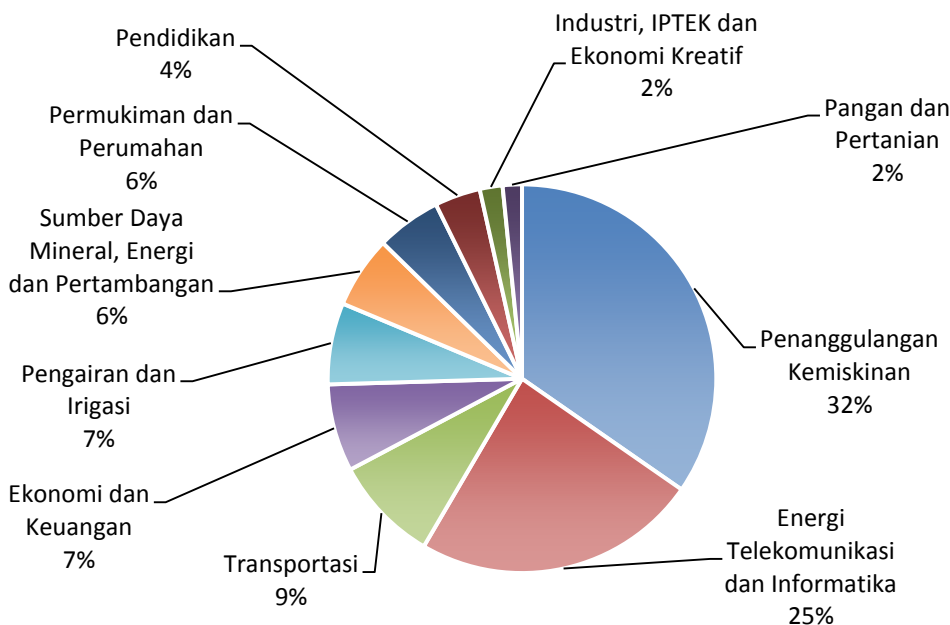
No	Instansi Pelaksana	Jumlah Proyek	Jumlah Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum ditarik	Penyerapan Tahun 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh K/L		19	3.213,52	1.305,37	40,62	1.908,15	396,53	21,40	4,40
1.	Kemen PU	10	1.431,91	579,65	40,48	852,26	188,99	5,05	2,67
2.	Kementan	1	80,00	8,30	10,38	71,70	21,84	2,79	12,77
3.	Kemendikbud	1	77,80	60,36	77,58	17,44	12,80	0,56	4,28
4.	Kemendagri	2	1.181,19	599,63	50,76	581,56	136,90	10,10	7,38
5.	Kemenkeu	2	169,97	24,68	14,52	145,29	3,30	0,03	0,91
6.	kemenristek	1	95,00	0,03	0,03	94,97	12,02	0,02	0,17
7.	Bappenas	1	112,65	32,72	29,05	79,93	20,42	2,85	13,96
8.	Badan Pusat Statistik	1	65,00	0,00	0,00	65,00	0,26	0,00	0,00
Diteruspinjamkan (SLA)		5	1.619,60	103,01	6,36	1.516,59	94,43	0,18	0,19
9.	PT. PLN	2	1.190,00	31,01	2,61	1.158,99	42,58	0,18	0,42
10.	PT. Pertamina	1	300,00	0,00	0,00	300,00	22,69	0,00	0,00
11.	PT.SMI	1	100,00	72,00	72,00	28,00	28,00	0,00	0,00
12.	PT. PII	1	29,60	0,00	0,00	29,60	1,16	0,00	0,00
Total		24	4.833,12	1.408,38	29,14	3.424,74	490,96	21,58	4,40

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Catatan: Data penyerapan yang digunakan adalah data LPKPHLN Triwulan I Tahun 2014

Dari 12 instansi pelaksana proyek pinjaman Bank Dunia, terdapat 4 instansi yang belum ada penyerapan dana pada triwulan I TA 2014 yaitu Badan Pusat Statistik, PT. Pertamina, PT. SMI dan PT. PII. Khusus untuk BPS dan PT. Pertamina belum ada penyerapan sejak awal proyek efektif. Permasalahan yang menyebabkan hal tersebut telah diidentifikasi dan akan dijelaskan pada bagian pembahasan kinerja.

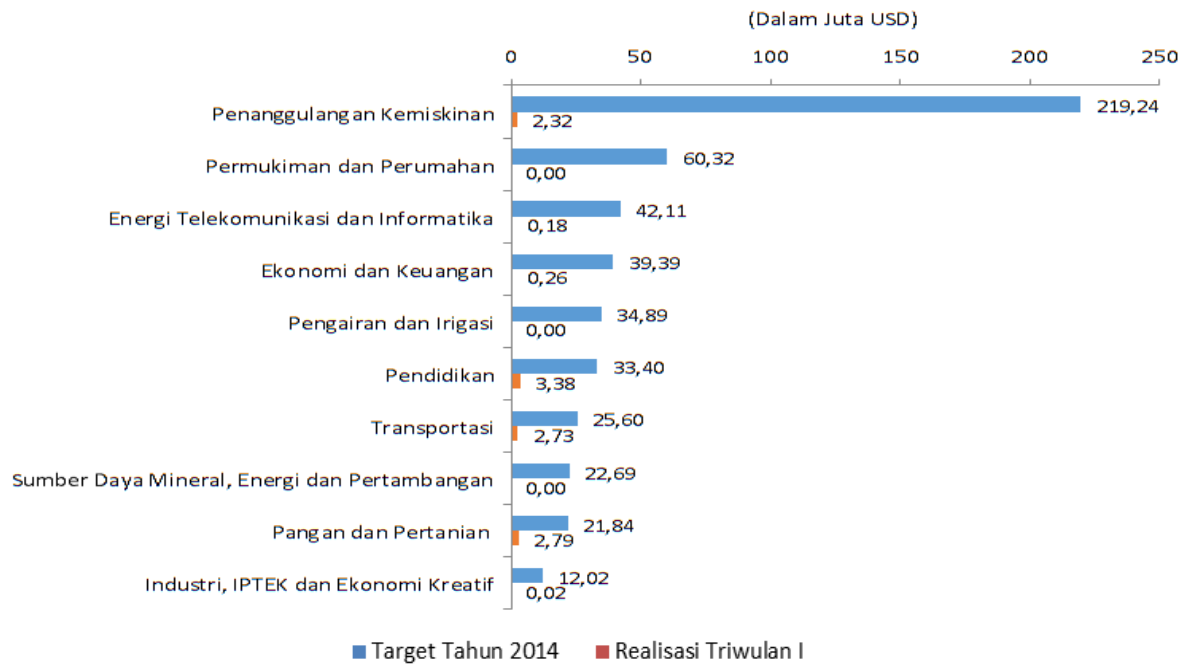
Pinjaman Bank Dunia mendukung 10 sektor pembangunan di Indonesia, diantaranya adalah sektor pengairan dan irigasi, transportasi, penanggulangan kemiskinan, permukiman dan perumahan, energi, keuangan dan lain-lain. Proporsi nilai pinjaman Bank Dunia pada masing-masing sektor tersebut disajikan dalam diagram berikut:



Gambar 2.2 Proporsi Jumlah Pinjaman Bank Dunia Menurut Sektor Triwulan I Tahun 2014
Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Sektor dengan jumlah pinjaman terbesar pada Triwulan I adalah penanggulangan kemiskinan dengan nilai pinjaman mencapai 32% dari total nilai pinjaman proyek Bank Dunia, diikuti oleh sektor energi telekomunikasi dan informatika sebesar 25%. Sektor dengan jumlah pinjaman terendah adalah sektor pangan dan pertanian yaitu sebesar 2% dan sektor industri, IPTEK, pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar 2% dari total nilai pinjaman Bank Dunia.

Pada tahun 2014 sektor penanggulangan kemiskinan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pelaksanaan kegiatan, begitu juga sektor permukiman dan perumahan serta sektor pengairan dan irigasi dengan jumlah anggaran di atas USD 40 juta. Sektor penanggulangan kemiskinan telah menunjukkan progres penyerapan dana yang cukup baik pada Triwulan I, begitu juga dengan sektor pendidikan dan sektor transportasi. Namun, masih terdapat beberapa sektor yang belum menunjukkan progres penyerapan dana yaitu sektor ekonomi dan keuangan; sektor sumberdaya energi, mineral dan pertambangan; serta sektor industri, IPTEK dan ekonomi kreatif. Diharapkan pada triwulan selanjutnya kinerja penyerapan dana dapat ditingkatkan sehingga target penyerapan tahun ini dapat tercapai.



Gambar 2.3 Realisasi penyerapan Dana Pinjaman Bank Dunia Menurut Sektor, Triwulan I Tahun 2014

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

1.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP)

Proyek DOISP merupakan proyek pinjaman Bank Dunia yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang berfokus pada peningkatan fungsi dan keamanan bendungan serta peningkatan dari sisi manajemen, regulasi dan kapasitas pengelolaan pada sektor pengairan dan irigasi. Proyek ini memiliki *progress variant* -22,73 dan sudah diperpanjang pada akhir tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Belum ada perbaikan yang signifikan dalam hal kinerja penyerapan proyek, hal ini ditunjukkan oleh *progress variant* dengan nilai minus (-) yang masih cukup besar dan merupakan proyek dengan status *at risk* baik di Kementerian Pekerjaan Umum maupun di *portfolio* proyek Bank Dunia. Kendala yang dialami oleh proyek DOISP terdapat dalam pencairan dana karena saat ini rekening khusus belum diisi kembali (kosong) dan adanya surat dari Kementerian Keuangan mengenai penghentian dana talangan. Tindak lanjut yang dilakukan adalah mempercepat pengisian kembali rekening khusus yang saat ini sedang diproses.

Water Resources and Irrigation Sector Management (WISMP-II)

Proyek WISMP-II lebih difokuskan untuk peningkatan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya air untuk irigasi lahan pertanian. Proyek ini telah mencapai angka *progress variant* -37,04 dan masih terkendala dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa. Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan untuk dapat menggunakan metode *shopping* merujuk pada sistem pengadaan Bank Dunia. Hal ini masih dibahas secara internal pemerintah sebelum disampaikan usulannya ke Bank Dunia. Selain permasalahan pengadaan barang dan jasa, proyek WISMP 2 juga mengalami kendala dalam hal penganggaran (DIPA) di daerah. Sebagian daerah memiliki anggaran yang lebih rendah

dari AWP. Untuk tahun 2014 terdapat tiga daerah yang belum mengalokasikan DIPA yaitu Solo, Mamuju dan Morowali. Hal ini disebabkan oleh pergantian pejabat dan kurangnya sosialisasi di daerah. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan di daerah tersebut adalah melakukan sosialisasi dan *workshop* penyusunan AWP dan pen-DIPA-an serta penguatan sistem informasi manajemen proyek.

Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)

Proyek JUFMP berkontribusi dalam peningkatan operasi dan pemeliharaan komponen-komponen prioritas dalam sistem manajemen banjir di Jakarta. Proyek JUFMP memiliki *progress variant* mencapai -28,43. Permasalahan di proyek ini terletak pada proses pencairan dana, khususnya paket 2A dan 2B terkendala karena adanya surat edaran dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang mengatur bahwa mekanisme pencairan dana untuk proyek ini adalah menggunakan rekening khusus, sementara kedua paket tersebut menggunakan penarikan langsung. Sebelumnya telah dilakukan penarikan sebesar USD 9,7 juta dengan menggunakan mekanisme penarikan langsung, namun setelah adanya surat edaran tersebut KPPN tidak bersedia lagi untuk mengeluarkan SP3. Setelah dilakukan analisis, mekanisme rekening khusus tidak dimungkinkan untuk kedua paket ini karena rata-rata penarikan setiap bulan maksimal hanya Rp 5 miliar. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut telah dilakukan pertemuan awal dengan berbagai pihak terkait dengan kesimpulan bahwa seharusnya mekanisme penarikan langsung masih dapat dilakukan untuk kedua paket tersebut, koordinasi dan konsultasi terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik.

Western Indonesia National Road Improvement (WINRIP)

Proyek WINRIP bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan beberapa bagian jalan pada koridor Sumatera bagian barat dengan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pengguna jalan. Kinerja penyerapan proyek WINRIP cukup mengkhawatirkan, *progress variant* telah mencapai angka dibawah -30, artinya proyek mengalami keterlambatan yang cukup serius. Selama dua tahun pelaksanaan proyek hanya mampu menyerap dana sebesar 1,35% dari total nilai pinjaman. Hal ini disebabkan oleh proses procurement yang sangat lambat sehingga pelaksanaan pekerjaan terhambat. Pada tahun 2014 direncanakan penarikan dana sebesar USD 10,57 juta dan pada triwulan pertama telah menunjukkan progres capaian sebesar 25,83% dari target.

Strategic Road Infrastructure Project (SRIP)

Proyek SRIP bertujuan untuk peningkatan daya saing ekonomi wilayah melalui peningkatan kapasitas dan kualitas jalan strategis di pulau Jawa dan Sumatera, peningkatan keamanan jalan dan peningkatan efisiensi serta transparansi dalam pengadaan pekerjaan. Kinerja penyerapan dana proyek SRIP telah menunjukkan perbaikan, hal ini ditunjukkan dengan nilai *progress variant* yang membaik. Proyek tersebut akan segera berakhir pada Triwulan ke-2 Tahun 2014, penyerapan kumulatif hingga triwulan ini telah mencapai 78,62% sehingga *progress variant* menjadi -17,64 dan jumlah pinjaman yang belum ditarik adalah sebesar USD 40,93 juta. Pada Tahun 2014, direncanakan penarikan dana hanya sebesar USD 0,33 juta, dengan demikian terdapat potensi sisa dana yang cukup besar, perlu dilakukan pembahasan yang lebih rinci mengenai tindak lanjutnya.

PNPM Perkotaan

Proyek PNPM Perkotaan 2012-2015 penarikan kumulatif telah mencapai angka 29,43% dari nilai pinjaman. Rencana penarikan tahun ini adalah USD 73,28 juta dan pada triwulan I telah direalisasikan sebesar USD 3,17 juta. Proyek ini telah mencapai angka *progress variant* -8,74. Pada PNPM Perkotaan terdapat kendala pengalokasian dana PNPM yang seharusnya menggunakan mekanisme *refinancing modalities*. Pada tahun ini dana yang dialokasikan adalah dana pinjaman bukan dana rupiah murni sehingga akan menggunakan mekanisme penarikan melalui Rekening Khusus dan tidak sesuai dengan *disbursement letter* Bank Dunia yang menggunakan mekanisme *refinancing*. Hal ini akan dibahas dengan Kementerian Keuangan dan Bank Dunia, agar segera dapat dituntaskan. Kendala lainnya yang dihadapi proyek PNPM Perkotaan dalam pencairan dana adalah penyesuaian dengan sistem yang baru di Kementerian Keuangan (Sistem SPAN)

Third WSSLIC-PAMSIMAS dan PAMSIMAS II

Proyek Pamsimas memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah penduduk perdesaan dan daerah peri-urban berpendapatan rendah yang dapat mengakses fasilitas air bersih dan sanitasi berkelanjutan serta untuk meningkatkan kebiasaan hidup bersih sebagai bagian dari upaya untuk mencapai WSS-MDGs dengan pendekatan berbasis komunitas. Dalam hal kinerja penyerapan, proyek ini menunjukkan kinerja yang relatif baik. Target penyerapan proyek PAMSIMAS II mencapai USD 26,7 juta, sementara itu proyek *third WSSLIC PAMSIMAS* hanya menargetkan realisasi dana untuk tahun ini sebesar USD 0,50 juta.

Urban Water Supply and Sanitation Project (UWSSP)

UWSSP memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan suplai air bersih di area proyek dengan melakukan penguatan terhadap utilitas air lokal agar menjadi lebih efisien dan berkelanjutan secara finansial. Angka *progress variant* UWSSP bernilai negatif namun belum masuk pada kategori keterlambatan penyerapan yang tinggi.

- **Kementerian Dalam Negeri**

PNPM Perdesaan

Proyek PNPM Perdesaan IV yang akan berakhir lebih awal (Juni 2014) penyerapan kumulatif telah mencapai 98,83% dan tidak ada rencana penyerapan pada tahun ini. Proyek PNPM Perdesaan 2012-2015 penarikan kumulatif telah mencapai 11,49% dari nilai pinjaman. Target penarikan tahun ini cukup besar yaitu mencapai USD 136,44 juta, realisasi pada triwulan I tahun 2014 sebesar 7,40% dari target. Kendala utama yang dihadapi proyek PNPM Perdesaan dalam pencairan dana adalah penyesuaian dengan sistem yang baru di Kementerian Keuangan (Sistem SPAN). Selain itu juga terjadi kesalahan debit *Loan IBRD 8217* (PNPM Perdesaan 2012-2015) pada *Loan IBRD 8079-ID* (PNPM Perdesaan IV) sebesar USD 17.518,63, saat ini sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan mengenai upaya pemecahan permasalahan tersebut. Terdapat potensi sisa dana sebesar USD 5,5 juta pada PNPM Perdesaan IV, perlu dianalisis lebih lanjut apakah akan dikembalikan atau dipergunakan karena dana tersebut telah masuk dalam rekening khusus.

- **PT. PLN**

- Power Transmission Development Project (PTD I) dan Scattered Transmission and Substation in Indonesia (Phase II)/IPTD II***

PTD I dan IPTD II bertujuan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik dan peningkatan akses terhadap energi listrik melalui peningkatan dan perluasan kapasitas sistem transmisi daya. IPTD I dilaksanakan di Jawa dan Sumatera bagian tengah dan selatan, sedangkan proyek IPTD II dilaksanakan di Jawa-Bali, serta Indonesia Barat dan Timur. Kinerja penyerapan dana pada proyek IPTD I tergolong sangat rendah dengan nilai *progress variant* mencapai -49,70. Pada Tahun 2014 ditargetkan penarikan yang cukup besar untuk proyek PTD I yaitu mencapai USD 38,28 juta. Sementara itu, untuk proyek IPTD II belum dialokasikan anggaran untuk tahun ini karena proyek baru efektif di triwulan ini, diperkirakan belum akan ada penyerapan pada tahun pertama.

- Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Electrical Power***

Kinerja penyerapan dana pada proyek ini tergolong rendah, hal ini ditunjukkan oleh nilai *progress variant* yang mencapai angka -30,67. PT. PLN menetapkan target penyerapan di tahun 2014 untuk proyek *Upper Cisokan* hanya senilai USD 4,3 juta.

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

- Health Professional Education Quality Project***

Penyerapan kumulatif untuk proyek HPEQ hingga Triwulan I Tahun 2014 telah mencapai 77,58% dari total nilai pinjaman. Pada tahun 2014 ditargetkan penarikan dana sebesar USD 13,00 juta, dan pada Triwulan I telah terserap sebesar 4,31%. Penyerapan dana pada proyek ini terkendala oleh penggunaan sistem baru di Kementerian Keuangan, sehingga administrasi pencairan dana membutuhkan waktu yang lebih lama. Jika tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan proyek diperkirakan pencairan dana bisa mencapai 98% pada akhir proyek.

- **Bappenas**

- Scholarships Program for Strengthening Reforming Institutions***

Proyek SPIRIT hingga triwulan ini telah melakukan penarikan dana sebesar USD 32,72 juta (29,05%), meskipun persentase penyerapan tersebut dibawah persentase waktu terpakai, namun *committed loan* telah jauh melampaui angka tersebut. Setelah melakukan perhitungan *committed loan*, diperkirakan terdapat potensi sisa dana di Bappenas dan kekurangan pendanaan di Kementerian Dalam Negeri sehingga diperlukan realokasi.

Terdapat kendala dalam pencairan dana untuk biaya hidup (*living allowance*) untuk bulan April sampai dengan Juni 2014. Hal ini disebabkan diterapkannya sistem SPAN yang ada di KPPN. Penanggung jawab proyek telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait permasalahan tersebut. Keterlambatan pembayaran ini akan berpengaruh cukup besar pada pencapaian PDO yang terkait dengan "*satisfaction level*" sehingga perlu untuk dilakukan upaya khusus agar permasalahan tidak berulang. Dari sisi manajemen proyek akan dilakukan penguatan dengan merekrut "*payment agent*", namun menurut Kementerian Keuangan hal tersebut tidak diperbolehkan karena Kementerian Keuangan memiliki mekanisme yang mirip dengan "*payment agent*". Menurut pengelola proyek mekanisme tersebut tidak akan terlalu banyak membantu dalam masalah payment.

Permasalahan ini akan dibahas selanjutnya dalam MID *term review* untuk dirumuskan tindak lanjutnya.

- **Kementerian Keuangan**

- Government Financial Management & Rev. Adm. Project (GFMRAP) dan Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR)*

- Proyek PINTAR dan GFMRAP merupakan proyek dengan kinerja penyerapan paling rendah, angka *progress variant* masing-masing mencapai -72,08 dan -42,12. Khusus untuk proyek PINTAR saat ini menunggu usulan pembatalan resmi dari Kementerian Keuangan.

- **Badan Pusat Statistik (BPS)**

- Statistical Capacity Building Change and Reform for the Development Statistic (Statcap-Cerdas)*

- Proyek Statcap Cerdas memiliki *progress variant* yang cukup besar yaitu mencapai -51,19. Proyek ini baru direstruktisasi dan saat ini sedang dilaksanakan percepatan pengadaan untuk komponen *Owner Agent* agar segera dapat mendukung penguatan sistem statistik nasional.

- **PT. SMI**

- IFF Company Project*

- Proyek IIFF ditargetkan dapat menyerap keseluruhan dana pada tahun 2014, sisa dana yang belum terserap adalah sebesar USD 28 juta, namun pada tanggal 25 Maret 2014 dokumen penarikan sebesar USD 20 juta telah diajukan ke Dit SMI saat ini masih diproses.

- **Kementerian Pertanian**

- Sustainable Agricultural Research and Technology (SMART-D)*

- Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk membangun dan mendiseminasikan teknologi inovatif yang relevan dan sesuai kebutuhan produsen maupun sistem pangan dan pertanian.

Dalam hal penyerapan dana proyek SMART-D perlu melakukan perbaikan karena saat ini *progres variant* hampir mencapai -20. Penyerapan kumulatif hingga Triwulan I Tahun 2014 hanya 10,38% sementara waktu terpakai telah mencapai 29,96%. Pada tahun 2014 ditargetkan penarikan dana yang cukup besar yaitu sebesar USD 21,84 juta, dan pada Triwulan I baru terserap sebesar USD 2,79 juta. Permasalahan pada triwulan ini adalah perlunya dilakukan revisi DIPA untuk perubahan akun dari 521219 (belanja barang non operasional lainnya) menjadi 524219 (belanja perjalanan dinas luar negeri lainnya) dan penambahan anggaran alat nano dari lanjutan TA 2013, revisi tersebut telah diproses di Kementerian Keuangan.

- **Kementerian Riset dan Teknologi**

- Research and Innovation in Science and Technology Project (RISET-Pro)*

- Proyek ini bertujuan untuk mendukung dan memperkuat pembangunan IPTEK nasional serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan penelitian dan pengembangan

di bidang IPTEK, serta untuk memperkuat insentif kinerja dan kapasitas sumber daya manusia di kelembagaan IPTEK.

Proyek Riset-pro baru efektif pada pertengahan tahun 2013 sehingga penyerapan dana hingga saat ini masih sangat rendah yaitu USD 0,03 juta. Pada tahun 2014 ditargetkan penarikan sebesar USD 12,02 juta, pada Triwulan I belum telah dilakukan realisasi dana sebesar USD 0,02 juta. Rendahnya penyerapan dana disebabkan oleh keterlambatan pengajuan AWP karena terdapat beberapa kegiatan yang harus di-review, dan terjadi pergeseran jadwal untuk beberapa kegiatan yang semula akan dilaksanakan pada tahun 2013 namun tidak dapat terlaksana dan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2014, selain itu juga terdapat beberapa tambahan kegiatan baru.

- **PT. Pertamina**

- ***Geothermal Clean Energy Investment Project***

- Pada sektor sumber daya energi dan pertambangan terdapat 1 proyek yang didanai dengan pinjaman dari Bank Dunia yaitu *Geothermal Clean Energy Investment Project*. Proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembangkit energi yang berasal dari sumber daya *geothermal* terbarukan, dan mengurangi dampak lingkungan.

- Sejak efektif pada tahun 2012 hingga saat ini belum ada penyerapan dana untuk proyek ini sehingga *progress variant* mencapai -63,65. Kendala utama yang dihadapi oleh proyek ini adalah proses pengadaan yang memakan waktu cukup lama, dan belum dapat diselesaikan hingga saat ini.

1.2. Kinerja Pencapaian *Output/Intermediate Result*

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

- ***Proyek Dam Operational Improvement and Safety (DOISP)***

- Kinerja pencapaian *result framework* pada proyek DOISP secara umum telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Dari 3 indikator PDO yang harus dicapai, 2 indikator diantaranya telah mengalami peningkatan capaian yang cukup signifikan, namun 1 indikator yaitu *DGWR Dam Portfolio Management Program Established* belum menunjukkan peningkatan capaian dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selanjutnya, untuk indikator *intermediate result*, dari 10 target indikator yang harus dicapai, 2 indikator diantaranya telah tercapai pada periode sebelumnya. Terdapat 1 indikator yang telah tercapai melampaui target pada periode ini yaitu *percentage of 34 priority dams with SEOP Operational* dengan target sebanyak 30%, pada periode ini telah tercapai sebanyak 50%. Sebagian indikator lainnya telah menunjukkan kemajuan capaian dan hampir mencapai target yang ditetapkan kecuali untuk dua indikator yaitu i) *Special studies for dams completed*, dari target sebanyak 22 studi, pada periode ini baru tercapai 5 studi, hanya meningkat dua studi dibandingkan dengan periode sebelumnya, ii) *Household joining catchment management Activities*, dari target sebanyak 25 *household* pada periode ini belum ada kemajuan capaian dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu 10 *household*.

Proyek *Water Resources and Irrigation Sector Management (WISMP-II)*

Pada proyek WISMP 2 belum ada *update* capaian *result framework* dari periode sebelumnya bulan September 2013. Capaian secara umum belum menunjukkan hasil yang menggembirakan karena target untuk tahun 2012 dan tahun 2013 tidak dapat dicapai. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih keras dari pelaksana proyek agar target untuk tahun 2014 dapat tercapai dengan baik. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek dan pencapaian target adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia sebagai pelaksana proyek di daerah. Oleh karena itu, konsultan diharapkan dapat lebih aktif untuk memfasilitasi proses pelaksanaan kegiatan di daerah.

Proyek *Jakarta Urgent Flood Mitigation (JUFMP)*

Pada proyek JUFMP belum ada capaian untuk semua indikator keberhasilannya baik indikator PDO maupun *intermediate result*. Masih terdapat banyak kendala pada pelaksanaan beberapa paket pekerjaan diantaranya paket 1, paket 2A dan 2B serta paket 5. Pada paket 1 (Waduk Mlati & Gunung Sahari), pekerjaan masih terkonsentrasi di Gunung Sahari-Ciliwung sehingga Waduk Mlati baru dapat dimulai pekerjaannya pada akhir bulan April. Paket 2A dan 2B adalah paket yang terkait dengan pembuangan material hasil pengerukan, terdapat kendala akses jalan yang sempit menuju tempat pembuangan di Ancol. Selain itu sempat terjadi kerusakan pada tanggul utara yang membutuhkan waktu untuk perbaikan sekitar 2 bulan. Saat ini masih dilakukan diskusi untuk menanggulangi permasalahan akses jalan, sedangkan tanggul utara sedang dalam proses perbaikan. Pada paket 5 terdapat kendala permintaan Gubernur DKI Jakarta untuk memperdalam pengerukan dari 3 meter menjadi 5 meter. Diskusi mengenai hal tersebut memakan waktu yang cukup panjang hingga disepakati kedalaman pengerukan adalah 4 meter. Sementara itu, permasalahan *Land Acquisition and Resettlement Plan (LARP)* yang sebelumnya menjadi hambatan terbesar dalam pelaksanaan proyek telah disepakati untuk menggunakan kebijakan Pemprov. DKI yaitu dengan penyediaan rusunawa, diperkirakan akan dimulai pada pertengahan tahun 2015. Namun, terdapat resiko jumlah rusunawa tidak mencukupi untuk menampung penduduk yang dipindahkan.

Proyek *Strategic Road Infrastructure Project (SRIP)*

Sampai dengan triwulan ini masih terdapat beberapa indikator PDO maupun *intermediate result* proyek SRIP yang belum tercapai, sementara proyek akan segera berakhir pada Triwulan II TA 2014. Dari sepuluh indikator PDO, hanya empat indikator yang sudah mencapai target, lima indikator lainnya hampir mencapai target akhir. Terdapat satu indikator PDO yang belum ada progres capaian yaitu *average increase of AADT on project roads* dengan target sebanyak 20. Untuk indikator *intermediate result*, dari tiga indikator yang sudah ditetapkan telah menunjukkan angka capaian yang mendekati target akhir. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari pelaksana proyek, agar semua target yang sudah disepakati pada saat perencanaan proyek dapat dicapai dengan baik.

Pelaksanaan pekerjaan pada proyek SRIP hampir semuanya dapat diselesaikan, kecuali paket Bandar Lampung A. Kontrak untuk paket ini telah berakhir pada 31 Maret 2014, namun pekerjaan belum dapat diselesaikan sehingga diperlukan perpanjangan kontrak. Amandemen untuk kontrak tersebut sudah diproses, dan perpanjangan direncanakan sampai akhir Mei 2014.

Proyek Western Indonesia National Road Improvement (WINRIP)

Pada proyek WINRIP belum ada *update* capaian *result framework* terbaru. Update terakhir pada bulan Desember 2013 menunjukkan bahwa belum ada capaian indikator baik PDO maupun *intermediate result* untuk proyek ini. Diharapkan pelaksana proyek dapat memantau dan memperbaharui data capaian *result framework* agar dapat diketahui progres capainnya. Dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak terdapat kendala yang berarti. Salah satu permasalahan yang ditemui adalah perlunya dilakukan *upgrade* pada salah satu paket pekerjaan dari dokumen SPPL menjadi dokumen UKL/UPL, namun permasalahan ini diperkirakan dapat segera diatasi dengan baik.

Proyek PNPM Perkotaan

Pada proyek PNPM Perkotaan tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pencapaian indikator PDO maupun *intermediate result*. Hampir semua indikator memiliki progres capaian yang baik bahkan beberapa diantaranya melampaui target kecuali indikator yang berkaitan dengan pinjaman bergulir (*revolving loan fund*) baik pada PDO maupun *intermediate result*. Dalam pelaksanaan di lapangan komponen tersebut terbukti cukup sulit untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu juga terdapat permasalahan dalam pengalihan aset ke pemerintah daerah terkait. Sebagai langkah awal akan dilakukan *workshop* terlebih dahulu untuk mencari model yang tepat untuk melimpahkan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah.

Urban Water Supply and Sanitation Project (UWSSP)

Sampai dengan akhir triwulan I TA 2014 *update* capaian terbaru untuk indikator *result framework* proyek UWSSP belum diperoleh. Laporan terakhir mengenai capaian tersebut adalah pada bulan April tahun 2013 sehingga penanggung jawab diharapkan untuk segera memperbaharui data capaian untuk masing-masing indikator.

Proyek Third WSSLIC PAMSIMAS & PAMSIMAS II

Proyek Proyek *Third WSSLIC PAMSIMAS* dan *PAMSIMAS II* memiliki *result framework* yang tergabung menjadi satu, karena proyek *PAMSIMAS II* merupakan *additional financing* untuk proyek *Third WSSLIC PAMSIMAS*. Capaian terakhir (Maret 2014) menunjukkan progres yang cukup baik. Sebagian besar indikator PDO dan *intermediate result* hampir mencapai target akhir, bahkan 2 indikator *intermediate result* telah berhasil tercapai melampaui target yaitu i) *percent of districts with capacity building plan to support the adoption and mainstreaming of the PAMSIMAS approach and progress towards achieving its objectives* dengan target sebesar 80%, dan telah berhasil dicapai sebesar 100%; 2) *percent of District with project monitoring structure and tools (IMIS, M&E) provides regular information on project information quality* dari target sebesar 90% telah berhasil dicapai sebesar 91,48%.

- **Kementerian Dalam Negeri**

Proyek PNPM Perdesaan

Untuk proyek PNPM Perdesaan sebagian besar indikator *intermediate result* telah berhasil dicapai melampaui target, dan capaian indikator PDO telah mendekati target akhir proyek. Permasalahan pengalihan aset kepada pemerintah daerah juga merupakan salah satu isu utama pada proyek PNPM Perdesaan

- **PT. PLN**

Proyek-proyek pada sektor energi mengalami kendala yang cukup sulit untuk diatasi sehingga berdampak secara sistemik terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Secara umum permasalahan utama yang dihadapi oleh proyek-proyek pada sektor ini adalah i) pengadaan/pembebasan lahan, ii) pengadaan barang dan jasa, iii) kinerja kontraktor yang dibawah target yang diharapkan, serta iv) perubahan spesifikasi pekerjaan karena perubahan kebutuhan konsumen. Permasalahan lebih rinci untuk masing-masing proyek dapat dilihat pada buku lampiran. Berbagai kendala yang dihadapi tersebut berdampak pada rendahnya pencapaian *result framework* yang telah disepakati. Pada proyek IPTD I belum ada progres pencapaian baik untuk indikator PDO maupun *intermediate result*, begitu juga dengan proyek *Upper Cisokan*, belum ada progres capaian untuk indikator PDO, sementara itu untuk indikator *intermediate result* yang telah tercapai adalah yang terkait dengan pengadaan. Indikator lain sudah menunjukkan progres capaian adalah indikator yang terkait dengan pembebasan lahan.

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

- Proyek *Health Professional Education Quality (HPEQ)***

Pada proyek HPEQ belum terdapat progres capaian untuk indikator PDO, sedangkan pada *intermediate result* hanya sebagian kecil indikator yang telah menunjukkan progres capaian cukup baik, sebagian lainnya belum ada progres hingga triwulan ini. Indikator *intermediate result* yang sudah tercapai untuk proyek ini adalah *Number or percentage of medical schools receiving finance support to strengthen the program* dengan target sebanyak 43 sekolah. Proyek ini dinilai sebagai salah satu proyek pinjaman Bank Dunia yang berhasil namun ukuran keberhasilan yang dirumuskan pada saat perencanaan dinilai kurang tepat. Oleh karena itu telah diusulkan untuk dilakukan restrukturisasi yang mencakup realokasi dana, *partial cancellation* dan perubahan indikator.

- **Bappenas**

- Proyek *Scholarships Program for Strengthening Reforming Institutions (SPIRIT)***

Pada proyek SPIRIT juga belum terdapat progres capaian yang signifikan baik untuk indikator PDO maupun indikator *intermediate result*. Terkait dengan kinerja pelaksanaan kegiatan, pada komponen 3 (*program support*) kinerjanya masih sangat rendah, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja komponen tersebut. Selain itu terkait dengan potensi sisa dana, terdapat kemungkinan untuk perubahan HCDDP di kementerian, namun diharapkan perubahan tersebut bukan semata-mata karena pembiayaan melainkan berhubungan dengan rencana strategis masing-masing K/L.

- **Kementerian Keuangan**

- Proyek *Government Financial Management & Rev. Adm. Project (GFMRAP)***

Pencapaian PDO dan *intermediate result* proyek GFMRAP telah mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Pada Akhir tahun 2013 telah dimulai *piloting* untuk sistem SPAN, namun pelaksanaan pilot 2B ditunda karena masalah *server*, familiarisasi bagi *end user* dan aplikasi perbankan. Pada komponen SAKTI *Turnkey Solution* terdapat permasalahan penyelesaian pekerjaan oleh pihak ketiga yang melampaui batas waktu kontrak, namun pihak tersebut telah setuju untuk membayar denda atas keterlambatan. Sementara itu,

pada PSSU GFM RAP terjadi keterlambatan dalam proses pengadaan konsultan money karena perubahan dari konsultan internasional menjadi konsultan nasional.

- **Badan Pusat Statistik (BPS)**

Proyek *Statistical Capacity Building Change and Reform for the Development Statistic (Statcap-Cerdas)*

Proyek Sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 belum ada progres capaian signifikan pada indikator PDO maupun *intermediate result* proyek Statcap-Cerdas.

- **PT. SMI**

Proyek *IIFF Company*

Pencapaian *intermediate result* untuk proyek IIFF pada periode ini telah mengalami peningkatan cukup signifikan. Untuk pencapaian indikator PDO, sebanyak 2 dari 3 indikator juga sudah menunjukkan progres capaian, sedangkan 1 indikator lainnya yaitu *Increase in number of privately financed infrastructure projects made bankable through the IIF's advisory services* belum ada progres capaian. Untuk proyek IIGF karena masih dihitung sebagai proyek baru sampai saat ini belum ada capaian untuk indikator PDO maupun *intermediate result*.

- **Kementerian Pertanian**

Proyek *Sustainable Agricultural Research and Technology (SMART-D)*

Capaian terakhir indikator PDO maupun *intermediate result* untuk proyek SMART-D telah menunjukkan progres yang cukup baik. Meskipun proyek akan berakhir pada tahun 2017, namun beberapa indikator PDO maupun *intermediate result* telah mendekati target akhir proyek. Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil indikator yang belum ada progres capaian, misalnya indikator PDO *Clients who have adopted an improved agricultural technology promoted by the project*, dan indikator *intermediate result*: i) *Accredited Experimental Stations*, ii) *accredited laboratories* dan iii) *Collaborative research or extension subprojects-completed (number)*.

Dalam hal pelaksanaan proyek terjadi perubahan jadwal pelaksanaan untuk komponen infrastruktur dan fasilitas sehingga perlu dilakukan penghitungan ulang terutama untuk bangunan, saat ini penghitungan ulang sedang dilakukan. Sementara itu, untuk komponen training jangka panjang masih dalam proses mendapatkan *letter of Acceptance (LoA)*. Komponen *post doctoral* yang sebelumnya sempat tertunda saat ini telah dapat berjalan dengan baik.

- **Kementerian Riset dan Teknologi**

Proyek *Research and Innovation in Science and Technology Project (RISET-Pro)*

Meskipun proyek ini tergolong baru, saat ini telah menunjukkan progres yang cukup baik dalam pencapaian target indikator PDO maupun *intermediate result*. Sebanyak 1 indikator PDO telah tercapai melampaui target yaitu *increased percent of Masters or PhD degree holders in LPNK and RISTEK* dari target sebanyak 20% capaian terakhir adalah 27%. Sementara itu untuk indikator *intermediate result* terdapat 2 target yang telah tercapai yaitu indikator yang terkait dengan pelaksanaan monitoring proyek dan pembangunan *database*.

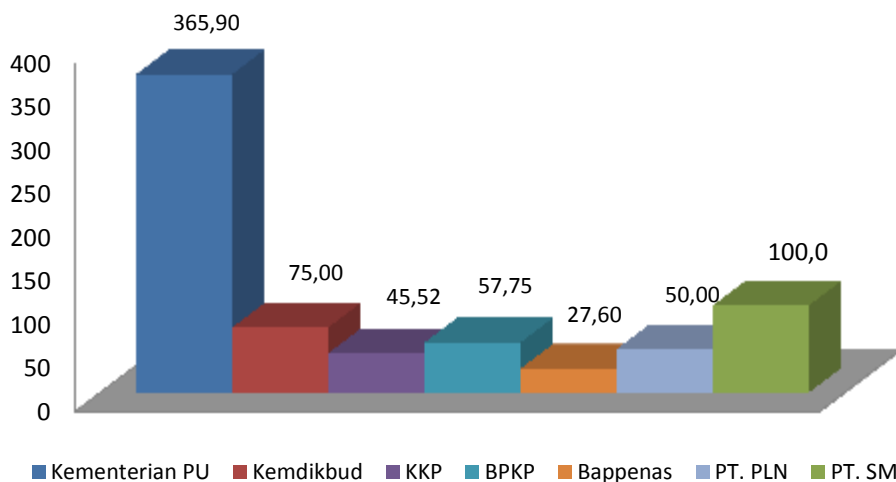
- **PT. Pertamina**

Proyek Geothermal Clean Energy Investment

Sejalan dengan masih belum adanya penyerapan dana pada proyek ini, pencapaian indikator *intermediate result* dan PDO juga belum menunjukkan progres. Progres pelaksanaan saat ini untuk Ulubelu unit 3 dan 4 proses evaluasi *bidding* dokumen yang hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan dari *lender*, dokumen yang disampaikan kepada *lender* tersebut merupakan revisi ke-3. Jika persetujuan (NOL) dari *lender* tidak keluar dalam waktu dekat maka kemungkinan akan terjadi *retender* dan menyebabkan keterlambatan proyek hingga 6 bulan dari jadwal semula. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut akan segera dilakukan koordinasi intensif dengan Bank Dunia agar persetujuan untuk dokumen tersebut dapat segera diterbitkan.

ADB

Pada Triwulan I TA 2014, terdapat 10 proyek yang dibiayai oleh *Asian Development Bank* dengan total nilai pinjaman sebesar USD 721,77 juta. Terdapat satu proyek yang baru efektif pada triwulan ini, yaitu COREMAP-CTI yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan jumlah pinjaman sebesar USD 45,52 juta. Berdasarkan instansi pelaksana, kesepuluh pinjaman proyek tersebut dikelola oleh 5 Kementerian/Lembaga dan 2 BUMN sebagaimana dapat dilihat dalam diagram berikut ini:



Gambar 2.4 Jumlah Pinjaman Proyek ADB Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Jumlah pinjaman terbesar dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan total nilai mencapai USD 365,9 juta yang terdiri dari 4 proyek, sedangkan nilai pinjaman paling rendah dikelola Bappenas yaitu sebanyak 1 proyek dengan nilai USD 27,6 juta.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman

Nilai pinjaman proyek ADB yang telah terserap secara kumulatif hingga bulan Maret 2014 adalah sebesar USD 243,14 juta. Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman ADB berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 2.4 Realisasi Penyerapan Pinjaman ADB Menurut Instansi Penanggung Jawab, Triwulan I TA 2014

(Dalam Juta USD)

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Jumlah Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh K/L		8	571,77	161,12	28,18	410,65	114,73	6,45	5,62
1	Kemen PU	4	365,90	138,76	37,92	227,14	72,83	6,45	8,86
2	Kemendikbud	1	75,00	5,59	7,45	69,41	24,01	0,00	0,00
3	Kemen KP	1	45,52	0,00	0,00	45,52	1,53	0,00	0,00
4	BPKP	1	57,75	1,91	3,30	55,84	11,93	0,00	0,00
5	Bappenas	1	27,60	14,86	53,83	12,74	4,43	0,00	0,00
Diteruspinjamkan (SLA)		2	150,00	82,02	54,68	67,98	25,25	0,00	0,00
6	PT PLN	1	50,00	10,89	21,79	39,11	19,85	0,00	0,00
7	PT SMI	1	100,00	71,13	71,13	28,87	5,40	0,00	0,00
Total		10	721,77	243,14	33,69	478,63	139,98	6,45	4,61

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Penyerapan TA 2014 hingga periode ini mencapai USD 6,45 juta atau sekitar 4,61% dari total target penyerapan sebesar USD 139,98 juta. Rendahnya penyerapan pada triwulan ini sebagian besar disebabkan oleh keterlambatan pencairan DIPA dan penyesuaian dengan penggunaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Dari empat proyek yang akan tutup di tahun 2014, dua proyek direncanakan akan mengajukan perpanjangan pinjaman yaitu *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)* dan *Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement*. Kedua proyek tersebut masing-masing menyerap sebesar 42,18% dan 21,79% dari total pinjaman, sedangkan untuk Proyek *Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)* baru menyerap sebesar 53,83%, direncanakan untuk diperpanjang jika memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diminta oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, dan ADB. Adapun *Indonesia Infrastructure Finance Facility (IIFF)* telah menyerap sebesar 71,13% dan direncanakan selesai tepat waktu.

1.2. Realisasi Pencapaian Output/Fisik

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

- Proyek *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)***

- Untuk proyek ICWRMIP telah menyelesaikan komponen program yang ada di Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan. Namun masih ada komponen kegiatan yang belum terpenuhi yaitu di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum/Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sebagai

upaya untuk penyelesaian kegiatan tersebut, telah diusulkan perpanjangan masa laku pinjaman selama 23 bulan hingga Mei 2016.

Proyek Regional Road Development (RRDP)

Proyek RRDP yang dibiayai bersama dengan *Islamic Development Bank* (IDB) saat ini sedang melaksanakan pekerjaan fisik di Provinsi Jawa Timur. Adapun paket pekerjaan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur saat ini masih menunggu persetujuan dari ADB.

Proyek Metropolitan Sanitation Management Health (MSMHP)

Untuk proyek MSMHP, saat ini sedang dilaksanakan percepatan pelaksanaan pekerjaan di Medan. Kendala pelaksanaan proyek ini adalah proses pengurusan AMDAL dan *wastewater treatment plan* ke Kementerian Lingkungan Hidup.

Proyek Urban Sanitation and Rural Infrastructure Support to PNPM-II (USRI)

Untuk proyek USRI, proses realokasi untuk penambahan kegiatan di 500 desa pada prinsipnya telah mendapatkan persetujuan untuk dapat dilaksanakan. Selain itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum akan menambah pembiayaan untuk proyek ini melalui dana APBN.

- **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

Proyek Strengthening Accountability Revitalization Project (STAR)

Proyek *Strengthening Accountability Revitalization Project* (STAR) merupakan proyek yang dikelola oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Catatan dari proyek ini mengenai akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dilaksanakan pada Triwulan II TA 2014. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari pihak universitas agar program studi yang akan diikutsertakan dalam proyek STAR dapat memenuhi syarat akreditasi minimal (Akreditasi A untuk S-1 dan Akreditasi B untuk S-2) dari BAN-PT. Sebagai upaya untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan *review mission* ke beberapa provinsi, diantaranya Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat dan Jambi. *Review* ini dilakukan untuk menjajaki kemungkinan untuk dapat bekerjasama dengan universitas di wilayah tersebut agar dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan STAR.

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Proyek Polytechnic Education Development Project (PEDP)

Selanjutnya untuk proyek *Polytechnic Education Development Project* (PEDP) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini sedang dilaksanakan revisi mekanisme transfer pendanaan ke politeknik swasta terkait Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2002 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2002 yang menyebabkan politeknik swasta tidak dapat melaksanakan pengadaan dan menerima transfer dana. Selain itu, diperlukan revisi untuk beberapa indikator *output 2* (akses mengikuti politeknik) sehubungan dengan adanya aturan di Undang Undang Perguruan Tinggi yang tidak lagi mengenal Pendidikan Vokasi Berkelanjutan (PVB) serta memisahkan akademi komunitas sebagai entitas yang berbeda dari politeknik.

- **PT. PLN**

Proyek Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement

Proyek *Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement* direncanakan akan diperpanjang untuk menyelesaikan pengadaan suplai dan distribusi listrik di DKI Jakarta,

Banten, dan Jawa Timur. Saat ini sedang dilakukan pembahasan dengan ADB dan AFD mengenai durasi perpanjangan untuk proyek ini.

- **PT. SMI**

Proyek IIFF Company

Proyek IIFF telah diperpanjang hingga Desember 2014 dan direncanakan dapat selesai tepat waktu.

- **Bappenas**

Proyek Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)

Proyek *Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)* direncanakan akan dilakukan perpanjangan pinjaman jika dapat merealisasikan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) proyek PPP untuk dapat terkontrak pada triwulan II 2014.

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Pada Triwulan I TA 2014, terdapat 3 proyek yang menunjukkan angka PV \leq -30 atau masuk dalam kategori *serious delay*. Keempat proyek tersebut juga merupakan proyek dengan kategori *serious delay* pada Triwulan III dan IV TA 2013. Proyek tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan perbandingan status PV pada Triwulan IV TA 2013.

Tabel 2.5 Pinjaman ADB dengan PV \leq -30 (Triwulan IV 2013 dan Triwulan I 2014)

No.	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	2013 TW IV	2014 TW I
Kementerian Pekerjaan Umum						
1	2500-INO	<i>Integrated Citarum Water Resources Management Investment Prog. (ICWRMIP-Project 1)</i>	03/06/2009	30/06/2014	-58,64	-63,50
2	2501-INO (SF)	<i>Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP-Project 1)</i>	03/06/2009	30/06/2014	-41,20	-46,06
Kementerian PPN/Bappenas						
3	2264-INO (SF)	<i>Infrastructure Reform Sector Dev. Program</i>	29/11/2006	30/08/2014	-37,63	-40,80
PT. PLN						
4	2619-INO	<i>Java Bali Electricity Distribution Performance</i>	25/04/2011	31/10/2014	-55,38	-61,56

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

Proyek *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)*

Untuk proyek ICWRMIP, komponen yang belum selesai dilaksanakan adalah komponen kegiatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup. Komponen kegiatan yang memerlukan pembiayaan terbesar adalah komponen kegiatan di Kementerian Pekerjaan Umum yang memerlukan pekerjaan tambahan untuk rehabilitasi Saluran Tarum Barat dan *Detail Engineering Design (DED)* untuk Bandung *Bulkwater Sources*. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan realokasi dan perpanjangan masa laku pinjaman selama 23 bulan sehingga akan berakhir di bulan Mei 2016. Saat ini proses pengusulan perpanjangan pinjaman masih dalam proses di Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

- **PT. PLN**

Proyek *Java Bali Electricity Distribution Performance*

Untuk proyek *Java Bali Electricity Distribution Performance*, terdapat perbedaan mengenai masa/waktu perpanjangan pinjaman. ADB dapat menyetujui perpanjangan hingga Desember

2015, sedangkan AFD dapat menyetujui perpanjangan hingga Juni 2015. Dengan adanya perbedaan waktu perpanjangan ini, dapat menjadi permasalahan karena mekanisme pembiayaan dalam pinjaman ini adalah *pari passu* atau 50:50 untuk setiap paket kontrak. Tujuan dari perpanjangan masa/waktu pinjaman ini dilakukan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan penyediaan suplai dan distribusi listrik di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Timur. Isu lain dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah mengenai pembatalan usulan *partial cancellation* sebesar USD 6 juta yang telah diusulkan melalui surat dari PT. PLN No 03141/101/Dirut/2014 Dengan adanya Perda dari Provinsi Banten mengenai perubahan mekanisme pengeboran galian, maka diperlukan penambahan biaya untuk proyek ini sehingga PT. PLN akan mengajukan penggunaan kembali untuk dana sebesar USD 6 juta tersebut. Untuk usulan tersebut, PT. PLN akan mengajukan surat resmi yang ditujukan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan agar dapat segera di proses pengajuannya ke pihak ADB.

- **Bappenas**

- Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)***

- Proyek IRSDP, dengan beberapa kondisi dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka direncanakan untuk dapat dilakukan perpanjangan masa laku pinjaman, karena akan berakhir pada Agustus 2014. Untuk perpanjangan masa laku pinjaman ini dapat dilakukan, jika pihak *executing agency* mengajukan secara resmi mengenai perpanjangan dengan catatan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) proyek PPP berhasil untuk kontrak pada Triwulan II TA 2014. Selain itu, perlu dilakukan *review* atas pencapaian *output* dari proyek ini sebelum mengusulkan perpanjangan pinjaman. Catatan lain yang perlu diperhatikan dari proyek ini adalah perlunya MoU antara IRSDP dengan pemerintah daerah yang akan mendapat dana PPP dari IRSDP. Sebagai contoh, dengan adanya pergantian walikota di Bandung menyebabkan pelaksanaan proyek *Bandung Waste to Energy* terhambat karena adanya perbedaan pendapat antara walikota terdahulu dengan walikota saat ini. Untuk hal ini dapat menjadi pembelajaran, bahwa dengan adanya ketidakjelasan mekanisme pembiayaan antara pemerintah dan swasta dapat menyebabkan iklim investasi yang tidak baik dalam upaya kerjasama antara Pemerintah dan Swasta.

Box 1: Kunjungan Lapangan

Loan ADB 1982-INO : Renewable Energy Development/RED

Executing Agency: PT. PLN

Tujuan kunjungan lapangan:

Kunjungan lapangan diikuti oleh perwakilan ADB *Indonesia Resident Mission* (IRM), konsultan PCR, dan konsultan dari PT PLN. Hasil dari kunjungan lapangan ini akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan *project completion report* (PCR).

Hasil kunjungan Lapangan:

1. PLTA Ndungga, Ende, NTT

- ❖ Pelaksanaan proyek RED untuk PLTA Ndungga adalah pembangunan *Mini Hydro Package* sebesar 2 MW. PLTA ini telah selesai dibangun dan telah dapat beroperasi. Pembangunan PLTA ini sempat mengalami keterlambatan yang disebabkan buruknya performa kontraktor (BRAIN-ZMEC CONSORTIUM) serta kurangnya pemahaman kontraktor mengenai kontrak yang telah disepakati antara kontraktor dan PT. PLN.
- ❖ Dalam kasus ini, digunakan pendekatan berbasis kinerja (*performance based approach*), yaitu melalui *engineering, procurement and construction* (EPC) *contract* dimana kontraktor bertanggung jawab atas proses *engineering* yang mencakup desain proyek serta estimasi biaya, seluruh proses pengadaan serta kegiatan-kegiatan konstruksi hingga selesainya kegiatan dan kegiatan *operation and maintenance*. Dalam hal kontraktor lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam kontrak EPC tersebut, maka kontraktor harus membayar ganti rugi kepada PT. PLN.



Gambar 1. PLTA Ndungga, Ende, NTT



Gambar 2. Gedung PLTA dan Pipa PLTA Ndungga

2. PLTP Ulumbu, Manggarai, NTT

- ❖ Di kawasan PLTP Ulumbu sendiri, terdapat 2 PLTP yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik di seluruh Flores sebesar 10 MW dimana 1 PLTP (5 MW) dibangun menggunakan pinjaman ADB, sedangkan 1 PLTP lain (5 MW) dibangun menggunakan pendanaan APBN dan saat ini telah beroperasi.
- ❖ Pelaksanaan pekerjaan proyek RED di Ulumbu merupakan pembangunan *Geothermal Power Plant* (PLTP) sebesar 5 MW. Meskipun proyek telah berakhir, namun hingga saat ini PLTP belum beroperasi dan masih dalam tahap instalasi karena :
 - Pembangunan sempat mengalami keterlambatan dikarenakan penutupan PT. PAL yang merupakan kontraktor pelaksana dalam proyek ini. Pengadaan untuk kontraktor baru memerlukan waktu yang relatif lama sehingga proyek sempat terhenti selama 2 tahun. (kontraktor baru yang saat ini terpilih adalah PT. Rekadaya ElektriKa)
 - Terdapat kesalahan spesifikasi barang oleh penyedia yaitu *Geothermal Development Associates* (GDA), sehingga saat ini masih menunggu penggantian barang sesuai yang dibutuhkan
 - Terdapat beberapa paket yang belum terselesaikan, antara lain paket laboratorium serta komponen 4 dan 5. Penyelesaian untuk seluruh pengerjaan proyek ini dijadwalkan pada Agustus 2014.



Gambar 3. Lokasi PLTP di Desa Ulumbu, Kab Manggarai, NTT

Rekomendasi:

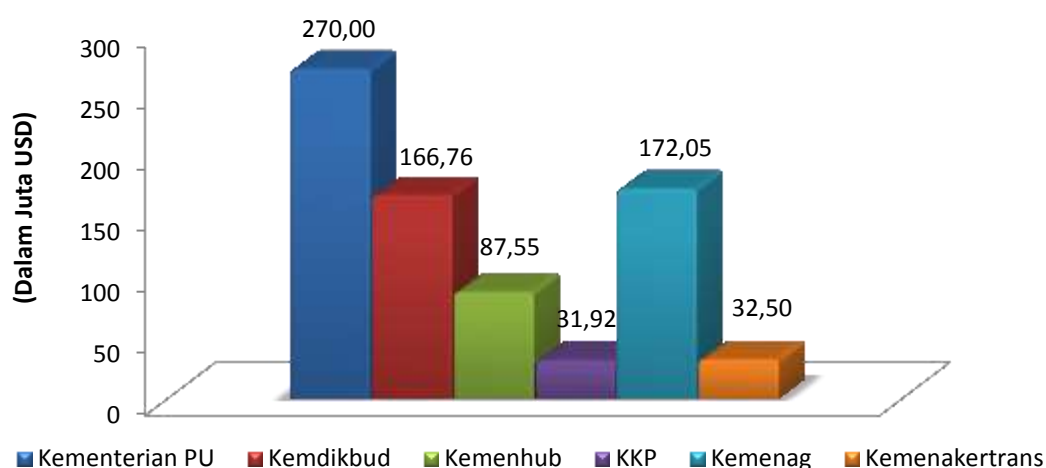
- Untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang, perlu pemahaman seluruh pihak terkait mengenai EPC *contract* serta hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menghambat pelaksanaan proyek.

Tindak Lanjut :

- Dilaksanakan *wrap up meeting* untuk membahas keseluruhan hasil kunjungan yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* yang akan ditandatangani bersama oleh pihak-pihak terkait. Selain itu, hasil dari kunjungan lapangan ini akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan PCR dari proyek RED.

IDB

Pada Triwulan I TA 2014, terdapat 14 pinjaman proyek IDB yang sedang berjalan (*on going*) dengan total nilai pinjaman sebesar USD 760,78 juta. Proyek-proyek tersebut dilaksanakan oleh 6 Kementerian/Lembaga. Sampai dengan Triwulan I TA 2014 kementerian/lembaga yang mengelola pinjaman dengan jumlah proyek dan nilai pinjaman terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum yaitu sebanyak 2 proyek dengan total nilai pinjaman mencapai USD 270 juta. Pelaksana proyek pinjaman IDB dengan nilai pinjaman paling kecil adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu sebanyak 1 proyek dengan nilai sebesar USD 31,92 juta.



Gambar 2.5 Jumlah Pinjaman Proyek IDB Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman

Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman IDB berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Penyerapan Pinjaman IDB Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab pada Triwulan I TA 2014

(Dalam Juta USD)

No	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
1	Kemen PU	2	270,00	35,28	13,07	234,72	89,32	0,00	0,00
2	Kemendikbud	5	166,76	4,11	2,46	162,65	73,89	0,36	0,48
3	Kemenhub	1	87,55	0,58	0,66	86,97	2,62	0,10	3,70
4	Kemenag	4	172,05	0,70	0,41	171,35	45,77	0,04	0,08
5	Kemen KP	1	31,92	8,83	27,65	23,09	6,53	0,56	8,55
6	Kemenakertrans	1	32,50	0,00	0,00	32,50	0,38	0,00	0,00
Total		14	760,78	49,49	6,51	711,29	218,51	1,05	0,48

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Penyerapan kumulatif sampai dengan bulan Maret tahun 2014 mencapai USD 49,49 juta atau 6,51% dari total nilai pinjaman proyek. Target penyerapan tahun ini adalah USD 218,51 juta, sehingga presentase penyerapan terhadap target TA 2014 adalah sebesar 0,48%.

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan I TA 2014 diidentifikasi sebanyak 9 proyek (terdiri dari 15 *Loan Agreement*) dengan $PV \leq -30$, yang artinya sangat lambat pelaksanaannya (*serious delay*). Permasalahan utama yang diidentifikasi sebagai penyebab keterlambatan adalah proses pengadaan barang dan jasa yang menghabiskan waktu lebih lama dari yang dijadwalkan. Bappenas terus mengupayakan langkah-langkah percepatan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta pihak pemberi pinjaman dan melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas pelaksana proyek (PMU) agar proyek-proyek yang mengalami keterlambatan tersebut tetap dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan jadwal dan target baru yang disepakati. Proyek-proyek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini, dan sebagai pembandingnya yaitu status $PV \leq -30$ pada triwulan sebelumnya.

Tabel 2.7 Perbandingan Nilai PV Proyek pinjaman IDB dengan Kinerja Penyerapan Rendah ($PV \leq -30$) pada Triwulan I 2014 dan Triwulan IV TA 2013

No.	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TW IV 2013	TW I 2014
1	IND-113 (<i>Installment Sale</i>)	<i>The Reconstruction of IAIN Ar Raniry</i>	13/12/2006	30/09/2014	-89,53	-92,69
2	IND-121 (<i>Istisna'a</i>)	<i>Development of Belawan and Sibolga Fishing Port</i>	15/07/2008	30/11/2014	-61,51	-61,87
3	IND-127 (<i>Installment Sale</i>)	<i>Upgrading & Development of The SIU of Sunan Gunung Djati</i>	06/07/2008	31/12/2014	-97,96	-89,92
4	IND-133 (<i>Istisna'a</i>)	<i>Development of Belawan Port Phase I</i>	01/05/2010	14/06/2014	-88,49	-94,36
5	IND-137 (<i>Istisna'a</i>)	<i>The Development of MERC and Two Univ. Hospitals</i>	26/02/2011	31/12/2014	-72,45	-78,86
	IND-138 (<i>Installment Sale</i>)	<i>The Development of MERC and Two Univ. Hospitals</i>	26/02/2011	31/12/2014	-74,00	-80,41
6	IND-140 (<i>Istisna'a</i>)	<i>The Quality Improvement of UNPAD</i>	24/07/2011	24/10/2015	-56,80	-62,52
	IND-141 (<i>Installment Sale</i>)	<i>The Quality Improvement of UNPAD</i>	24/07/2011	24/10/2015	-57,37	-63,17
7	IND-152 (<i>Loan</i>)	<i>Development & Quality Improvement of State University of Semarang</i>	28/11/2011	31/12/2014	-38,88	-46,85
	IND-153 (<i>Istisna'a</i>)	<i>Development & Quality Improvement of State University of Semarang</i>	28/11/2011	31/12/2014	-67,03	-74,69
	IND-154 (<i>Installment Sale</i>)	<i>Development & Quality Improvement of State University of Semarang</i>	28/11/2011	31/12/2014	-67,67	-75,64
8	IND-0155	<i>Rehabilitation, Reconstruction, & Upgrading of State University of Padang</i>	28/11/2011	28/11/2016	-40,60	-45,42
	IND-0156 (<i>Loan</i>)	<i>Rehabilitation, Reconstruction, & Upgrading of State University of Padang</i>	28/11/2011	28/11/2016	-41,82	-46,74
9	IND-157 (<i>Istisna'a</i>)	<i>Development of IAIN Sunan Ampel</i>	28/11/2011	28/11/2015	-50,69	-56,73
	IND-158	<i>Development of IAIN Sunan Ampel</i>	28/11/2011	28/11/2015	-52,29	-58,45

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

1.2. Realisasi Pencapaian Output/Fisik

Pada Triwulan I TA 2014 terdapat 14 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengan kinerja pelaksanaan sebagai berikut:

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Pada triwulan I TA 2014, proyek yang telah menyelesaikan *output* pekerjaan fisik adalah *The Development and Upgrading of State University of Jakarta (UNJ)*. Proyek tersebut telah

selesai pada 31 Desember 2013 untuk IND-129, dan pada 31 Desember 2014 untuk IND-130. Secara umum, target *output* telah tercapai, kecuali untuk komponen *curriculum development* yang telah dibatalkan akibat kurangnya peminat, dan hingga saat ini masih ada 11 orang yang masih dalam proses penyelesaian studi di luar negeri. Proyek ini telah membangun 3 gedung baru (1 gedung dibiayai dari dana GoI), dan fasilitas pendukungnya. Pinjaman IDB digunakan untuk membangun gedung baru seluas 29.500 m². Meskipun telah tutup pada triwulan sebelumnya untuk IND-129, PMU proyek ini masih memproses luncuran untuk penarikan pada November 2013, dan diharapkan akan selesai paling lambat Triwulan II TA 2014. Untuk progres IND-130 saat ini, masih dalam proses lelang (pengajuan PQ) untuk peralatan ICT, *Language Center* dan *Resource Center*. Beberapa proyek lain di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu *Development of Medical Education and Research Center in Two University Hospitals*, *Development and Quality Improvement of State University of Semarang*, dan *Rehabilitation & Reconstruction of State University of Padang*, beberapa *output* yang tercapai terkait pekerjaan konsultasi, baik terkontrak maupun diselesaikan pekerjaannya.

- **Kementerian Agama**

Di lingkungan Kementerian Agama, proyek *The Development of State Islamic University Sunan Gunung Djati Bandung* telah menyelesaikan *output/fisik* pembangunan gedung termasuk sarana dan prasarana penunjangnya dan saat ini sedang melaksanakan proses penandatanganan kontrak untuk pengadaan peralatan. Proyek *The Development and Quality Improvement of IAIN Sunan Ampel Surabaya*, *output* yang telah dicapai hingga saat ini baru hasil DEDC untuk pekerjaan fisik serta dokumen tender. Proyek *The Reconstruction of IAIN Ar Raniry* saat ini masih dalam proses pengadaan peralatan, adapun proyek *Support to Development of Islamic Higher Education* telah efektif pada pertengahan 2013 lalu dan baru saja selesai melaksanakan *startup workshop*.

- **Kementerian Perhubungan**

Untuk proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan, *The Development of Belawan Port Phase 1 output* yang telah dicapai yaitu *review design* dan dokumen tender untuk pekerjaan fisik/konstruksi, saat ini sedang mengajukan usulan *rescoping* pekerjaan melalui Kementerian Keuangan dan Bappenas. Sedangkan proyek *Development of Belawan and Sibolga Fishing Port* tidak menunjukkan banyak perubahan karena masih terkendala oleh proses penetapan pemenang kontrak di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

Terdapat 2 proyek yang berada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yaitu PNPM ICDD *phase III* dan *Regional Road Development*. Pada proyek PNPM ICDD *phase III* sedang dalam proses pelaksanaan kegiatan dan diharapkan selesai tepat waktu pada Desember 2014. Pada proyek *Regional Road Development* yang dibiayai bersama dengan ADB, pencapaian *output* belum menunjukkan perubahan dan kemajuan karena proses finalisasi dokumen tender beserta finalisasi pemaketan yang belum selesai.

- **Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Proyek *Revitalization of Vocational Training Center* yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi baru saja efektif pada Desember 2013 yang lalu dan diharapkan akan memulai *startup workshop* pada bulan Mei atau Juni 2014.

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Salah satu isu yang berhasil terselesaikan dalam triwulan ini adalah usulan *rescoping* paket pekerjaan untuk Proyek *Development of Belawan Port*.

- **Proyek *Development of Belawan Port***

Proyek ini mengalami perubahan paket pekerjaan fisik berupa perubahan komposisi pemaketan dan perubahan atas pemaketan dengan estimasi harga/biaya yang baru, dimana Paket 1 akan dibiayai oleh IDB, sedangkan Paket 2 dan 3 akan dibiayai oleh PT. Pelindo I. Pemerintah telah secara resmi mengusulkan perubahan lingkup pekerjaan atas proyek ini pada 11 Maret 2014 kepada IDB. Atas usulan ini, pihak IDB mengindikasikan persetujuan atas usulan tersebut, dan saat ini tengah dimintakan persetujuan Presiden IDB. IDB juga melakukan kunjungan misi untuk proyek ini, sekaligus mengadakan pertemuan teknis dengan pihak PMU untuk mempersiapkan dan mempercepat proses pengadaan ketika usulan *re-scoping* telah disetujui.

Proyek yang mengalami permasalahan serius dan keterlambatan yang paling signifikan hingga Triwulan I TA 2014 di antaranya adalah *The Reconstruction of IAIN Ar Raniry–Aceh* dan *Development of Belawan and Sibolga Fishing Port*.

- **Proyek *The Reconstruction of IAIN Ar Raniry–Aceh***

Proyek rekonstruksi *IAIN Ar Raniry* yang telah diperpanjang 4 kali saat ini masih berada dalam proses tender untuk pengadaan peralatan. Bappenas kembali menegaskan bahwa proyek ini harus diselesaikan tahun ini juga sesuai jadwal *closing date loan agreement* pada 30 September 2014.

- **Proyek *Development of Belawan and Sibolga Fishing Port***

Satu proyek yang masih mengalami permasalahan yang sama dengan triwulan sebelumnya adalah proyek *Development of Belawan and Sibolga Fishing Ports*. Proyek ini terkendala dalam penetapan pemenang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai *executing agency*, untuk kontraktor *civil work* di Pelabuhan Belawan. Atas isu yang telah berlangsung lebih dari 2 triwulan sejak tahun 2013 ini, misi IDB telah berkunjung ke Indonesia pada 21-25 April 2015 untuk melakukan klarifikasi. PMU kembali menyampaikan penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada pihak IDB dan pihak IDB akan *me-review* serta memberikan responnya.

Dua proyek lain yang mengalami keterlambatan serius pada triwulan lalu, yaitu *The Development of State Islamic University Sunan Gunung Djati Bandung* dan *The Development of Medical Education and Research Center at Two University Hospitals* sudah menunjukkan progres dari pencapaian triwulan sebelumnya.

- **Proyek *The Development of State Islamic University Sunan Gunung Djati Bandung***

Proyek pembangunan UIN Sunan Gunung Djati Bandung saat ini sudah diperpanjang hingga Desember 2014 dan saat ini sedang dalam proses *tender* dua paket pengadaan peralatan. IDB telah menyetujui hasil *tender* untuk paket 2, yang akan segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak dengan pihak *supplier*.

- **Proyek *The Development of Medical Education and Research Center at Two University Hospitals***

Adapun proyek *The Development of Medical Education and Research Center at Two University Hospitals* saat ini sedang melaksanakan proses pengurusan AMDAL untuk pembangunan *research center* di FK-UI. Bangunan cagar budaya yang berada di sekitar lokasi proyek tidak masuk dalam lokasi pengerjaan, sehingga tidak memerlukan izin khusus. Untuk pembangunan rumah sakit di UNS dan Universitas Andalas, proses pekerjaan fisik baru saja dimulai.

Permasalahan lain yang dialami oleh sebagian PMU di triwulan ini adalah menunggu pemrosesan *No Objection Letter* dari IDB dalam proses tender, khususnya untuk proyek-proyek di bidang pendidikan tinggi di Kemendikbud yaitu proyek *The Quality Improvement of UNPAD*, proyek *Rehabilitation, Reconstruction, and Upgrading of State University of Padang* serta proyek *Development and Quality Improvement of State University of Semarang* dan di Kementerian Agama yaitu proyek *Development of IAIN Sunan Ampel*. Keempat proyek tersebut mengalami kendala serupa terkait NOL untuk dokumen PQ. Pihak IDB telah mengkomunikasikan kepada PMU untuk memenuhi dokumen yang diperlukan bagi NOL, dan saat ini tinggal menunggu proses penerbitan NOL tersebut. Meskipun proses ini lebih lama dari seharusnya, namun keempat PMU telah menjaga komunikasi yang baik dengan IDB sehingga pemrosesan terus berjalan.

Box 2: Kunjungan Lapangan

Loan IDB IND-137&138 : The Development of Medical Education and Research Center and Two University Hospital Project

Executing Agency: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan kunjungan lapangan:

Proyek ini bertujuan untuk membangun dua rumah sakit universitas di UNS dan Unand, serta membangun pusat riset di Universitas Indonesia. Proyek ini memiliki total pendanaan sebesar USD 129,78 juta terdiri dari pinjaman *Islamic Development Bank* sebesar USD 63,97 juta, *co finance* dengan pinjaman *Saudi Fund for Development* sebesar USD 37,60 dan dana GoI sebesar USD 28,22 juta.

Hasil kunjungan Lapangan:

- Proyek *The Development of Medical Education and Research Center and Two University Hospital Project* (3 in1) telah melakukan kontrak untuk paket pekerjaan konsultan *Project Supervision* (PSC) dan Konsultan audit finansial pada akhir Desember 2014. Pekerjaan konsultansi PMC dan DEDC telah terkontrak sejak tahun 2012. Saat ini, pekerjaan konsultansi yang masih dalam proses pengadaan adalah *Equipment Consultant* (EQC). Untuk komponen pekerjaan fisik yang didanai secara *co-finance* oleh *Saudi Fund for Development* (SFD), pada triwulan I ini telah dilaksanakan *groundbreaking*, yaitu pembangunan rumah sakit pendidikan di UNS pada 13 Maret 2014, dan di Universitas Andalas pada 29 Maret 2014. Dalam kunjungan lapangan dilakukan penandatanganan kontrak dan peletakan batu pertama (*ground breaking*) pembangunan proyek rumah sakit universitas tersebut. Meskipun sempat mengalami keterlambatan di awal penyiapan proyek sejak *appraisal* tahun 2009, proyek ini mulai dapat berjalan dengan lancar hingga dimulainya paket pekerjaan fisik ini. Adapun untuk pembangunan *Research Center* di UI, masih dalam proses penyiapan *bidding document* dan ditargetkan untuk dapat kontrak pekerjaan fisik pada bulan Juni 2014.



Gambar 1. Kunjungan Lapangan di Universitas Andalas, Padang

Multilateral Lain

Jumlah proyek pinjaman dari lembaga multilateral lain pada Triwulan I Tahun 2014 adalah sebanyak 5 proyek yang terdiri dari 4 proyek pinjaman dari IFAD (*International Fund for Agricultural Development*) dan 1 proyek pinjaman dari *Saudi Fund*. Total nilai pinjaman dari lembaga-lembaga tersebut adalah sebesar ekuivalen USD 198,21 juta. Tidak ada proyek yang baru efektif ataupun berakhir pada triwulan ini.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1. Realisasi Penyerapan Pinjaman

Proyek pinjaman dari lembaga multilateral lain dilaksanakan oleh empat kementerian yaitu i) Kementerian Pertanian, ii) Kementerian Dalam Negeri, iii) Kementerian Kelautan dan Perikanan dan iv) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Realisasi pinjaman sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 mencapai ekuivalen USD 79,8 juta atau sebesar 40,26% dari total nilai pinjaman. Pada tahun ini ditargetkan penyerapan sebesar ekuivalen USD 17,98 juta, pada Triwulan I TA 2014 telah dilakukan realisasi sebesar ekuivalen USD 1,49 juta.

Berdasarkan lembaga pemberi pinjaman, nilai realisasi tersebut merupakan realisasi dari proyek-proyek pinjaman IFAD, karena proyek pinjaman dari *Saudi Fund* belum ada penyerapan hingga saat ini. Informasi mengenai penyerapan pinjaman dari Lembaga Multilateral lain menurut instansi penanggung jawab disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Penyerapan Pinjaman dari Lembaga Multilateral Lain Menurut Instansi Penanggung Jawab
Triwulan I TA 2014

(Ekuivalen Juta USD)

No	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
IFAD		4	162,21	79,80	49,11	82,41	17,98	1,49	8,33
1	Kementan	2	67,07	25,43	37,92	41,64	10,48	1,42	13,55
2	Kemendagri	1	63,20	51,93	82,15	11,27	1,82	0	0,00
3	Kemen KP	1	31,94	2,44	7,52	29,5	5,68	0,07	1,36
SAUDI FUND		1	36,00	0,00	0,00	36,00	0	0	0
4	Kemendikbud	1	36,00	0,00	0,00	36,00	0	0	0
Total		5	198,21	79,80	40,26	118,41	17,98	1,49	8,33

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Proyek pinjaman IFAD mendukung 3 sektor pembangunan yaitu i) sektor pangan dan pertanian, ii) sektor penanggulangan kemiskinan dan iii) sektor kelautan dan perikanan. Sementara itu proyek *Saudi Fund* mendukung sektor pendidikan yang dilaksanakan *co-financing* dengan IDB. Untuk proyek pinjaman Saudi Fund dibahas lebih rinci pada bagian pembahasan IDB.

Adapun proyek pinjaman IFAD pada sektor pangan dan pertanian adalah i) *Rural Empowerment and Agriculture Development (READ)* dan ii) *Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)*. Kedua proyek tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Penyerapan kumulatif untuk sektor ini telah mencapai ekuivalen USD 25,43 juta atau 37,92% dari total nilai pinjaman. Pada tahun 2014 ditargetkan realisasi dana sebesar USD 10,48 juta dan pada triwulan I telah terealisasi sebesar USD 1,42 juta. Kendala yang dihadapi

pada proyek READ diantaranya adanya pergantian KPA di Kabupaten Banggai sehingga mempengaruhi penetapan pejabat pengelola keuangan dan tim pelaksana READ. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut READ *National Support Unit* (NSU) telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai untuk segera menunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan dan Tim Pelaksana READ. Sementara itu pada proyek SOLID saldo pada rekening khusus tinggal Rp 130 juta, sementara belum ada pembayaran WA 18/DJPB/2013. Untuk itu proses WA diharapkan dapat dipercepat agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan. Selain itu adanya surat edaran dari KPK untuk menunda terlebih dahulu kegiatan bantuan sosial juga menyebabkan penyerapan dana proyek ini masih rendah.

Proyek pinjaman IFAD pada sektor penanggulangan kemiskinan yaitu *National Programme for Community Empowerment in Rural Area*, dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penyerapan kumulatif hingga triwulan ini mencapai ekuivalen USD 51,93 juta atau 82,15% dari nilai pinjaman. Pada tahun 2014 ditargetkan realisasi dana sebesar USD 1,82 juta, namun belum ada realisasi pada triwulan I karena administrasi pencairan dana masih terkendala oleh penyesuaian dengan sistem yang baru di Kementerian Keuangan.

Pada sektor kelautan dan perikanan terdapat proyek *Coastal Community Development Project* (CCDP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyerapan kumulatif untuk proyek ini baru mencapai USD 2,44 juta atau 7,52% dari nilai pinjaman. Pada tahun 2014 ditargetkan realisasi dana sebesar USD 5,68 juta dan telah terealisasi sebesar USD 0,07 juta pada Triwulan I TA 2014. Proyek CCDP dinilai sebagai proyek IFAD dengan kinerja penyerapan paling baik dan responsif, sehingga proyek-proyek lainnya diharapkan dapat belajar dari proyek ini.

Proyek pinjaman *Saudi Fund* adalah *Construction of Two University Hospitals in Sebelas Maret University and Andalas University Project*, dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai saat ini belum ada penyerapan dana untuk proyek tersebut.

1.2. Realisasi Pencapaian *Output*/Fisik

1.2.1 Proyek yang Dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga

Pada Triwulan I TA 2014 terdapat 5 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengan kinerja pelaksanaan sebagai berikut:

- **Kementerian Pertanian**

Pencapaian indikator *result framework/logframe* pada proyek READ dan SOLID pada Triwulan I secara umum cukup baik, hal ini dibuktikan dengan peningkatan capaian pada masing-masing indikatornya. Proyek READ terdiri dari 4 komponen yang masing-masingnya terdiri dari beberapa indikator capaian. Pada komponen 1 (*community empowerment*) sebagian besar indikator *output* telah tercapai melampaui target, dan beberapa indikator lainnya telah menunjukkan peningkatan capaian yang signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Begitu juga dengan indikator *output* pada komponen 2 (*livelihood improvement*), namun pada komponen 2 hanya satu indikator yang telah tercapai melampaui target. Pada komponen 3 dan komponen 4 hampir semua indikator belum menetapkan target akhir, namun beberapa diantaranya telah terdapat progress capaian yang nilainya cenderung meningkat dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. Proyek READ akan berakhir pada tahun 2014 sehingga pelaksana proyek perlu memastikan bahwa seluruh indikator dapat tercapai, selain itu pembelajaran terkait pencapaian target proyek juga sangat penting untuk didokumentasikan dengan baik.

Dalam hal pelaksanaan proyek terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan pekerjaan di lapangan tertunda, salah satunya di Kabupaten Toli-toli kegiatan tertunda karena harus menunggu narasumber dari PT. MARS (mitra) yang jumlahnya terbatas sedangkan banyak wilayah yang harus ditangani. Sebagai upaya tindak lanjut READ NSU telah mengirimkan surat kepada Manajer READ *District Management Unit* (DMU) Toli-toli untuk segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berkoordinasi dengan pihak mitra mengenai kendala tersebut.

Pada proyek SOLID terdapat 6 *output* yang capaiannya diukur dengan beberapa indikator, sampai dengan triwulan ini target akhir untuk semua indikator belum ditetapkan (masih tentatif). Beberapa indikator sudah menunjukkan progress capaian, pada triwulan ini nilai capaiannya cenderung meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil indikator pada masing-masing *output* yang belum menunjukkan progres. Dalam pelaksanaan kegiatan proyek SOLID menghadapi berbagai kesulitan sehingga dinilai perlu untuk melakukan simplifikasi baik dari sisi komponen kegiatan maupun teknis pelaksanaannya. Untuk menindaklanjuti hal ini *Mid Term Review* untuk proyek ini dipercepat 1 tahun dari jadwal semula agar dapat dilakukan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Penanggung jawab proyek diharapkan memastikan bahwa tujuan awal proyek tidak berubah dan peta perubahan proyek harus jelas serta didokumentasikan.

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Progres pencapaian *output* pada proyek CCDP masih cukup rendah karena proyek masih tergolong baru. Progres pencapaian *output* pada proyek CCDP masih cukup rendah karena proyek masih tergolong baru. Hanya ada progress capaian pada beberapa indikator di komponen 1.3 (*financially sustainable community enterprises created under the project*), 1.4 (*Community infrastructure implemented under the project supporting marine-based economic activities in project villages*) dan 2.1 (*Improved infrastructure and services supporting small scale fishing and marine activities established in the project districts*). Capaian tersebut adalah capaian pada periode sebelumnya, tidak ada tambahan capaian pada triwulan ini.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek CCDP triwulan ini adalah berkaitan dengan pembayaran pajak untuk konsultan, sementara dana *loan* tidak diperbolehkan untuk pembayaran pajak. Permasalahan tersebut sedang dikonsultasikan dengan KPPN. Selain itu terdapat isu mengenai usulan perubahan kelompok tabungan menjadi kelompok perempuan. Hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil misi kelompok tabungan tidak dapat berjalan dengan baik pada hampir seluruh wilayah proyek. Kelompok perempuan tersebut diperkirakan akan lebih efektif dibandingkan dengan kelompok tabungan.

- **Kementerian Dalam Negeri**

Kemajuan pencapaian indikator *logframe* pada proyek PNPM sangat signifikan dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya hampir pada seluruh

komponen *logframe*. Komponen yang progress capaiannya indikatornya masih rendah adalah komponen yang terkait dengan *gender mainstreaming* dan peningkatan kapasitas pemerintah lokal.

KREDITOR BILATERAL

Pada triwulan I TA 2014 jumlah proyek pinjaman dari kreditor bilateral adalah sebanyak 62 proyek, jumlah ini menurun sebanyak 2 proyek dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu sejumlah 64 proyek. Hal ini disebabkan karena pendekatan perhitungan proyek tidak berdasarkan jumlah *Loan Agreement* sehingga untuk beberapa *Loan Agreement* yang merupakan 1 proyek dihitung menjadi 1 proyek saja. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 38 proyek pinjaman dari JICA, 1 proyek pinjaman dari Australia, 3 proyek pinjaman dari Jerman, 7 proyek pinjaman Korea, 4 proyek pinjaman Perancis, 3 proyek pinjaman AFD, 4 proyek pinjaman RR Tiongkok dan 2 proyek pinjaman dari Spanyol, seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral

(ekuivalen juta USD)

No	Sumber Pinjaman	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
1	JICA	38	5.857,13	2.563,37	43,76	3.293,76	703,15	43,07	6,12
2	Australia	1	278,69	225,94	81,07	52,75	13,78	1,02	7,42
3	Jerman	3	86,29	32,89	38,12	53,40	29,06	0,44	1,51
4	Korea	7	353,36	53,44	15,12	299,93	37,16	0,00	0,00
5	Perancis	4	265,41	66,73	25,14	198,69	20,27	0,00	0,00
6	AFD	3	129,50	39,00	30,12	90,50	34,50	0,00	0,00
7	RR Tiongkok	4	399,71	119,56	29,91	280,15	96,21	37,18	38,64
8	Spanyol	2	54,37	28,78	52,93	25,59	31,87	7,46	23,42
Total		62	7.424,45	3.129,71	42,15	4.294,76	965,98	89,17	9,23

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Penyerapan kumulatif hingga triwulan ini mencapai 42,15% (ekuivalen USD 3.129,71 juta) dari total nilai pinjaman sebesar ekuivalen USD 7.424,45 juta, sedangkan realisasi pinjaman pada triwulan ini mencapai 9,23% dari target atau senilai ekuivalen USD 89,17 juta. Menurut instansi penanggung jawab, sebanyak 46 proyek pinjaman dari kreditor bilateral dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, sebanyak 14 proyek ditingkatkan (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*) dan sebanyak 2 proyek yang diterushibahkan. Nilai total pinjaman yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebesar ekuivalen USD 4.508,62 juta dengan penyerapan kumulatif hingga triwulan ini mencapai ekuivalen USD 2.064,26 juta (45,78%), sedangkan nilai pinjaman yang diterushibahkan mencapai ekuivalen USD 2.426,14 juta dengan penyerapan kumulatif hingga triwulan ini sebesar ekuivalen USD 957,91 juta (39,48%) dan nilai pinjaman yang diterushibahkan mencapai ekuivalen USD 489,69 juta dengan penyerapan kumulatif hingga triwulan ini sebesar ekuivalen USD 107,53 juta (21,96%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut ini:

Tabel 2.10 Rekapitulasi Pinjaman Luar Negeri Bilateral Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Nilai	%		Target	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh K/L		46	4.508,62	2.064,26	45,78	2.444,37	685,89	80,54	11,74
1	Kemenuh	6	921,80	150,74	16,35	771,06	231,08	11,28	4,88
2	Kemendikbud	4	301,22	100,63	33,41	200,59	75,69	5,47	7,22
3	Kemenkes	3	76,89	66,81	86,88	10,09	1,11	0,00	0,00
4	Kemen KP	1	30,00	8,56	28,53	21,44	11,68	0,00	0,00
5	Kemen PU	24	2.805,85	1.581,04	56,35	1.224,82	302,69	62,39	20,61
6	Bappenas	1	95,13	65,26	68,60	29,87	6,35	1,40	22,03
7	Kemenkominfo	1	28,50	11,56	40,58	16,93	3,67	0,00	0,00
8	Kepolisian RI	2	75,00	0,00	0,00	75,00	13,27	0,00	0,00
9	Badan Otorita Batam	1	50,00	0,00	0,00	50,00	1,50	0,00	0,00
10	BMKG	1	41,65	20,26	48,65	21,39	20,26	0,00	0,00
11	LIPI	1	20,20	12,62	62,45	7,59	6,57	0,00	0,00
12	BIG	1	62,39	46,79	74,99	15,60	12,03	0,00	0,00
Diteruspinjamkan (SLA)		14	2.426,14	957,91	39,48	1.468,24	99,46	8,63	8,68
13	PT. PLN	13	2.162,15	954,76	44,16	1.207,40	99,46	8,63	8,68
14	PT. Pertamina	1	264,00	3,15	1,19	260,84	0,00	0,00	0,00
Diterushibahkan		2	489,69	107,53	21,96	382,15	180,63	0,00	0,00
15	Pemda DKI	2	489,69	107,53	21,96	382,15	180,63	0,00	0,00
TOTAL		62	7.424,45	3.129,71	42,15	4.294,77	965,98	89,17	9,23

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kinerja pelaksanaan proyek-proyek pinjaman dari lembaga bilateral berdasarkan lembaga pemberi pinjaman. Pembahasan terdiri dari gambaran umum pinjaman, kinerja pelaksanaan permasalahan dan tindak lanjut serta hasil kunjungan lapangan.

JICA

Selama Triwulan I TA 2014, jumlah pinjaman JICA yang efektif dan dipantau pelaksanaannya berjumlah 38 proyek dengan nilai pinjaman JPY 598.276,18 juta. Jumlah tersebut menurun dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya karena terdapat 2 (dua) proyek yang telah selesai dilaksanakan. Penarikan pinjaman secara kumulatif sampai dengan akhir Triwulan I TA 2014 sebesar JPY 261.835,46 juta atau 43,76% dari total pinjaman, sehingga dana pinjaman yang belum ditarik senilai JPY 336.440,72 juta atau 56,24% dari total pinjaman.

Dari 38 pinjaman proyek yang bersumber dari JICA, sebanyak 24 pinjaman proyek dilaksanakan langsung oleh Kementerian/Lembaga, 2 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penerushibahan (*on-granting*) dan 12 pinjaman proyek dilaksanakan oleh BUMN melalui penerusanpinjaman atau *subsidiary loan agreement* (SLA).

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman

Dari 38 proyek yang dipantau pada Triwulan I TA 2014, hanya 19 proyek (50%) yang melakukan penyerapan. Jumlah penarikan pinjaman pada Triwulan I TA 2014 sebesar JPY 4.399,02 juta atau 6,12% dari target penyerapan TA 2014. Pada Triwulan I TA 2014 penyerapan pinjaman masih rendah karena sebagian besar proyek belum melakukan penarikan pinjaman pada Triwulan I TA 2014. Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman proyek yang dibiayai JICA status pada Triwulan I TA 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11 Pinjaman Proyek yang Dibiayai JICA sampai dengan Triwulan I TA 2014

(Dalam Juta JPY)

No	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai pinjaman	Penarikan kumulatif		Pinjaman belum ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
Dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga									
1	KemenPU	15	191.596,00	119.589,97	62,42	72.006,04	14.867,70	1.708,82	11,49
2	Kemendikbud	3	28.100,18	10.233,51	36,42	17.866,67	7.052,97	513,31	7,28
3	Kemenhub	3	71.905,00	13.665,18	19,00	58.239,82	21.371,13	1152,29	5,39
4	Kemkominfo	1	2.911,00	1.181,24	40,58	1.729,76	374,81	0,00	0,00
5	LPNK	2	16.090,00	11.444,97	71,13	4.645,03	1.877,63	143,01	22,03
Diterushibahkan (On-Granting)									
6	Pemda DKI Jakarta	2	50.019,00	10.983,80	21,96	39.035,20	18.450,28	0,00	0,00
Diteruspinjamkan (SLA)									
7	BUMN	12	237.655,00	94.736,80	39,86	142.918,20	7.829,25	881,59	11,26
Total		38	598.276,18	261.835,46	43,76	336.440,72	71.823,77	4.399,02	6,12

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Penarikan pinjaman pada Triwulan I TA 2014 lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan I TA 2013.

Tabel 2.12 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Jumlah Proyek	Jumlah Penarikan Triwulan I
Triwulan I/2013	38	7.495,53
Triwulan I/2014	38	4.399,02

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Pada Triwulan I TA 2014, masalah yang cukup menonjol dan menghambat pelaksanaan proyek adalah masalah DIPA dan pengadaan lahan.

Masalah terkait DIPA yang muncul adalah belum tercantumnya rencana penarikan dana pinjaman dalam DIPA. Jumlah alokasi anggaran di DIPA tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan rencana kerja pelaksana teknis proyek. Hal ini menunjukkan kurang cermatan/lemahnya koordinasi dalam proses penentuan anggaran dan masih rendahnya kapasitas perencana. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah dengan lebih mengoptimalkan fungsi jasa konsultan perencana yang menjadi pendamping *project management unit*.

Masalah **administrasi/pengesahan DIPA** menjadi masalah yang cukup serius di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Perhubungan.

Proyek IP-523 *Komering Irrigation Project Stage Phase II* merupakan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum yang mengalami masalah pada pagu DIPA. Pelaksana proyek perlu melakukan revisi DIPA untuk menyelesaikan Paket ICB 5, 6 dan 7. Pada proyek ini rencana penyerapan per paket dibuat sama jumlahnya, hal ini menunjukkan kurang matangnya perencanaan.

Masalah pengesahan DIPA di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terjadi pada proyek IP-541 *Hasanuddin University Engineering Faculty Development Project*. Pelaksana proyek belum mengalokasikan anggaran untuk Paket 2 *fellowship* pada DIPA 2014 sehingga perlu dilakukan revisi DIPA.

Permasalahan DIPA di Kementerian Perhubungan terjadi pada proyek IP-521 *The Urgent Rehab. Project of TJ. Priok Port*. Proyek mengalami kekurangan pada DIPA 2014 sebesar Rp 199 miliar. Pelaksana proyek telah mengajukan alokasi untuk menyelesaikan proyek ini.

Masalah **pengadaan lahan** terjadi pada proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pada Triwulan I TA 2014, masalah pengadaan lahan di Kementerian Pekerjaan Umum terjadi pada proyek IP-522 *Lower Solo River Improvement Project II*, IP-523 *Komering Irrigation Project Stage Phase II*, IP-551 *Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities*, IP-558 *Regional Solid Waste Management for Mamminasata*. Masalah terjadi karena terdapat lahan yang belum dibebaskan dan diantaranya belum dialokasikan anggaran pembebasannya oleh pemerintah daerah (APBD).

1.2 Realisasi Pencapaian Output/Fisik

1.2.1 Proyek yang Dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga

Pada Triwulan I TA 2014 terdapat 24 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengan kinerja pelaksanaan sebagai berikut:

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

Sebanyak 15 pinjaman proyek yang bersumber dari JICA dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan total nilai pinjaman sebesar JPY 191,6 miliar, meliputi 9 pinjaman proyek dikelola oleh Ditjen Sumber Daya Air, 3 pinjaman proyek dikelola oleh Ditjen Bina Marga dan 3 pinjaman proyek dikelola Ditjen Cipta Karya. Pada Triwulan I TA 2014, penarikan pinjaman di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar JPY 1.708,82 juta. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan penarikan Triwulan I TA 2013. Proyek IP-543 *Regional Infrastructure For Sosial Economic (RISE) Project Development* melakukan penyerapan pinjaman terbesar di Kementerian Pekerjaan Umum yaitu sebesar JPY 2.003,18 juta. Perbandingan jumlah penyerapan Triwulan I TA 2013 dengan Triwulan I TA 2014 di Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan
Triwulan I/2013	100.537,45	4.057,47
Triwulan I/2014	119.589,97	1.708,82

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Proyek IP-543 *Regional Infrastructure For Sosial Economic (RISE) Project Development* merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya. Proyek akan berakhir

pada tanggal 26 Juli 2014. Pekerjaan fisik proyek telah selesai dan saat ini sedang melakukan proses pembayaran untuk jasa konsultansi. Anggaran untuk pembayaran sudah dialokasikan dan direncanakan akan terserap sebelum tanggal 26 Juli 2014.

Proyek IP-558 *Regional Solid Waste Management For Mamminasata* dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya. Hingga Triwulan I TA 2014 belum terdapat progres pada pelaksanaan fisik proyek. Lambatnya pelaksanaan proyek disebabkan oleh belum disepakatinya usulan Pemkab Gowa mengenai *transfer station* di Kota Makassar dan rencana Bupati Gowa memindahkan lokasi TPA Regional.

Proyek IP-522 *Lower Solo River Improvement Project II* merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air. Permasalahan lahan yang dihadapi belum selesai hingga Triwulan I TA 2014. Pelaksana proyek perlu memberi penjelasan yang lebih masif kepada Pemerintah Kabupaten dan masyarakat mengenai dampak negatif apabila proyek ini tidak diselesaikan. Upaya ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengosongan lahan milik negara yang akan menjadi lokasi proyek.

Pencapaian fisik atau *output* 15 (lima belas) pinjaman proyek pada TA 2014 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat dilihat pada Lampiran Laporan.

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 3 pinjaman proyek yang bersumber dari JICA. Pinjaman tersebut dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yaitu IP-541 *Hasanuddin University Engineering Faculty Development*, IP-549 *Development of World Class University At University of Indonesia*, dan IP-553 *Development of Bandung Institute of Technology*.

Pada Triwulan I TA 2014, proyek IP-553 *Development of Bandung Institute of Technology* melakukan penarikan pinjaman terbesar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebesar JPY 349,61 juta.

Penyerapan pinjaman JICA Triwulan I TA 2014 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar JPY 513,31 juta. Jumlah ini hampir 3 kali lipat jumlah penyerapan Triwulan I TA 2013. Perbandingan jumlah penyerapan Triwulan I TA 2013 dengan Triwulan I TA 2014 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan
Triwulan I/2013	7.493,66	171,71
Triwulan I/2014	10.233,51	513,31

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Pada Triwulan I TA 2014 terdapat perkembangan fisik pada proyek IP-541 *Hasanuddin University Engineering Faculty Development*. Paket 1 pembangunan gedung dan pembelian peralatan untuk Gedung Arsitektur dan Sipil sudah dipakai untuk perkuliahan. Paket 4 pembangunan gedung untuk *workshop*, *power house* dan infrastruktur telah selesai dilaksanakan (100%). Akan tetapi, proyek mengalami permasalahan DIPA dalam pelaksanaan Paket 2 pembangunan gedung teknik mesin, gedung elektro, serta pekerjaan eksternal dan lansekap.

Proyek IP-533 *Development of Bandung Institute of Technology* telah mendapatkan IMB untuk konstruksi bangunan pada Triwulan I 2014. Selain itu, pelaksana proyek telah menyelesaikan 3 paket kontrak yaitu Paket 2 renovasi gedung, Paket 9 Pengadaan Buku, dan *Academic Advisor* (AA).

- **Kementerian Perhubungan**

Sebanyak 3 pinjaman proyek dengan total nilai pinjaman sebesar JPY 71.905,00 juta dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Pada Triwulan I 2014, hanya proyek IP-521 *The Urgent Rehab. Project of Tj. Priok Port* yang melakukan penarikan pinjaman yaitu sebesar JPY 1.152,29 juta. Jumlah ini kurang lebih 2 kali dari jumlah penyerapan Triwulan I TA 2013. Perbandingan jumlah penyerapan Triwulan I TA 2013 dengan Triwulan I TA 2014 di Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan
Triwulan I/2013	9.248,98	579,79
Triwulan I/2014	13.665,18	1.152,29

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Proyek IP-548 *Double Tracking on Java South Line Project* masih menunggu *concurrence* dari JICA untuk jasa supervisi. Negosiasi kontrak untuk paket *civil work* dan *track work* belum selesai sampai dengan akhir Triwulan I TA 2014.

Pencapaian fisik atau *output* 3 (tiga) pinjaman proyek pada TA 2014 yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada Lampiran Laporan.

- **Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Terdapat 1 (satu) pinjaman proyek dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu IP-542 *ICT Utilization for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province*. Dari 6 indikator kinerja *output*, sebanyak 4 indikator kinerja *output* sudah selesai pada tahun 2012 dan 2 indikator *output* masih dalam proses penyelesaian pekerjaan fisik. Sama halnya pada Triwulan I TA 2013, pada Triwulan I TA 2014, proyek IP-542 *ICT Utilization for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province* tidak melakukan penarikan pinjaman.

Tabel 2.16 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan
Triwulan I/2013	1.083,22	0,00
Triwulan I/2014	1.181,24	0,00

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

- **Badan Informasi Geospasial**

Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan 1 (satu) pinjaman proyek yaitu IP-544 *National Geo-Spatial Data Infrastructure Development Project*. Proyek menargetkan akan menyelesaikan semua paket pada Tahun Anggaran 2014. Akan tetapi, pada Triwulan I TA 2013 proyek IP-544 sama sekali tidak melakukan penarikan pinjaman.

Tabel 2.17 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan
Triwulan I/2013	4.169,43	108,76
Triwulan I/2014	4.779,34	0,00

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

- **Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**

Bappenas melaksanakan 1 (satu) pinjaman proyek yaitu IP-535 *Professional Human Resources Development Project (PHRDP) – III*. Proyek telah melakukan penyerapan pada Triwulan I TA 2014 yaitu sebesar JPY 143,01 juta atau lebih besar daripada penarikan pinjaman pada Triwulan I TA 2013. Perbandingan jumlah penyerapan Triwulan I TA 2013 dengan Triwulan I TA 2014 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan
Triwulan I/2013	6.062,37	115,54
Triwulan I/2014	6.665,63	143,01

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

1.2.2 Kinerja Pinjaman Proyek yang Diterushibahkan (*On-Granting*)

- **Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Pada Triwulan I 2014, terdapat 2 (dua) pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu IP-536 *E/S Jakarta Mass Rapid Transit System* dan IP-554 *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project*. Sama halnya pada Triwulan I TA 2013, pada Triwulan I TA 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan penarikan pinjaman.

Tabel 2.19 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan
Triwulan I/2013	1.107,52	0,00
Triwulan I/2014	10.983,80	0,00

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Proyek IP-554 *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project* sudah memulai pekerjaan konstruksi. Salah satu masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan fisik proyek adalah belum adanya rekomendasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga sehingga pekerjaan fisik proyek (pembongkaran stadion Lebak Bulus) belum dapat dilaksanakan.

1.2.3 Kinerja Pinjaman Proyek yang Diteruspinjamkan (SLA)

Pada Triwulan I TA 2014 terdapat 12 pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh BUMN melalui penerusanpinjaman (SLA) dengan nilai pinjaman JPY 237.655,00 juta. Pinjaman proyek tersebut dilaksanakan oleh PT. PLN sebanyak 11 pinjaman proyek dan PT. Pertamina sebanyak 1 (satu) pinjaman proyek.

- **PT. PLN**

Terdapat 11 (sebelas) pinjaman proyek yang dilaksanakan oleh PT. PLN dengan total pinjaman sebesar JPY 210,69 miliar. Sebagian besar proyek belum melakukan penyerapan pinjaman pada Triwulan I TA 2014. Jumlah penyerapan selama Triwulan I TA 2014 adalah JPY 881,59 juta atau kurang lebih sepertiga jumlah penyerapan Triwulan I TA 2013. Proyek IP-538 *Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction* melakukan penarikan pinjaman terbesar di PT. PLN yaitu sebesar JPY 3.370,26.

Tabel 2.20 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan
Triwulan I/2013	87.189,11	2.443,79
Triwulan I/2014	94.414,65	881,59

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Proyek IP-532 *Asahan 3 Hydro Electric Power Plant* merupakan salah satu proyek yang belum melakukan penyerapan pada Triwulan I TA 2014. Proyek terkendala masalah ijin pinjam kawasan hutan yang belum terbit. PT. PLN sedang menyiapkan dokumen tata batas kawasan hutan dan inventarisasi sebagai persyaratan terbitnya Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Pelaksana proyek proyek IP-537 *PLN Operation Improvement System Project for Supporting Generation Facilities* mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan proyek menggunakan dana pinjaman tetapi dengan menggunakan anggaran PLN. Pelaksana proyek perlu menyampaikan hal ini ke Kementerian Keuangan.

Pencapaian fisik atau *output* 11 (sebelas) pinjaman proyek pada TA 2014 yang dilaksanakan oleh PT. PLN dapat dilihat pada Lampiran Laporan.

- **Pinjaman Proyek yang Diteruspinjamkan kepada PT. Pertamina**

PT. Pertamina melaksanakan 1 pinjaman proyek yaitu IP-557 *Lumut Balai Geothermal Power Plant*. Sampai dengan Triwulan I TA 2014, kegiatan pengadaan masih sesuai dengan target. Tahapan proses lelang sampai dengan bulan Maret 2014 adalah Evaluasi Teknik atas Dokumen Penawaran. Seperti halnya pada Triwulan I TA 2013, proyek IP-557 *Lumut Balai Geothermal Power Plant* tidak melakukan penarikan pinjaman pada Triwulan I TA 2014.

Tabel 2.21 Perbandingan Penyerapan Pinjaman Triwulan I Tahun Anggaran 2013 dan 2014

(Dalam Juta JPY)

Triwulan/Tahun Anggaran	Penarikan Kumulatif	Penarikan Triwulan
Triwulan I/2013	200,02	0,00
Triwulan I/2014	322,15	0,00

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

1.3 Progress Variant Proyek Pinjaman JICA \leq -30

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan I TA 2014, terdapat 12 proyek pinjaman JICA yang berada pada kategori *at risk* ($PV \leq -30$). Proyek pinjaman JICA yang masuk kategori *at risk* tersebut dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 2.22 halaman 46):

Tabel 2.22 Progress Variant Proyek Pinjaman JICA

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TA 2013			TA 2014
					TW II	TW III	TW IV	TW I
1	IP-508	<i>Railway Electrification and D.D. Tracking Project I</i>	13/12/2001	11/09/2016	-67,87	-69,58	-68,35	-70,02
2	IP-548	<i>Double Track Cirebon-Kroya Phase I & III</i>	25/07/2008	25/07/2016	-58,20	-61,35	-64,50	-67,58
3	IP-532	<i>Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III</i>	15/05/2007	15/05/2017	-53,66	-56,41	-59,04	-61,77
4	IP-537	<i>PLN Operation Improvement System for Support</i>	15/05/2008	26/01/2018	-44,17	-46,97	-49,76	-52,50
5	IP-539	<i>North-West Sumatera Inter-Connector Transmission</i>	26/01/2009	26/01/2019	-51,10	-49,41	-49,88	-48,84
6	IP-531	<i>Tanjung Priok Acces Road Construction Proj.II</i>	01/04/2006	30/06/2013	-70,68	-48,50	-45,53	-47,13
7	IP-542	<i>ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement</i>	29/03/2007	29/05/2015	-39,39	-42,47	-42,19	-45,21
8	IP-552	<i>Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose</i>	28/07/2009	28/07/2015	-41,61	-41,81	-38,90	-41,39
9	IP-553	<i>Development of Bandung Institute of Technology</i>	28/07/2009	30/09/2018	-37,65	-39,92	-42,05	-38,56
10	IP-558	<i>Regional Solid Waste Management for Maminasata</i>	01/09/2010	01/09/2018	-30,47	-33,11	-36,06	-39,14
11	IP-529	<i>Tanjung Priok Acces Road Construction Proj. I</i>	28/07/2005	28/01/2015	-39,29	-39,98	-36,41	-36,95
12	IP-551	<i>Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities</i>	28/07/2009	28/07/2017	-38,10	-39,37	-34,93	-34,40

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Catatan: Proyek IP-552 tercatat termasuk at risk dengan PV: -41,39. Hal ini disebabkan pelaksana proyek tidak akan memanfaatkan seluruh dana pinjaman sebagai konsekuensi perubahan desain dan penggunaan material.

1.4 Pinjaman Proyek JICA yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014

Terdapat 5 proyek pinjaman JICA yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2014. Informasi tentang masa berakhir dan penyerapan dana pinjaman proyek JICA yang berakhir pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23 Daftar Pinjaman Proyek JICA yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014 dan Status Dana Pinjaman yang Belum Ditarik

(Dalam Juta JPY)

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Pinjaman Belum Ditarik	
					Nilai	%
1	IP-524	<i>Urgent Disaster Reduction Project for Mt. Merapi</i>	28/07/2005	28/07/2014	21,98	3,62
2	IP-543	<i>Regional Infrastructure for Social & Economic Dev</i>	29/07/2007	29/07/2014	3.132,64	13,32
3	IP-536	<i>E/S Jaskarta Mass Rapid Transit System</i>	22/03/2007	31/12/2014	604,98	32,37
4	IP-515	<i>Tanjung Priok Gas Fired PP Ext.</i>	24/09/2004	24/03/2014	1.438,53	2,45
5	IP-525	<i>Ulubelu Geothermal Power Plant</i>	28/12/2005	30/06/2014	4.208,00	20,74

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Australia

Satu-satunya pinjaman dari Pemerintah Australia yang efektif dan dipantau pelaksanaannya sampai dengan Triwulan I TA 2014 adalah proyek EINRIP (*Eastern Indonesia National Road Improvement Project*) dengan nilai pinjaman sebesar AUD 300,00 juta (ekuivalen USD 278,69 juta). Proyek EINRIP bertujuan untuk meningkatkan dan merehabilitasi jalan dan jembatan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan 20 paket kegiatan tersebar di 9 provinsi, lembaga pelaksana adalah Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman

Proyek EINRIP dalam TA 2014 target penyerapan sebesar AUD 14,83 juta (ekuivalen USD 13,23 juta) dan realisasi penyerapan pada Triwulan I TA 2014 sebesar AUD 1,10 juta (ekuivalen USD 0,98 juta) atau 7,42% dari target Tahun Anggaran 2014. Penyerapan kumulatif pinjaman Australia hingga bulan Maret tahun 2014 mencapai AUD 243,22 juta (81,07%), sehingga sisa dana pinjaman yang belum ditarik sebesar AUD 565,78 juta.

Sampai dengan Triwulan I TA 2014, proyek EINRIP memiliki PV sebesar -18,93 yang berarti realisasi penyerapan pinjaman yang bersangkutan lebih lambat dari jadwal yang direncanakan sehingga perlu percepatan pelaksanaan.

1.2 Realisasi Pencapaian *Output*/Fisik

Pelaksanaan pekerjaan EINRIP hingga tahun keenam pelaksanaan telah menyelesaikan 2 dari 3 target indikator kinerja *output*, antara lain penyiapan proyek EINRIP (identifikasi, FS, *Screening*, *Design*, *Document*) dan pengadaan rangka baja AWP 1. Progres pelaksanaan indikator kinerja *output* lainnya, yaitu “pelaksanaan konstruksi EINRIP” masih dalam tahap penyelesaian pekerjaan dengan target selesai pekerjaan kegiatan berbeda-beda, namun tetap dalam kurun waktu penyelesaian pekerjaan.

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Secara umum, terdapat isu yang masih belum terselesaikan sejak kegiatan pemantauan proyek EINRIP triwulan sebelumnya, diantaranya:

- **Permasalahan pengadaan barang dan jasa** yang disebabkan oleh adanya desain ulang atau penyesuaian pada beberapa paket proyek. Pada paket ENB-03 terdapat pekerjaan tambahan yang belum diakomodir dalam kontrak. Pekerjaan ini sedang diproses sehingga perlu waktu perpanjangan penyelesaian pekerjaan. Paket ESS-01, ESS-03, dan ESS-04 juga mengalami penambahan pekerjaan yang belum diakomodir dalam kontrak. Pekerjaan tambahan sedang diproses termasuk perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- **Permasalahan pembebasan lahan** yang terdapat pada paket kegiatan EINRIP cukup variatif. Paket ESS-05 dan ESS-06 mengalami masalah pembebasan lahan dan desain jalan diubah sehingga perpanjangan waktu penyelesaian ditambah.
- Pemerintah Australia mewajibkan untuk membuat **sertifikasi tanah** bagi seluruh lahan yang dilalui dan terkena proyek pembangunan jalan, sebagaimana tertulis juga dalam perjanjian

kerjasama Proyek EINRIP. Saat ini hampir seluruh sertifikasi lahan masih dikoordinasikan dengan Pemkab dan BPN.

Dari 20 paket kegiatan yang ditargetkan selesai sampai pada tahun 2014, baru 11 paket yang telah diselesaikan dan sisanya akan diselesaikan pada tahun 2014. Selain itu, estimasi dana pinjaman sebesar AUD 10 juta diperkirakan tidak terpakai (bersisa) hingga akhir Desember 2014, namun saat ini kepastiannya masih akan dihitung kembali sebelum diproses lebih lanjut.

----- **Jerman** -----

Pada Triwulan I, tahun 2014 terdapat 3 pinjaman proyek bersumber dari Pemerintah Jerman yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya. Total nilai pinjaman proyek sebesar EUR 62,78 juta dengan penyerapan kumulatif hingga Maret 2014 sebesar EUR 23,93 juta (38,12%) sehingga masih terdapat sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar EUR 38,85 juta. Proyek-proyek tersebut adalah i) *Sustainable Economic Development through Tech & Vocational Education and Training (SED-TVET)*, ii) *Track Maintenance Improvement Programme*, dan iii) *The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital*.

Pelaksana proyek SED-TVET adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan *Implementing Agency* adalah i) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ii) Kementerian Perindustrian dan iii) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Durasi pelaksanaan proyek tersebut adalah 4 (empat) tahun dengan masa laku proyek adalah 15 Desember 2011 – 15 Desember 2015.

Pelaksana proyek *Track Maintenance Improvement Programme* adalah Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Proyek ini memiliki durasi selama 7 (tujuh) tahun dengan masa laku pinjaman sampai dengan 30 Juni 2016.

Pelaksana proyek *The Improvement of the Moehamad Hoesin Hospital* adalah Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan dengan durasi proyek selama 11 (sebelas) tahun dan masa laku pinjaman sampai dengan 31 Desember 2014.

Tabel 2.24 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Jerman Triwulan I TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab
 (Dalam Juta)

Instansi Pelaksana	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman		Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik		Penarikan TA 2014 (Januari–Maret)		
		EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	%
Kemendikbud Kemenperindustrian Kemenakertrans	1	19,00	26,11	0,32	0,44	18,68	25,67	0,32	0,44	6,66
Kemenhub	1	32,50	44,67	12,34	16,96	20,16	27,71	0,00	0,00	0,00
Kemenkes	1	11,28	15,50	11,27	15,49	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00
Total	3	62,78	86,28	23,93	32,89	38,85	53,41	0,32	0,44	1,52

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Catatan: menggunakan kurs tengah BI tanggal 28 Maret 2014 (1 EUR = 1,37445 USD)

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman

Target penarikan pinjaman Jerman pada TA 2014 sebesar EUR 21,14 juta, dan realisasi penarikan pada periode Januari-Maret tahun 2014 adalah sebesar EUR 0,32 juta atau 1,52% dari target TA 2014.

Nilai pinjaman proyek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebesar EUR 19 juta dengan realisasi penyerapan pinjaman Januari-Maret 2014 sebesar EUR 0,32 juta atau 6,66% dari target TA 2014 sebesar EUR 4,83 juta.

Nilai pinjaman proyek Kementerian Perhubungan adalah sebesar EUR 32,50 juta dengan penyerapan kumulatifnya sampai dengan bulan Maret tahun 2014 mencapai EUR 12,34 juta (38,57%). Untuk periode Januari-Maret Tahun Anggaran 2014, penyerapan proyek ini masih 0% atau belum ada penyerapan dari target TA 2014 sebesar EUR 15,89 juta.

Proyek yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan saat ini dalam penyelesaian kontrak dengan masa garansi sampai dengan tahun 2014. Penyerapan kumulatif pinjaman untuk proyek tersebut mencapai EUR 11,27 juta atau 99,86% dan sisanya sebesar EUR 0,02 juta akan ditarik seluruhnya sampai proyek berakhir.

Pinjaman Jerman Dengan *Progress Variant* ≤ -30

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan I TA 2014, terdapat proyek 1 (satu) yang didanai Jerman yang dengan kategori *at risk*, yakni proyek SED-TVET dengan *progress variant* menunjukkan angka -55,6.

1.2 Realisasi Pencapaian *Output*/Fisik

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sustainable Economic Development through Tech & Vocational Education and Training

Proyek ini bertujuan untuk peningkatan kemampuan institusi, peningkatan penyediaan tenaga kerja, peningkatan kemampuan tenaga kerja dan peningkatan kualitas lulusan. Proyek ini dilaksanakan oleh 3 Kementerian/Lembaga yang bertindak sebagai *Implementing Agency*. Nilai pinjaman proyek adalah sebesar EUR 19,00 juta dan hibah sebesar EUR 2 juta. Alokasi anggarannya adalah: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar EUR 7 juta (33%), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar EUR 5 juta (24%), Kementerian Perindustrian sebesar EUR 5 juta (24%), untuk Pekerjaan Konsultan sebesar EUR 2 juta (9,5%), kemudian sisanya adalah EUR 2 juta (9,5%) yang berasal dari hibah untuk pelatihan lanjutan guru.

Hingga saat ini, belum ada pencapaian *output* untuk pekerjaan fisik dari Januari-Maret 2014. Rencana pencapaian *output* dari proyek tersebut disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan I TA 2014. Proyek ini mengalami keterlambatan karena adanya perubahan lokasi proyek yang dilaksanakan oleh Kemenakertrans yang semula 3 menjadi 4 lokasi, pengadaan untuk Konsultan *Advance Training* yang semula direncanakan dalam waktu 36 bulan menjadi 27 bulan dan adanya penambahan jumlah konsultan, adanya perbedaan pendapat antara PMU dan KfW terkait dengan alokasi dana konsultan beberapa hal tersebut yang menyebabkan kinerja *output* terlihat kurang baik.

- **Kementerian Perhubungan**

- Track Maintenance Improvement Programme*

- Tujuan proyek adalah meningkatkan pemeliharaan jaringan jalur di Pulau Jawa. Rencana pencapaian *output* TA 2014 untuk proyek *Track Maintenance Improvement Programme* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan I TA 2014. Terdapat keterlambatan pekerjaan yang disebabkan pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2013 yang masih berimbas hingga saat ini, yaitu adanya kegiatan perubahan standarisasi teknik jalan deret sehingga dibutuhkan tambahan jumlah konsultan, adanya perubahan lokasi *workshop* dari Solo ke Ngrombo dan adanya lelang ulang untuk pekerjaan jasa konsultasi.

- **Kementerian Kesehatan**

- The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital*

- Proyek ini merupakan pengadaan peralatan kesehatan, *rezoning*, dan pelatihan bagi pegawai dan perawat rumah sakit Moh. Hoesin Palembang. Porsi pinjaman luar negeri sebesar EUR 11,28 juta dan porsi hibah sebesar EUR 1,5 juta. Rencana pencapaian *output* TA 2014 untuk proyek *The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan I TA 2014.

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Masalah yang cukup menonjol dalam pelaksanaan pinjaman proyek Jerman selama Triwulan I TA 2014 adalah masalah pencantuman DIPA, perpanjangan masa laku pinjaman, dan pengadaan barang dan jasa. Pada proyek SED-TVET terdapat kekurangan alokasi dana pada DIPA K/L terkait, Sudah dilaksanakan Rapat *Steering Comitee* pada awal bulan Mei 2014 yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas permasalahan proyek.

Diperlukan perpanjangan masa berlaku *Loan Agreement* untuk pekerjaan jasa konsultasi pada proyek *Track Maintenance Improvement Programme*. Terkait hal tersebut, Bappenas sudah mengajukan rekomendasi perpanjangan masa berlaku *Loan Agreement* ke Kementerian Keuangan sampai dengan 30 Juni 2016.

Permasalahan pada proyek *The Improvement of Moh. Hoesin Hospital Palembang* adalah dibebankannya bea masuk oleh Bea dan Cukai untuk barang-barang yang dikirim dari Singapura meskipun di dalam kontrak sudah dinyatakan bahwa barang yang dikirimkan telah bebas pajak dan bea masuk. Terkait hal tersebut, Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Keuangan, Bea Cukai, Bappenas, KfW, dan Konsultan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Korea

Pada Triwulan I TA 2014, terdapat 7 pinjaman proyek bersumber dari EDCF Korea sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, dengan total pinjaman sebesar KRW 377.495,65 juta dan 1 pinjaman proyek yang dihentikan pelaksanaannya dengan nilai pinjaman KRW 20.475,59 juta. Penarikan pinjaman secara kumulatif sampai dengan akhir Triwulan I TA 2014 sebesar KRW 57.086,11 juta atau

15,12% dari jumlah yang pinjaman, jumlah ini sama dengan posisi akhir Triwulan IV TA 2013. Hal ini berarti pada Triwulan I TA 2014 sama sekali tidak terdapat penyerapan pinjaman.

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman

Sebagaimana disebutkan di atas, pada Triwulan I TA 2014 sama sekali tidak terdapat penyerapan pada 7 proyek *on-going* Korea (EDCF). Dari 7 pinjaman proyek hanya 2 proyek yang melaksanakan pekerjaan fisik (konstruksi dan pengadaan barang), 2 proyek lainnya dalam tahap awal pekerjaan jasa konsultasi sedangkan 3 proyek lainnya dalam tahap persiapan proses pengadaan jasa konsultasi. Satu proyek lainnya yaitu Manado By-Pass Project Phase II telah melampaui masa berlaku dan Kementerian Pekerjaan Umum telah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa berlaku (tidak akan mempergunakan dana pinjaman) untuk membiayai penyelesaian proyek.

Tabel 2.25 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Korea menurut Instansi Penanggung Jawab

(Dalam Juta KRW)

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah Proyek	Nilai pinjaman	Penarikan kumulatif		Pinjaman belum ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1	Kemen PU	2	178.378,95	2.265,00	1,27	176.113,95	23.346,82	0,00	0,00
2	Kemenkes	2	65.580,40	54.821,11	83,59	10.759,45	573,79	0,00	0,00
3	POLRI	2	80.121,78	0,00	0,00	80.121,78	14.175,18	0,00	0,00
4	Badan Otorita Batam	1	53.414,53	0,00	0,00	53.414,53	1.603,19	0,00	0,00
Total		7	377.495,65	57.086,11	15,12	320.409,54	39.698,97	0,00	0,00

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

1.2 Realisasi Pencapaian Output/Fisik

1.2.1 Proyek yang Dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

Proyek pinjaman Korea yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum meliputi 1 proyek dikelola Ditjen Sumber Daya Air dan 1 proyek dikelola oleh Ditjen Bina Marga.

INA-19 Construction of Karian Multipurpose Dam Project

Penyerapan kumulatif pinjaman yang telah dilakukan yaitu KRW 1.482,00 juta atau 1,33% dari total pinjaman. Pada Triwulan I TA 2014, belum ada penarikan untuk pembayaran jasa konsultan. Pelaksana proyek sedang mempersiapkan proses lelang ulang untuk paket konstruksi.

EDCF INA-17 Padang By-Pass Capacity Expansion Project

Penyerapan kumulatif pinjaman yang telah dilakukan yaitu KRW 783 juta atau 1,17% dari total pinjaman. Hingga Triwulan I TA 2014, pelaksana proyek masih mengalami masalah pembebasan lahan di Duku *Interchange* dan 3 *underpass*. Pelaksana proyek akan melakukan pembebasan lahan di Duku *Interchange* dengan menggunakan DIPA APBD 2014 Kabupaten Pariaman, sedangkan untuk pembebasan lahan di 3 *underpass* akan menggunakan DIPA APBD 2014 Kota Padang. Pada Tahun Anggaran 2014, Pemda Provinsi Sumatera Barat akan menyelesaikan sisa 83 bangunan liar yang terdapat di lokasi proyek.

INA-11 Manado By-Pass Project Phase II

Masa berlaku proyek EDCF INA-11 *Manado By-Pass Project Phase II* telah selesai pada tanggal 31 Desember 2013. Proyek tidak akan dilanjutkan dengan menggunakan dana pinjaman sesuai dengan surat dari Kementerian Pekerjaan Umum No. HL. 0201/BP.11/0140/2014 tanggal 28 Februari 2014.

- **Kementerian Kesehatan**

Terdapat 2 pinjaman proyek yang bersumber dari EDCF yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan dengan total nilai proyek sebesar KRW 65.580,4 juta. Pada Triwulan I, proyek INA-10 *Strengthening of Teaching Hospital* dan INA-14 *Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan* belum melakukan pembayaran dan akan diselesaikan pada Triwulan II 2014.

INA-10 Strengthening of Teaching Hospital

Proyek masih mengalami masalah pada pengadaan alat EO gas. EDCF akan mendukung langkah Kementerian Kesehatan untuk mengganti EO Gas dengan alat lain.

INA-14 Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan

Penyerapan kumulatif dana yang telah dilakukan sebesar KRW 32.160,55 juta atau 76,92% dari total pinjaman. Pelaksanaan fisik proyek telah selesai 100%. Pada Tahun Anggaran 2014, proyek akan melakukan pembayaran untuk jasa konsultan.

- **POLRI/Kepolisian Negara RI**

Terdapat 2 proyek pinjaman Korea (EDCF) yang dilaksanakan oleh POLRI yaitu INA-18 *Integrated Trunking Radio Communication for Indonesia National Police Project* dan INA-21 *Fast Patrol Boats for Indonesian National Police Project* dengan total pinjaman sebesar KRW 80.121,78 juta. Pada Triwulan I TA 2014, proyek sedang melakukan proses pengadaan jasa konsultan untuk detail desain/*engineering services*.

- **Badan Otorita Batam**

Proyek INA-20 *Development of Sewerage System in Batam Island* tidak melakukan penarikan pinjaman pada Triwulan I TA 2014. Proyek sedang melakukan proses pengadaan jasa konsultan untuk detail desain/*engineering services*.

1.3 Progress Variant Proyek Pinjaman Korea ≤ -30

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan I TA 2014 diketahui terdapat 2 (dua) proyek pinjaman EDCF (Korea) yang berada pada kategori *at risk* ($PV \leq -30$) bahkan memiliki $PV \leq -50$. Kedua proyek tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.26 Progress Variant Proyek Pinjaman Korea

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TA 2013			TA 2014
					TW II	TW III	TW IV	TW I
1	INA-17	<i>Padang By Pass Capacity Expansion Project</i>	14/04/2011	14/10/2015	-48,13	-53,72	-59,17	-64,65
2	INA-19	<i>Construction of Karian Multipurpose Dam Project</i>	14/02/2012	14/02/2018	-21,94	-26,13	-29,96	-34,07

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

1.4 Pinjaman Proyek Korea yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014

Terdapat 2 (dua) proyek pinjaman EDCF (Korea) yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2014 yaitu proyek INA-10 dan INA-14. Informasi tentang masa berakhir dan

penyerapan anggaran proyek pinjaman EDCF (Korea) yang berakhir pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.27 Daftar Pinjaman Proyek Korea yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014

(Dalam Juta KRW)

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	
					Jumlah	%	Jumlah	%
1	INA-10	Strengthening of Teaching Hospital	06/08/2007	31/12/2014	22.660,56	95,34	1.107,84	4,66
2	INA-14	Improvement of H. Adam Malik Hospital in Medan	27/05/2009	27/06/2014	32.160,55	76,92	9.651,45	23,08

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Perancis dan AFD

Pada Triwulan I TA 2014, terdapat 7 pinjaman proyek bersumber dari Pemerintah Perancis dan AFD, yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya dengan total jumlah pinjaman proyek Pemerintah Perancis sebesar EUR 193,1 juta, dan total pinjaman proyek AFD sebesar USD 129,5 juta. Target penarikan pinjaman Perancis pada Tahun Anggaran 2014 sebesar EUR 14,75 juta, dengan realisasi pinjaman Perancis pada periode Januari-Maret tahun 2014 sebesar EUR 0 juta atau 0%. Target penarikan pinjaman AFD Tahun Anggaran 2014 sebesar USD 34,50 juta, dan realisasi pinjaman AFD pada periode Januari-Maret tahun 2014 sebesar EUR 0 juta atau 0%.

Tabel 2.28 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Perancis Triwulan I TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab

(Dalam Juta)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman		Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik		Penarikan TA 2014 (Januari-Maret)		
		EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	%
Kem. Pekerjaan Umum	1	36,80	50,58	33,81	46,47	3,00	4,12	0,00	0,00	0,00
BMKG	1	30,30	41,65	14,74	20,26	15,56	21,39	0,00	0,00	0,00
Kem. Perhubungan	2	126,00	173,18	0,00	0,00	126,00	173,18	0,00	0,00	0,00
Total	4	193,10	265,40	48,55	66,73	144,55	198,69	0,00	0,00	0,00

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Catatan: menggunakan kurs tengah BI tanggal 28 Maret 2014 (1 EUR = 1,37445 USD)

Tabel 2.29 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman AFD Triwulan I TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab

(Dalam Juta)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan Kumulatif	Pinjaman Belum Ditarik	Penarikan TA 2014 (Januari-Maret)	
		USD	USD	USD	USD	%
Kem. Kelautan & Perikanan	1	30,00	8,56	21,44	0,00	0,00
PT. PLN	2	99,50	30,44	69,07	0,00	0,00
Total	3	129,50	39,00	90,50	0,00	0,00

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman

Penyerapan kumulatif 4 (empat) proyek pinjaman Perancis adalah sebesar EUR 48,55 juta (25,14%) dengan sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar EUR 144,55 juta (74,86%). Hingga periode Januari-Maret 2014 masih belum ada penarikan pinjaman (0% dari target yang telah ditetapkan).

Penyerapan kumulatif 3 proyek pinjaman AFD sebesar USD 39,00 juta (30,12%) dengan sisa pinjaman yang belum ditarik sebesar USD 90,50 juta (69,88%). Penyerapan untuk hingga periode Januari-Maret 2014 masih belum ada penarikan pinjaman (0% dari target yang telah ditetapkan).

Pinjaman AFD Dengan *Progress Variant* \leq -30

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan I TA 2014 diketahui bahwa proyek *Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement* memiliki *progress variant* sebesar -64,43 (*progress variant* yang semakin kecil dari -30 menandakan bahwa penyerapan dana yang lambat dari waktu yang dijadwalkan).

1.2 Realisasi Pencapaian *Output*/Fisik

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

Rehabilitation of Drainage System of Banda Aceh

Proyek ini berlokasi di Banda Aceh dan Lhokseumawe dan dilaksanakan sebagai akibat terjadinya bencana tsunami yang melanda NAD pada tahun 2004. Akibat bencana tsunami tersebut, sebagian besar sistem *drainage* di kota Banda Aceh dan Lhoksumawe mengalami kehancuran sehingga dengan dilaksanakan proyek tersebut, sistem *drainage* dapat terbangun kembali. Tujuan proyek tersebut adalah i) Perencanaan tsunami *early warning system*, ii) Pengamanan pantai, iii) Pengendalian banjir dan iv) *Drainage* perkotaan. Rencana pencapaian *output* proyek ini disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan I TA 2014. Jumlah pinjaman luar negeri sebesar EUR 36,8 juta. Realisasi pencapaian fisik untuk pembangunan drainase dan jasa konsultasi sudah mencapai 100%. Sedangkan untuk penyerapan anggaran tidak akan terserap seluruhnya (terdapat sisa pinjaman) karena adanya pemotongan nilai kontrak konsultan pelaksana.

- **BMKG**

Strengthening of BMKG Climate and Weather Services

Proyek ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur dan sistem informasi Meteorologi BMKG, dalam rangka mengembangkan peringatan secara ekstensif dan layanan yang disediakan oleh BMKG kepada masyarakat untuk seluruh sektor ekonomi, sektor transportasi dan sektor pertanian serta sektor lainnya yang terkait.

Jumlah pinjaman luar negeri sebesar EUR 30,29 juta. Rencana pencapaian *output* TA 2014 proyek *Strengthening of BMKG Climate and Weather Services* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan I TA 2014. Realisasi fisik untuk pembelian peralatan, pembangunan sistem, dan pelatihan personil mencapai 48% dari keseluruhan pekerjaan proyek. Sedangkan penyerapan anggaran mencapai 48,65% dari total anggaran.

- **Kementerian Perhubungan**

- Bandung Urban Railway Transport Development***

- Proyek ini bertujuan untuk Peningkatan jalur kereta api dan penyusunan kembali tata letak stasiun kereta api, menambah stasiun menengah untuk peningkatan kualitas sinyal dan sistem telekomunikasi, Elektrifikasi jalur rel kereta Padalarang-Cicalengka, Peningkatan sistem persinyalan, pembangunan depot dan *workshop* untuk pemeliharaan fasilitas.

- Proyek ini dibiayai oleh Natixis (Perancis) dan AFD dengan nilai pinjaman masing-masing adalah EUR 80 juta berasal dari Natixis dan EUR 46 juta yang berasal dari AFD. Pelaksanaan pekerjaan untuk porsi pendanaan AFD di fokuskan pada kegiatan Jasa Konsultansi dan Konstruksi *Elevated Structure*, dan porsi pendanaan Natixis di fokuskan pada kegiatan Konstruksi dan Elektrifikasi. Pelaksanaan pekerjaan akan dimulai dari pekerjaan yang berasal dari pendanaan AFD, kemudian pelaksanaan pekerjaan direncanakan paralel antara pekerjaan yang berasal dari pendanaan AFD dan pendanaan Natixis. Pelaksanaan pekerjaan yang didanai oleh AFD saat ini sudah dilaksanakan prakualifikasi lelang konsultan, telah disampaikan dokumen prakualifikasi lelang pada tanggal 28 April 2014. Pada Triwulan I TA 2014 belum ada realisasi pencapaian *output* baik konsultansi maupun konstruksi, diperkirakan pekerjaan konsultansi yang dibiayai dari porsi pinjaman AFD baru dimulai pada bulan November 2014. Sedangkan untuk pekerjaan yang didanai oleh Natixis, pekerjaan tender konsultan direncanakan baru akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2014.

- **Kementerian Kelautan dan Perikanan**

- Infrastructure Development Space Oceanography (INDESO)***

- Proyek ini bertujuan untuk mendukung program-program kelautan dan perikanan di dalam mengembangkan stasiun penerima data yang dipergunakan untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan internasional di masa depan. Nilai pinjaman untuk proyek ini adalah sebesar USD 30 juta.

- Pengelolaan sumber daya kelautan oseanografi perlu didukung oleh 3 komponen penting; pengamatan berbasis ruang, pengamatan in-situ dan biokimia laut dan permodelan fisik. Ketiga unsur tersebut diperlukan untuk memahami dinamika laut dan menggunakannya untuk meramalkan fenomena alam. Rencana pencapaian *output* proyek ini disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan I TA 2014. Realisasi fisik untuk pembangunan infrastruktur, sistem dan manajemen proyek mencapai 33,01% dari keseluruhan pekerjaan proyek. Sedangkan penyerapan anggaran mencapai 28,55% dari total anggaran.

- **PT. PLN**

- Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement***

- Proyek ini bertujuan untuk efisiensi energi utama sebagai rencana strategis untuk mengurangi biaya operasi bisnis dan distribusi PLN kepada pelanggan. Diharapkan dengan berjalannya proyek ini PLN dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dan dapat diandalkan. Proyek ini merupakan proyek *co-financing* antara AFD dan ADB, jumlah pinjaman luar negeri dari pendanaan yang berasal dari AFD sebesar USD 50 juta. Realisasi fisik untuk pengadaan peralatan, instalasi dan konsultansi proyek mencapai

41,7% dari keseluruhan pekerjaan proyek. Sedangkan penyerapan anggaran mencapai 35,57% dari total anggaran.

Strengthening West Kalimantan

Proyek ini bertujuan untuk efisiensi biaya operasi bisnis dan distribusi PLN di Kalimantan Barat. Pelaksanaan proyek ini mencakup 3 (tiga) aspek pekerjaan yaitu i) pembangunan 275 kV jaringan transmisi, ii) meningkatkan jaringan transmisi 150KV di Kalimantan Barat dan iii) membangun model jaringan baru untuk meningkatkan akses listrik untuk rumah tangga. Proyek ini merupakan proyek *co-financing* antara AFD dan ADB, jumlah pinjaman luar negeri sebesar USD 49,5 juta. Pada Triwulan I TA 2014 belum ada realisasi pencapaian *output* baik untuk pelaksanaan jasa konsultasi maupun konstruksi.

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Masalah yang cukup menonjol dalam pelaksanaan pinjaman proyek Perancis selama Triwulan I TA 2014 adalah terkait masalah teknis pelaksanaan proyek dan pencantuman DIPA.

- ***Proyek Rehabilitation Drainage System of Banda Aceh***

Permasalahan teknis pada proyek *Rehabilitation Drainage System of Banda Aceh* adalah adanya pemotongan nilai kontrak untuk konsultan EGIS dari yang direncanakan karena ada ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan para pihak dengan membuat *Final Contract Amandement*.

- ***Proyek Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement***

Pada proyek *Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement* permasalahan teknis pelaksanaan yang disebabkan pada Paket 6 harus menggunakan *drill electric* yang awalnya diperkirakan bisa dilakukan secara manual, kemudian pada Paket 7 dan Paket 8 terdapat perubahan spesifikasi peralatan. Selain itu juga terdapat permasalahan batas waktu *drawdown period*, sehingga perlu dilakukan revisi waktu pelaksanaan pekerjaan.

- ***Proyek Infrastructure Development Space Oceanography (INDESO)***

Pada proyek *Infrastructure Development Space Oceanography (INDESO)* terdapat kekurangan DIPA 2014, terkait hal tersebut Kementerian KKP mengajukan untuk melakukan revisi DIPA 2014.

RR Tiongkok

Pada Triwulan I TA 2014, terdapat 4 pinjaman proyek bersumber dari Pemerintah RR Tiongkok yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, dengan jumlah total nilai pinjaman sebesar USD 399,71 juta. Keempat pinjaman proyek dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Penyerapan kumulatif pinjaman sampai dengan akhir Triwulan I TA 2014 sebesar USD 119,56 juta atau 29,91% dari jumlah yang pinjaman, sehingga pinjaman yang belum ditarik sebesar USD 200,15 juta (50,07%).

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman

Pada Triwulan I TA 2014, Penarikan pinjaman yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum masih rendah. Pada Triwulan I TA 2014, hanya pinjaman proyek No. 21595701-31

Additional Loan for Jatigede Dam yang melakukan penarikan pinjaman yaitu sebesar USD 37,18 juta. Meskipun demikian, semua proyek pinjaman RR Tiongkok selama Triwulan I mencapai progres pekerjaan fisik dan jasa konsultasi (tambahan *output*). Pencairan dana pinjaman dari Bank Exim RRT yang relatif lama menyebabkan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Bina Marga belum dapat melakukan pencairan pinjaman pada Triwulan I.

Tabel 2.30 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman RR Tiongkok menurut Instansi Penanggung jawab

(Dalam Juta USD)

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan kumulatif		Pinjaman belum ditarik	Penyerapan TA 2014		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1	Kemen PU	4	399,71	119,56	29,91	280,15	96,21	37,18	38,64
Total		4	399,71	119,56	29,91	280,15	96,21	37,18	38,64

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

1.2 Realisasi Pencapaian *Output*/Fisik

1.2.1 Proyek yang Dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga

Sebanyak 3 pinjaman proyek yang bersumber dari RR Tiongkok dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

21660201 Tayan Bridge Construction

Penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar USD 30,44 juta atau 45,25% dari total pinjaman. Pada Triwulan I TA 2014, kontraktor mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan fisik karena kondisi pasang Sungai Kapuas. Kondisi tersebut menyulitkan kontraktor melaksanakan kegiatan struktur bawah jembatan. Kontraktor sedang melakukan penyusunan ulang jadwal pekerjaan fisik menyesuaikan dengan kondisi jadwal pasang surut sungai sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu.

21662601 Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll

Penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar USD 38,26 juta atau 41,14% dari total pinjaman. Pekerjaan fisik proyek telah mengalami kemajuan pada Triwulan I TA 2014. Proyek sedang melakukan relokasi utilitas yang berada di area pembangunan. Desain utilitas baru sedang dibuat oleh kontraktor menyesuaikan struktur pembangunan jalan. Akan tetapi, proyek masih mengalami hambatan pada beberapa struktur yang membutuhkan penyesuaian karena berpotensi masalah apabila dilaksanakan sesuai DED kontrak. Pelaksana proyek perlu tambahan area survey topografi untuk mengatasi permasalahan ini.

21663301 Toll Road Development of Medan-Kualanamu

Penyerapan kumulatif yang telah dilakukan sebesar USD 13,68 juta (11,17%) dari total pinjaman. Pekerjaan fisik proyek mengalami kemajuan pada Triwulan I 2014 sebesar 7,12% dari total target 2014 (5 km). Permasalahan yang menghambat pekerjaan fisik yaitu **pengadaan lahan** karena terdapat lahan yang belum dibebaskan seluas 79,48% dari panjang lahan yang dibutuhkan. Pelaksana proyek menargetkan pembebasan lahan akan selesai seluruhnya pada Desember 2015. Pelaksana proyek berencana akan melakukan perubahan jadwal pekerjaan dengan memfokuskan pekerjaan fisik pada area yang sudah dibebaskan. Pelaksana proyek juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan pembebasan tanah dan utilitas.

21595701-31 *Additional Loan for Jatigede Dam*

Proyek 21595701-31 *Additional Loan for Jatigede Dam* merupakan proyek lanjutan dari proyek 21595701 *Construction of Jatigede Dam Project*. Penyerapan pinjaman pada Triwulan I TA 2014 sebesar USD 37,18 juta.

1.3 *Progress Variant* Proyek Pinjaman RR Tiongkok ≤ -30

Berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan Triwulan I TA 2014 diketahui terdapat 1 proyek pinjaman RR Tiongkok yang berada pada kategori *at risk* ($PV \leq -30$). Proyek pinjaman RR Tiongkok yang masuk kategori *at risk* tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31 *Progress Variant* Proyek Pinjaman JICA

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	TA 2013			TA 2014
					TW II	TW III	TW IV	TW I
1	21663301	<i>Toll Road Development of Medan - Kualanamu</i>	11/03/2013	12/06/2014	-24,24	-44,32	-53,24	-72,89

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

1.4 Pinjaman Proyek RR Tiongkok yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014

Pada Tahun Anggaran 2014 terdapat 1 proyek yang dibiayai pinjaman RR Tiongkok berakhir masa berlakunya yaitu 21663301 *Toll Road Development of Medan – Kualanamu*.

Tabel 2.32 Daftar Pinjaman Proyek RR Tiongkok yang Berakhir Masa Lakunya Pada TA 2014

(Dalam Juta USD)

No	Nomor Loan	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	
					Jumlah	%	Jumlah	%
1	21663301	<i>Toll Road Development of Medan - Kualanamu</i>	11/03/2013	12/06/2014	13,68	11,17	108,75	88,83

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Spanyol

Pada Triwulan I TA 2014, hanya terdapat 2 (dua) pinjaman proyek bersumber dari Spanyol yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya, yaitu proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to accelerate Meat and Milk Production* dengan nilai pinjaman sebesar EUR 14,70 juta dan *Bridge Material Supply for Bridge Replacement* dengan nilai pinjaman sebesar EUR 24,86 juta.

Tabel 2.33 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Spanyol Pada Triwulan I TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab

(Dalam Juta)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman		Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik		Penarikan TA 2014 (Januari–Maret)		
		EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	EUR	Ekiv. USD*	%
LIPI	1	14,70	20,20	9,18	12,62	5,52	7,59	0,00	0,00	0,00
Kementerian PU	1	24,86	34,17	11,76	16,16	13,10	18,00	5,43	7,46	29,51
Total	1	39,56	54,37	20,94	28,78	18,62	25,59	5,43	7,46	23,42

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Catatan: menggunakan kurs tengah BI tanggal 28 Maret 2014 (1 EUR = 1,37445 USD)

1. Kinerja Pelaksanaan

1.1 Realisasi Penyerapan Pinjaman

Sampai dengan Triwulan I TA 2014, penyerapan kumulatif kedua proyek ini sebesar EUR 20,94 juta (52,93%), sedangkan pinjaman yang belum ditarik adalah sebesar EUR 18,62 juta. Penyerapan untuk Tahun Anggaran sampai dengan Triwulan I mencapai EUR 5,43 juta (23,42% dari target yang telah ditetapkan).

1.2 Realisasi Pencapaian *Output*/Fisik

- **LIPI**

- ***Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to accelerate Meat and Milk Production***

Proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to accelerate Meat and Milk Production* menyediakan peralatan laboratorium, *processing* pakan dan susu, serta penyiapan sarana fisik berupa gedung laboratorium peternakan seluas 1500 m², *Processing unit* untuk pakan ternak seluas 512 m², *unit processing* susu seluas 450 m², kandang ternak (108 m²) Kandang otomatis (180 m²), prasarana lingkungan (1 paket) yang akan dibangun di Cibinong di Bogor. Disamping itu, untuk peningkatan sumber daya manusia terkait pelaksanaan kegiatan ini, akan dilakukan training yang dibagi menjadi 3 komponen, yaitu i) *operasional training program*, ditujukan untuk memberikan pemahaman terhadap fungsi dan operasional peralatan-peralatan, menangani peralatan-peralatan, memahami protocol dan mampu melakukan pemeliharaan terhadap alat-alat tersebut, ii) *Overseas Training Program*, akan dilaksanakan di Spanyol selama 2 minggu, total jumlah peserta 24 orang dibagi menjadi 5 kelompok (*Embryo Transfer dan Embryo Manipulasi, Feed Management, Dairy Product, Beef product, Project Management*) dan iii) *Domestik Training Program*, yang akan dilaksanakan di Indonesia selama 8 minggu dengan jumlah peserta sebanyak 105 orang.

Rencana pencapaian *output* TA 2014 untuk proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement* disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan I TA 2014. Realisasi pencapaian fisik pengadaan peralatan laboratorium dan instalasi mencapai 67,88% dari keseluruhan pekerjaan proyek, dan pengembangan SDM (Pelatihan) belum dapat dilaksanakan. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran mencapai 63,04% dari total anggaran.

- **Kementerian Pekerjaan Umum**

- ***Bridge Material Supply for Bridge Replacement***

Proyek *Bridge Material Supply for Bridge Replacement* bertujuan untuk mengganti dan merehabilitasi jembatan-jembatan yang berada di Sumatera yang sudah berumur sangat tua dengan jembatan rangka baja yang baru. Disamping itu, proyek ini diharapkan dapat menyediakan fasilitas transportasi dasar untuk mendukung pembangunan daerah.

Rencana pencapaian *output* TA 2014 untuk proyek ini disajikan pada buku lampiran laporan kinerja pelaksanaan PHLN Triwulan I 2014. Realisasi pencapaian fisik untuk pengadaan barang mencapai 19,93% dari keseluruhan proyek, sedangkan untuk pekerjaan jasa *services* 0,38%.

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement* pada Triwulan I 2014 terkait masalah krisis ekonomi yang terjadi di Eropa termasuk Spanyol yang berimbas pada kontraktor Spanyol untuk proyek ini, yaitu Equinse, SA. Akibatnya, terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, LIPI telah memperpanjang masa laku proyek sampai dengan 30 September 2014 yang sebelumnya telah berakhir pada bulan Oktober 2013.

Sedangkan permasalahan pada proyek *Bridge Material Supply for Bridge Replacement* pada Triwulan I 2014 adalah terkait pencantuman DIPA. Terdapat kekurangan alokasi anggaran proyek ini pada DIPA 2014 dan sebagai langkah penyelesaiannya, Kementerian PU telah mengajukan revisi DIPA 2014.

PROYEK FASILITAS KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING (LPKE/KSA)

Jumlah proyek Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE)/Kredit Swasta Asing (KSA) yang efektif dan sedang berjalan pada Triwulan I TA 2014 adalah sebanyak 65 proyek yang dikelola oleh 3 (tiga) instansi yaitu Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebanyak 59 proyek, Kepolisian RI (Polri) 4 proyek, dan PT. PLN 2 proyek. Dari 59 proyek Kemenhan, 7 diantaranya merupakan alokasi *multi-years*. Total nilai pinjaman LPKE/KSA adalah USD 5,38 miliar. Adapun rekapitulasi pelaksanaan pinjaman KSA/LPKE menurut instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.34 Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman LPKE/KSA Pada Triwulan I TA 2014 Menurut Instansi Penanggung Jawab

(Dalam Juta USD)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Target Penyerapan TA 2014	Realisasi TW I 2014
<i>Dilaksanakan oleh K/L</i>					
Kemenhan	59	5.307,78	2.371,57	1.140,59	706,90
Kepolisian RI	4	17,47	4,06	15,85	0,00
<i>Di SLA kan</i>					
PT. PLN	2	54,28	19,79	17,25	0,00
TOTAL	65	5.379,53	2.395,42	1.173,69	706,90

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Catatan : Menggunakan kurs tengah BI tanggal 28 Maret 2014 (USD 1 = IDR 11.404)

1. Realisasi Penyerapan Pinjaman

1.1 Kementerian Pertahanan

Total nilai alokasi proyek LPKE/KSA Kemenhan yang sedang berjalan saat ini mencapai USD 6,15 miliar, dengan persentase terbesar terdapat pada alokasi Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) tahun 2011-2014 sebesar 78,43%. Pada triwulan ini terdapat 7 kegiatan yang selesai dilaksanakan, di mana 3 kegiatan diantaranya mendapat alokasi *multi-years*. Ketujuh kegiatan tersebut terdiri dari 3 kegiatan yang dilaksanakan Mabes TNI, 2 kegiatan TNI AU, dan 2 kegiatan TNI AD. Total penyerapan pinjaman kumulatif sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 mencapai USD 2,37 miliar atau 44,68% dari total komitmen pinjaman. Alokasi total PHLN Kemenhan pada tahun 2014 mencapai Rp 13,01 triliun atau ekuivalen USD 1,14 miliar.

Tabel 2.35 Total Alokasi, Komitmen Pinjaman dan Penyerapan Kumulatif Pinjaman Proyek LPKE/KSA*(dalam USD)*

No.	Tahun Alokasi	Jumlah Alokasi	Total Komitmen Pinjaman	Total Penyerapan Kumulatif
1	AKE 2002	11.176.000,00	9.499.600,00	0,00
2	AKE 2004	29.796.000,00	25.326.585,76	5.737.350,00
3	AKE 2005	227.200.000,00	200.648.457,74	94.799.958,31
4	APP 2006	320.750.000,00	273.388.871,22	259.091.831,90
5	APP 2008	43.100.000,00	37.364.292,55	20.973.234,29
6	APP 2009	695.500.000,00	592.998.340,99	469.070.888,34
7	PSP 2011-2014	4.826.260.000,00	4.168.552.517,21	1.521.899.530,68
Total		6.153.782.000,00	5.307.778.665,47	2.371.572.793,52

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Sementara itu, dari target penyerapan pinjaman luar negeri tahun 2014 sebesar Rp 11,01 triliun, Kemenhan berhasil menyerap pinjaman sebesar Rp 8,06 triliun atau 60,23% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.36 Target dan Realisasi Penyerapan TA 2014*(Dalam Miliar Rupiah)*

No.	Tahun Alokasi	Target TA 2014	Realisasi Penyerapan	
			Kumulatif	TW I TA 2014
1	AKE 2002	11.007,34	0,00	0,00
2	AKE 2004		0,00	0,00
3	AKE 2005		106,62	106,62
4	APP 2006		306,11	306,11
5	APP 2008		55,86	55,86
6	APP 2009		388,43	388,43
7	PSP 2011-2014		7.204,44	7.204,44
Total		11.007,34	8.061,46	8.061,46

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

1.2 Kepolisian Republik Indonesia

Alokasi total PHLN Polri yang tercantum dalam DIPA TA 2014 mencapai Rp 1.849.268.000.000 atau ekuivalen USD 162,16 juta, dengan perincian sebagai berikut:

- Rupiah murni pendamping sebesar Rp 150.000.000.000,00 atau ekuivalen USD 13,15 juta.
- Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 1.699.268.000.000,00 atau ekuivalen USD 149,01 juta.

Selain dialokasikan untuk proyek-proyek yang sedang berjalan, anggaran PHLN sebesar ini juga dialokasikan untuk proyek-proyek yang direncanakan efektif pada pada tahun 2014 ini.

Terkait proyek-proyek KSA/LPKE, pada triwulan I ini terdapat 4 (empat) proyek yang sedang *on-going*. Target penyerapan pada tahun 2014 untuk keempat proyek ini mencapai Rp 180,77 miliar atau ekuivalen USD 15,85 juta. Namun, pada Triwulan I ini keempat proyek ini tidak melakukan penyerapan sama sekali (realisasi penyerapan 0%).

Tabel 2.37 Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE Kepolisian Republik Indonesia

(Dalam Juta USD)

No	Alokasi Tahun	Jumlah Alokasi	Total Komitmen Pinjaman	Total Penyerapan Kumulatif	Penyerapan TA 2014	
					Target	Realisasi
1	POLRI TA 2004	3,60	3,06	0,12	15,85	0,00
2	POLRI TA 2005	5,95	5,06	3,94		0,00
3	POLRI TA 2008	10,99	9,35	0,00		0,00
Total		20,54	17,47	4,06	15,85	0,00

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

1.3 PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Jumlah proyek FKE yang dikelola PT. PLN mencapai 2 (dua) proyek dengan nilai pinjaman USD 54,28 juta. Kedua proyek tersebut adalah *Java Bali Submarine Cables 150 kV Circuit 3 & 4* dan *Scattered Transmissions and Substantions Package 8*. Proyek-proyek tersebut dibiayai dengan pinjaman JBIC melalui skema SLA (*subsidiary loan agreement*). Sampai dengan Triwulan I TA 2014 penyerapan kumulatif untuk kedua proyek ini mencapai USD 19,79 juta atau 36,45% dari total pinjaman proyek. Pada tahun 2014 PT. PLN menargetkan total penyerapan untuk kedua proyek ini sebesar USD 17,25 juta.

Tabel 2.38 Rekapitulasi Proyek KSA/LPKE PT PLN

(Dalam Juta USD)

No	Nama Proyek	Jumlah Pinjaman	Penyerapan Kumulatif	Penyerapan TA 2014	
				Target	Realisasi
1	<i>Java Bali Submarine Cables 150 kV Circuit 3 & 4</i>	34,07	19,79	14,69	0,00
2	<i>Scattered Transmissions and Substantions Package 8</i>	20,21	0,00	2,56	0,00
Total		54,28	19,79	17,25	0,00

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Catatan: Kedua proyek ini menggunakan mata uang Japanese Yen. Menggunakan kurs tengah BI tanggal 28 Maret 2014 (USD 1 = JPY 102,145; USD 1=IDR 11.404)

2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

- a. Seperti status beberapa triwulan sebelumnya, proses penghapusan tanda bintang di DPR, sebagai syarat untuk pencairan uang muka, untuk 2 kegiatan POLRI yaitu Aljihandak EOD/MOLE *Programmer* dan Harsucad Pesawat (Alokasi KE TA 2008) masih belum selesai. Dengan demikian, proses ini telah memakan waktu selama 19 bulan.
- b. Sebanyak 12 proyek Kemenhan mengalami keterlambatan sehingga memerlukan perpanjangan masa laku *loan agreement* dengan rincian sebagai berikut:
 - Alokasi 2002 : 1 Proyek
 - Alokasi 2004 : 1 Proyek
 - Alokasi 2005 : 3 proyek
 - Alokasi 2006 : 1 proyek
 - Alokasi 2008 : 3 proyek
 - Alokasi 2009 : 3 proyek

- c. Seperti laporan 3 bulan sebelumnya, proyek *Scattered Transmissions and Substations Package 8* yang dilaksanakan PT. PLN perlu mendapat perhatian karena sampai dengan Triwulan I TA 2014, proyek ini belum melakukan penyerapan (realisasi penyerapan 0%). Padahal proyek ini telah berjalan selama 16 bulan sejak *loan agreement* ditandatangani. Sebelumnya, masalah utama yang dihadapi proyek ini lebih banyak berkaitan dengan masalah tanah untuk lokasi proyek. Namun, pada Triwulan I TA 2014 terdapat masalah baru yang menyangkut mekanisme pencairan dana pinjaman. Dalam hal ini, pihak *lender*, *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) belum menerbitkan *Letter of Undertaking* (LoU) atas L/C yang diterbitkan Bank Indonesia sehingga L/C tersebut belum dapat efektif. Terkait masalah tanah, pihak pengelola proyek memastikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyetujui perpindahan salah satu lokasi proyek dari Semanggi Barat ke Semanggi Timur yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan terkait masalah L/C, PT. PLN diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Apabila diperlukan, PT. PLN akan mengusulkan perubahan mekanisme pencairan dana menjadi *direct payment*.

BAB III

KINERJA PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI

Pada Triwulan I TA 2014, terdapat 105 proyek hibah yang dilaporkan oleh 12 Kementerian/Lembaga dengan total nilai hibah sebesar USD 871.962.689. Dari 12 Kementerian/Lembaga, Kementerian Pertanian mengelola 79 proyek dengan total nilai hibah sebesar USD 125.811.658, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengelola 6 proyek dengan total nilai hibah USD 23.910.877 dan Bappenas mengelola 5 proyek dengan total nilai hibah USD 614.481.879. Rekapitulasi hibah berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Hibah Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen USD)

No	Instansi Penanggung Jawab	Hibah Lainnya*)		Hibah Langsung dalam Bentuk Uang		Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	Kemen PU	4	72.741.292	-	-	-	-
2	Kemendagri	2	14.280.079	-	-	-	-
3	Kemenko Perekonomian	1	1.050.000	-	-	-	-
4	Kemen PANRB	-	-	-	-	2	12.806.790
5	Kemendag	1	483.018	-	-	-	-
6	Kemen ESDM	-	-	-	-	6	23.910.877
7	Kemenkominfo	1	1.868.338	-	-	-	-
8	Kementan	7	6.591.853	54	7.024.567	18	112.195.238
9	Bappenas	4	14.481.879	1	600.000.000	-	-
10	LIPI	-	-	2	587.354	-	-
11	PPATK	-	-	-	-	1	1.181.302
12	KPK	-	-	1	2.760.102	-	-
Total		20	111.496.459	58	610.372.023	27	150.094.207
Total Jumlah Proyek Hibah		105					
Total Nilai Proyek Hibah		871.962.689					

*Keterangan: *) Hibah Lainnya merupakan jenis hibah yang tidak terdaftar dalam DRKH 2011 dan juga tidak termasuk dalam kategori hibah langsung dalam bentuk uang maupun barang/jasa/surat berharga.*

Untuk beberapa proyek hibah seperti hibah berasal dari lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Pemerintah Amerika Serikat dilakukan pemantauan lebih mendalam untuk mengetahui tujuan dan capaian *output*-nya dalam rangka mendukung program pembangunan nasional. Oleh karena itu, pada Triwulan I Tahun 2014 proyek hibah dimaksud diundang dalam rapat pemantauan agar diperoleh informasi menyeluruh. Berikut hasil pemantauan kinerja pelaksanaan hibah beberapa proyek dari lembaga PBB dan Pemerintah Amerika Serikat.

United Nations Development Programme (UNDP)

Pemantauan hibah pada Triwulan I Tahun 2014 dilakukan terhadap kinerja pelaksanaan hibah luar negeri UNDP. Pemantauan difokuskan pada pencapaian *output* dan *outcome* dari kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNDP yang tertuang dalam *Country Programme Action Plan (CPAP) 2011-2015*. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pada Triwulan I Tahun 2014, telah dilakukan *review* tahunan bersama oleh Pemerintah Indonesia dan UNDP terhadap pencapaian *output* dan *outcome* untuk proyek-proyek UNDP.

Dalam dokumen CPAP 2011-2015, terdapat 4 (empat) komponen program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan UNDP. Keempat komponen program tersebut antara lain:

1. Komponen Program 1: Pencapaian MDGs dan Penanggulangan Kemiskinan
2. Komponen Program 2: Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
3. Komponen Program 3: Peningkatan Tata Kelola yang Demokratis
4. Komponen Program 4: Penanggulangan Krisis dan Pemulihan

Masing-masing komponen program tersebut memiliki *outcome* dan *output* yang dicapai melalui pelaksanaan proyek-proyek UNDP. Proses CPAP *review* yang dilakukan bersama antara Pemerintah Indonesia dan UNDP mengidentifikasi progres dan capaian dari masing-masing *output* pada setiap komponen program.

Komponen Program 1: Pencapaian MDGs dan Penanggulangan Kemiskinan

Komponen program ini memiliki 1 *outcome* dan 6 *output*. Terdapat 4 proyek UNDP yang berkontribusi terhadap pencapaian *outcome* dan *output* tersebut, antara lain:

1. *People Centered Development Program (PCDP)*
2. *Support to the Acceleration of MDGs Achievement in Indonesia*
3. *Strengthening Innovation Partnership for Development Cooperation (SIP-DC)*
4. *Management and Technical Assistant Facility (MTAF) to Strengthen the Implementation of Global Fund Grants in Indonesia.*

• **Kinerja Pencapaian Output**

Secara umum, progres dan capaian *output* pada *outcome* 1.1 menunjukkan adanya progres, dimana tiga *output* memiliki progres yang signifikan. Adapun keempat indikator lainnya telah menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan *baseline* dan capaian pada proses *review* sebelumnya, namun belum memenuhi target sesuai yang ditetapkan.

Outcome 1.1. National and sub-national authorities and stakeholders are more effective in reducing poverty and vulnerability, accelerating achievement of MDG targets as stated in the RPJMN, and improving overall human development.

Tabel 3.2 Outcome Komponen Program 1

Output	Capaian Saat Ini
<u>Output 1.1.1.</u> <i>National and local institutions have enhanced systems and competencies for MDG-based pro-poor and results-based planning, budgeting, monitoring and evaluation</i>	<i>Some progress</i>

Output	Capaian Saat Ini
<u>Output 1.1.2.</u> <i>Local economic development facility established at the sub-national level, providing technical assistance in budget allocation and financial management, coordination of PPP-CSR engagement and partnership with universities and CSOs, particularly in UNPDF areas</i>	<i>Some progress</i>
<u>Output 1.1.3.</u> <i>Equity, human rights and HIV-sensitive social protection incorporated in the National Universal Health Coverage Scheme (BPJS).</i>	<i>Significant progress</i>
<u>Output 1.1.4.</u> <i>Strategy and mechanisms to implement the MDGs Road Map are developed. (revised the number from 1.3.1)</i>	<i>Significant progress</i>
<u>Output 1.1.5.</u> <i>National and sub National capacities improved to monitor, evaluate, analyze and report on MDG and human development.</i>	<i>Significant progress</i>
<u>Output 1.1.6.</u> <i>Bappenas and related line ministries capacity to establish and foster global partnership for development cooperation strengthened.</i>	<i>Some Progress</i>

- **Pembelajaran dari Proyek-Proyek pada Komponen Program 1**

Melalui proyek PCDP, sebanyak 12.803 orang dari berbagai komunitas telah menerima layanan kesehatan dan pendidikan dasar. Selain itu, PCDP juga memberikan pelatihan bagi CSO agar dapat mengakses bantuan sosial yang diberikan melalui APBD. Penerima manfaat dari PCDP yang mendapatkan bantuan pembiayaan dari APBD antara lain GKPI Mandopi (Papua Barat) yang bergerak di sektor pertanian dan IPPM (Papua) yang bergerak di sektor pendidikan usia dini pada tahun 2012.

Keberhasilan lain yang dicapai pada *Outcome* 1.1 adalah penyusunan *MDGs Acceleration Framework* (MAF) untuk mempercepat pencapaian target pembangunan milenium di bidang i) kelestarian lingkungan hidup, ii) tingkat kematian ibu melahirkan, iii) HIV/AIDS dan iv) pengairan dan sanitasi. Pada tahap pertama, MAF akan dikembangkan untuk mempercepat pengurangan rasio kematian ibu melahirkan (MAF-Maternal Mortality Rate/MAF MMR). MAF MMR yang dibangun melalui *MDG Roadmap Project* di Jawa Tengah pada tahun 2013 telah diadopsi oleh Kementerian Kesehatan dan dibiayai melalui DIPA serta bantuan *technical assistance* dari beberapa donor. Pada tahun 2014, MAF akan dikembangkan di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur untuk MMR, Kepulauan Riau untuk HIV/AIDS, Bengkulu untuk sanitasi dan Nusa Tenggara Barat untuk pengairan. Bappenas akan menggunakan metodologi MAF untuk program HIV/AIDS di tingkat nasional menggunakan APBN 2014.

Komponen Program 2: Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

Komponen program ini memiliki 3 *outcome*, dimana masing-masing *outcome* memiliki beberapa *output*. Capaian terhadap *output* dan *outcome* pada komponen program 2 didukung oleh 12 proyek UNDP, antara lain:

1. *Strengthening Community Based Forest and Watershed Management Project* (SCBFWM)
2. *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Program* (ATSEA) – regional project
3. *Wind Hybrid Power Generation* (HHyPGen)
4. *Micro-turbine Cogeneration Technology Application Project* (MCTAP)
5. *Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Efficiency Standards and Labeling Project* (BRESL)
6. *Support for Preparation Arrangement for Indonesia Climate Change Trust Fund* (Prep-ICCTF)

7. *National Biodiversity Planning to Support the Implementation of the CBD 2011-2020 Strategic Plan in Indonesia (NBSAP)*
8. *Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resilience of Rural Communities in Nusa Tenggara Timur (SPARC)*
9. *Low Emission Capacity Building (LECB)*
10. *HCFC Phase-Out Management Plan (HPMP)*
11. *Technology Application of Bio Charcoal (BIOCHAR)*
12. *Support to the Establishment of Indonesia REDD + Infrastructure and Capacity.*

- **Kinerja Pencapaian Output**

Pada *outcome* 2.1, dua dari tiga *output* menunjukkan adanya progres pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan. Satu diantaranya telah mencapai target, sementara satu *output* masih belum tercapai. Namun demikian, terdapat satu *output* lainnya, yaitu strategi perlindungan lingkungan dengan fokus pengurangan *Persistent Organic Pollutant* (POP) belum menunjukkan adanya kemajuan.

Dua *output* pada *outcome* 2.2. menunjukkan adanya progres, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada *output* 2.2.2, seluruh indikator telah tercapai kecuali pada indikator presentasi peningkatan alokasi pendanaan efisiensi energi di sektor industri, perdagangan, transportasi dan rumah tangga.

Demikian pula dengan *outcome* 2.3, dimana empat *output* pada *outcome* ini menunjukkan adanya progres, meskipun belum sepenuhnya dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Outcome 2.1. Responsible national institutions and relevant stakeholders are more effective in managing environmental resources and addressing environmental pollution.

Tabel 3.3 Outcome 1 Komponen Program 2

Output	Capaian Saat Ini
<u>Output 2.1.1.</u> <i>Government, private sector and CBO partners have coherent and effective policy frameworks, action plans, implementing arrangement and funding arrangement to sustainably manage terrestrial ecosystems</i>	<i>Significant Progress</i>
<u>Output 2.1.2.</u> <i>Government and multi-stakeholder partners have coherent and effective policy frameworks and action plans to sustainably manage coastal and marine ecosystems</i>	<i>Significant Progress</i>
<u>Output 2.1.3.</u> <i>Strategy and guidelines developed for the protection of the environment, focusing on persistent organic pollutants (POPs) reduction</i>	<i>No progress</i>

Outcome 2.2. Government of Indonesia and key stakeholders (private sector and CBOs) more effective and innovative in promoting, adopting and managing renewable energy (RE) and energy efficiency (EE)

Tabel 3.4 Outcome 2 Komponen Program 2

Output	Capaian Saat Ini
<u>Output 2.2.1.</u> <i>National energy policies and guideline developed and integrated into sub-national development plan</i>	<i>Some progress</i>
<u>Output 2.2.2.</u> <i>Sub-national authorities and key partners are able to implement programmes, mobilize resources and develop public-private partnership for RE/EE, which will contribute to the reduction of national greenhouse gas emission</i>	<i>Significant progress</i>

Outcome 2.3. National institutions and other key stakeholders are coherently and effectively addressing Climate Change (CC) Adaptation and Mitigation and Ozone Layer Protection.

Tabel 3.5 Outcome 3 Komponen Program 2

Output	Capaian Saat Ini
<u>Output 2.3.1.</u> <i>Adequately capacitated institutional mechanism and financing instrument established for REDD+ and corresponding policies and strategies developed and implemented</i>	<i>Some progress</i>
<u>Output 2.3.2.</u> <i>National policies/ guidelines/ strategies and mechanism in place to enable implementation of HCFC reduction programmes with low GWP</i>	<i>Significant progress</i>
<u>Output 2.3.3.</u> <i>Policy and guidelines to integrate climate change adaptation associated with DRR at decentralized level developed with appropriate capacity and resources</i>	<i>Some progress</i>
<u>Output 2.3.4.</u> <i>Coordinated and harmonized financing for climate change (including GEF, AF, SCCF, private sector sources etc.) and ODS phase out through MLF</i>	<i>Significant progress</i>

• **Pembelajaran dari Proyek-Proyek Pada Komponen Program 2**

Dari pelaksanaan proyek-proyek pada komponen program 2, terdapat pembelajaran dan *success stories* yang bermanfaat bagi pembangunan. Beberapa pembelajaran yang diperoleh antara lain:

1. Pemerintah daerah di tingkat provinsi dan Kota/Kabupaten terlibat dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS). Keterlibatan ini menekankan pada pentingnya koordinasi antara SKPD dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS. PP No. 37 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kehutanan No 60 Tahun 2013 menjadi pedoman penyusunan Rencana Pengelolaan DAS, termasuk dalam perencanaan pengelolaan air dan wilayah. Selain itu, kondisi DAS di suatu wilayah dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menganalisis keadaan lingkungan. Kondisi DAS menjadi sebuah *Early Warning System* (EWS) untuk mencegah kerusakan dari bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. SSOP (*System of Standard Operational Procedure*) untuk bencana alam saat ini telah diterapkan di beberapa wilayah seperti Sulawesi Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. SSOP ini telah diterapkan di 176 Kabupaten/Kota yang rawan banjir dan 156 Kabupaten/Kota rawan longsor dengan pembiayaan dari Kementerian Kehutanan.
2. Rekomendasi kebijakan untuk memasukkan Teknologi Kogenerasi sebagai salah satu prioritas teknologi dalam RPJMN 2015-2019 dan mempromosikannya dalam program efisiensi energi nasional. Contoh penerapan teknologi kogenerasi di PLN dalam PLTD/PLTMG/PLTG akan menghemat 13 TWh/tahun (10,1 juta tCO₂ per tahun), adapun penerapan teknologi kogenerasi di sektor industri akan mengurangi konsumsi energi sebesar 13.8 TWh/tahun (10,7 juta tCO₂ per tahun).
3. Formulasi kebijakan dalam standarisasi efisiensi energi dan labelisasi peralatan elektronik sebagai upaya untuk penghematan energi. Sebagai contoh, penggantian pemberat magnetik dengan pemberat elektronik untuk pencahayaan di industri tekstil mampu menghemat 30%-40% energi. Penggantian AC dan lampu yang tidak efisien di Balaikota Makassar mampu menghemat energi sebesar 466,328 kWh/tahun atau Rp 421 juta per tahun.
4. Pembentukan skema pembiayaan untuk pembangkit listrik tenaga angin oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur untuk ditawarkan kepada investor. Selain itu, telah dilakukan kemitraan

pemerintah-swasta untuk pembangkit listrik tenaga angin *off-grid* di Kayong Utara, Kalimantan Barat.

5. Penyelarasan *climate change adaptation* (CCA) dalam RPJMD untuk lima tahun ke depan. Sekretariat Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) juga telah berhasil mengumpulkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) di 33 provinsi. Keberhasilan lain adalah kemitraan dengan PT. SMI untuk proyek WhyPGen.

Komponen Program 3: Peningkatan Tata Kelola yang Demokratis

Komponen program 3 memiliki 3 *outcome* dan beberapa *output*. Proyek UNDP yang mendukung terhadap pencapaian *output* dan *outcome* pada komponen program 3 ini antara lain:

1. *Multi Donor Programme Support to Indonesia's Democratic Election (E-MDP Elections)*
2. *Indonesia Democracy Index (IDI)*
3. *Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)*
4. *Participatory Governance Assessment (PGA)*
5. *Strengthening Access to Justice (SAJI)*
6. *Strengthening Women's Participation and Representation in Governance in Indonesia (SWARGA)*

• Kinerja Pencapaian *Output*

Pada *outcome* 3.1, secara umum keseluruhan proyek menunjukkan adanya progres, meskipun belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pada *outcome* 3.2, sebanyak dua *output* diantara telah menunjukkan kemajuan capaian pada beberapa indikatornya namun belum signifikan yaitu *output* 3.2.1 dan 3.2.2. Sementara itu, dua *output* lainnya telah menunjukkan progres yang signifikan pada hampir semua indikatornya, bahkan pada *output* 3.2.3 target sudah dapat dicapai yaitu finalisasi *roadmap* reformasi birokrasi. Sebanyak 4 provinsi telah berhasil menyusun *roadmap* reformasi birokrasi dan didiseminasikan kepada *stakeholder* terkait. Selain itu masing-masing provinsi juga telah mengalokasikan anggaran untuk implementasi *quickwins* yang direkomendasikan dalam *roadmap*.

Pada *outcome* 3.3, seluruh *output* telah menunjukkan progres yang baik dimana capaian semua indikator pada periode ini sesuai dengan yang ditargetkan. Terdapat satu *ouput* yang sudah tercapai yaitu *output* 3.3.3, provinsi target (Sulawesi Tengah) telah menerbitkan peraturan daerah yang menjelaskan mengenai yurisdiksi dan legitimasi hukum informal (adat) dan sistem hukum formal, selain itu berbagai forum dan pelatihan juga telah dilaksanakan sesuai dengan target.

Outcome 3.1. Increased public representation in political and government institutions particularly among women and vulnerable groups

Tabel 3.6 *Outcome* 1 Komponen Program 3

<i>Output</i>	Capaian Saat Ini
<u><i>Output 3.1.1.</i></u> <i>Key mechanisms e.g. Civic Education Center (CEC) are enhanced to promote citizen participation in democratic governance at the national and sub-national levels, with particular emphasis on women and vulnerable groups</i>	<i>Some progress</i>
<u><i>Output 3.1.2</i></u> <i>National programme for the advancement of women in politics and government established and implemented</i>	<i>Some progress</i>

<i>Output</i>	<i>Capaian Saat Ini</i>
<u>Output 3.1.3</u> Consolidation of Democracy Facility (CDF) in established and supports the Gol in (a) managing a trust fund from development partners and (b) coordinating and measuring the impact of partners activities on democratic consolidation	Some progress
<u>Output 3.1.4.</u> Participatory assessment tool to measure the level of democracy (national and provincial levels) produced and utilized for social and political development planning processes	Some progress

Outcome 3.2. Strengthened institutional capacity of provincial governance in achieving objective of decentralization policy in more accountable, responsive and effective way

Tabel 3.7 Outcome 2 Komponen Program 3

<i>Output</i>	<i>Capaian Saat ini</i>
<u>Output 3.2.1</u> Resources put in place to support the refinement of policies and regulatory framework for administrative reform (organization, business process and human resources), decentralization and local governance.	Significant progress
<u>Output 3.2.2</u> Improved public services delivery through the refinement and implementation of Minimum Service Standard (MSS) and improved functioning of public complaints and control mechanisms (PCM) in the province.	Some progress
<u>Output 3.2.3.</u> Provincial civil service reform initiated to support strategic development planning and implementation of MSS in target areas.	Significant progress
<u>Output 3.2.4</u> Improved public service delivery through a successful transfer of reconstruction assets, knowledge sharing on decentralization and alternative financing mechanism such as the South-south cooperation modalities.	Some progress

Outcome 3.3. Justice providers and institutions are more effective in protecting human rights, and citizens enjoy improved access to justice

Tabel 3.8 Outcome 3 Komponen Program 3

<i>Output</i>	<i>Capaian Saat ini</i>
<u>Output 3.3.1</u> Level of progress in the implementation of key strategies within the National Strategy on Access to Justice (NSA2J).	Significant progress
<u>Output 3.3.2</u> State agencies mandated with legal aid provision (BPHN) and public complaint and grievance handling mechanisms (Komnas HAM, Ditjen HAM, OMBUDSMAN, and Komisi Yudisial) have adequate financial and human resources, technical expertise and effective mechanisms to provide legal aid services for and to address complaints by citizens, particularly the poor and the marginalized.	Significant progress
<u>Output 3.3.3.</u> Mechanisms established to assist informal justice providers in target provinces to enhance access of the poor to justice, particularly for women and vulnerable groups.	Significant progress

• Pembelajaran dari Proyek-Proyek Pada Komponen Program 3

Beberapa pembelajaran dari komponen program 3 yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan antara lain:

1. Pada program *Elections MDP*, telah diselenggarakan *Workshop* Nasional Komitmen Kebangsaan yang melahirkan rekomendasi dan *concept note* untuk pendidikan sipil dalam RPJMN 2015-2019. Acara ini menghadirkan beberapa figur penting seperti Komarudin Hidayat, Yudi Latief, Bambang Widjojanto, Hassan Wirajuda, Emil Salim, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Selain itu, melalui *Elections MDP*, juga dihasilkan *Coordination*

Democracy Facility Grand Design yang akan digunakan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas untuk mengkoordinasikan pemangku kepentingan dalam menghasilkan perencanaan dan pengembangan program-program sektor politik dan demokrasi di Indonesia. Program-program pengembangan demokrasi ini dapat diakses melalui situs www.kordinasihibahuntukdemokrasi.org.

2. Dalam proyek IDI, Pemerintah Indonesia telah berhasil melahirkan Laporan Indeks Demokrasi Indonesia dan telah dimasukkan dalam RPJMN 2010-2014. Target pencapaian indeks demokrasi di Indonesia adalah 73, dengan *baseline* nilai 67,3 pada tahun 2009. Selain itu, telah dibentuk IDI *Provincial Working Group* (PWG) di 33 provinsi di Indonesia. Beberapa provinsi juga telah memberikan dukungan pendanaan untuk IDI dalam APBD, seperti Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur. Laporan IDI dapat diakses oleh media dan masyarakat untuk mengakses perkembangan demokrasi di Indonesia.
3. Melalui proyek SWARGA, sembilan modul mengenai pendidikan sipil dengan perspektif *gender* telah diluncurkan. Modul ini diharapkan untuk dapat digunakan dalam pelatihan kelompok masyarakat agar dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, pelatihan untuk calon anggota legislatif perempuan juga telah dilaksanakan pada tahun 2013 dan diharapkan untuk dapat dilanjutkan di tahun 2014. Materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut adalah mengenai sistem dan tahapan pemilu serta strategi kampanye yang efektif.
4. Kesuksesan implementasi *quick wins* reformasi birokrasi dengan menggunakan anggaran dari pemerintah daerah (APBD) di daerah Gorontalo, Aceh, dan NTT yang dapat diwujudkan karena komitmen kuat dari pejabat pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian dalam melaksanakan roadmap reformasi birokrasi di daerah lain, strategi tersebut dapat direplikasi.
5. Selain keberhasilan dalam implementasi roadmap reformasi birokrasi, pelaksanaan hibah UNDP juga berhasil meningkatkan kapasitas pemerintah lokal dalam perencanaan dan penganggaran melalui pengenalan *Pro Poor, Planning, Budgeting and Monitoring* (P3BM) dan *Provincial Human Development Report* (PHDR). Pengenalan P3BM dan PHDR tersebut merupakan titik awal meningkatnya kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya data yang valid dan *reliable* untuk perencanaan pembangunan yang efektif. Selain itu, disadari juga bahwa pemerintah daerah perlu memperkaya *tools* dalam perencanaan dan penganggaran.
6. Kesuksesan Implementasi *Public Control and Complaint Mechanism* (PCM). Kesuksesan dalam implementasi PCM pada 3 daerah pilot dengan *support* dari UNDP dan bekerjasama Ombudsman telah mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2013. Peraturan tersebut mewajibkan seluruh pelayanan publik untuk membangun dan melaksanakan sistem PCM yang serupa. Dengan adanya peraturan ini diharapkan kualitas pelayanan publik dapat meningkat.
7. Kesuksesan dalam Transformasi Peradilan Adat di Aceh. Hukum/peradilan adat merupakan salah satu alternatif paling realistis bagi masyarakat miskin yang mencari keadilan. Dengan dukungan dari UNDP, peradilan adat di Aceh telah berhasil ditransformasi menjadi lebih akuntabel dan adil terutama terhadap kaum perempuan. Hasil survey menunjukkan kepuasan masyarakat Aceh meningkat signifikan terhadap proses dan hasil dari peradilan adat setelah dilakukan transformasi. Keberhasilan ini akan direplikasi di 2 provinsi lainnya yaitu Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah.



Gambar 3.1 Rumah Sakit Mengadopsi *Public Complaint Mechanism* (PCM)

Komponen Program 4: Penanggulangan Krisis dan Pemulihan

Komponen program 4 pada CPAP UNDP mencakup Penanggulangan Krisis dan Pemulihan. Komponen program ini memiliki 3 *outcome* dimana masing-masing *outcome* memiliki beberapa *output*. Terdapat 4 proyek yang berkontribusi terhadap pencapaian *output* dan *outcome* pada komponen program ini, antara lain:

1. *Peace Through Development in Disadvantaged Areas* (PTTDA)
2. *Disaster Risk Reduction based Rehabilitation and Reconstruction* (DR4)
3. *Tsunami Recovery Waste Management Programme* (TRWMP)
4. *Safer Communities through Disaster Risk Reduction Phase II* (SCDRR-II)

• **Kinerja Pencapaian *Output***

Dari 3 *output* yang harus dicapai pada *outcome* 4.1, dua *output* diantaranya telah menunjukkan progres yang sangat baik yaitu *output* 4.1.1 dan *output* 4.1.3. Hampir semua indikator pada kedua *output* tersebut telah menunjukkan progres capaian yang signifikan. Namun, pada *output* 4.1.2 terdapat indikator yang tidak dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan yaitu pelaksanaan forum peringatan dini dan pencegahan konflik multi *stakeholder*. Namun, kegiatan tersebut direncanakan akan tetap dilaksanakan meskipun tertunda sampai periode berikutnya.

Pencapaian *output* pada *outcome* 4.2 sebagian besar sudah baik, hal ini ditunjukkan dengan progres capaian indikatornya yang cukup signifikan sesuai dengan yang direncanakan. Namun terdapat satu *output* yang capaiannya masih rendah yaitu *output* 4.2.4. Hal ini disebabkan salah satu indikator pada *output* tersebut tidak dapat mencapai target pada periode ini yaitu pengenalan *Post Conflict Need Assessment* (PCNA) untuk konteks Indonesia.

Sementara pada *outcome* 4.3, kinerja pencapaian terhadap *output* menunjukkan capaian yang kurang memuaskan. Hal ini ditandai dengan pencapaian *output* yang menunjukkan posisi yang sama dengan periode sebelumnya.

Outcome 4.1. GOI and civil society are more effective in identifying & managing conflict and their impact within Indonesia's communities

Tabel 3.9 *Outcome* 1 Komponen Program 4

<i>Output</i>	Capaian Saat ini
<u><i>Output 4.1.1</i></u> <i>Policy and regulatory framework for conflict prevention established at national level and in target areas</i>	<i>Significant progress</i>
<u><i>Output 4.1.2</i></u> <i>Institutional system for conflict prevention established at national level and in target areas</i>	<i>Some progress</i>

Output	Capaian Saat ini
<u>Output 4.1.3.</u> Communities are able to implement conflict prevention and social cohesion initiatives utilizing tools and mechanisms that enhance their safety and well-being.	Significant progress

Outcome 4.2. GOI and communities capacity to respond to and recover from disasters and conflicts is more effective and timely

Tabel 3.10 Outcome 2 Komponen Program 4

Output	Capaian Saat ini
<u>Output 4.2.1</u> Sustainable post-crisis recovery regulatory framework, incorporating cross cutting principles of 'Do No Harm', 'Build Back Better', gender, environmental sustainability and good governance is applied	Significant progress
<u>Output 4.2.2</u> Indonesia-adapted post crisis recovery methodologies are prescribed and utilized	Some progress
<u>Output 4.2.3.</u> Government-led institutional arrangement, involving relevant multi-stakeholders, to undertake post crisis recovery strengthened	Significant progress
<u>Output 4.2.4.</u> Field application of Recovery Framework with feedback mechanism in place	Significant progress

Outcome 4.3. GOI and communities have minimized the risk of adverse impacts of disasters, through the application of DRR policies, regulations and practices

Tabel 3.11 Outcome 3 Komponen Program 4

Output	Capaian Saat ini
<u>Output 4.3.1</u> National and local governments policy and regulatory enabling framework for DRR in target areas designed and implemented	Some progres
<u>Output 4.3.2</u> DM agencies in target areas are effectively functioning and utilize risk assessment for DRR initiatives in partnership with multilateral stakeholder DRR fora	No Change
<u>Output 4.3.3.</u> DRR principles and techniques to minimize disaster risk are adopted and applied by communities	No Change

- **Pembelajaran dari Proyek-Proyek Pada Komponen Program 4**

Salah satu keberhasilan dalam pencapaian pada komponen program 4 adalah penyusunan kurikulum mengenai perdamaian dan manajemen konflik untuk pegawai pemerintah. Kurikulum tersebut akan menjadi salah satu materi dalam pelatihan yang akan memberikan *skill* kepada pegawai pemerintah dalam membangun perdamaian dan mentransformasi konflik dalam aktivitas pekerjaan setiap hari. Pemerintah daerah juga dapat mengadopsi metode tersebut untuk pencegahan konflik di daerah. Keberhasilan lain pada outcome ini adalah telah tersusunnya petunjuk untuk kerangka kerja pencegahan konflik (*Conflict Prevention Framework/CPF*) serta sistem peringatan dan respon dini terhadap konflik (*Conflict Early Warning and Early Response System/CEWERS*). Saat ini keputusan presiden mengenai implementasi CPF pada tingkat nasional dan sub-nasional sedang dipersiapkan, sementara itu implementasi CEWERS sudah diatur dalam UU No.7/2012.



Gambar 3.2 Perdamaian dan Manajemen Konflik
Sumber: CPAP Review, 2014

Hal lain yang dapat menjadi pembelajaran antara lain berkaitan dengan penanggulangan bencana alam, diantaranya penggunaan pendekatan *Post-disaster Needs Assessment (PDNA)*, saat ini *guidelines* untuk penggunaan pendekatan tersebut juga telah berhasil disusun. Selain itu, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi saat ini juga sedang disusun. Mekanisme monitoring juga telah berhasil disusun salah satunya dengan menggunakan Indeks Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Index*) sebagai salah satu alat untuk memonitor kondisi wilayah pasca bencana. Begitu juga dengan mekanisme pemulihan pasca bencana telah berhasil disusun dan diatur dalam Peraturan kepala BNPB Nomor 14/2011. Keberhasilan lainnya adalah penyusunan model desa tangguh bencana (*resilience village model*) dan telah dilaksanakan pada 106 desa oleh BNPB.



Gambar 3.3 Desa Tangguh Bencana
Sumber: CPAP Review, 2014

HIBAH PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT

Program Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact

Millennium Challenge Corporation (MCC) adalah institusi independen Pemerintah AS yang menyalurkan bantuan dengan misi penurunan angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. MCC menyalurkan hibah kepada negara mitra dalam bentuk program MCC *Threshold* dan MCC *Compact*. MCC *Threshold* Program merupakan program untuk memfasilitasi peningkatan beberapa indikator yang merupakan syarat kelulusan mutlak bagi negara mitra untuk dapat berpartisipasi dalam MCC *Compact* Program.

Compact Grant Agreement untuk Indonesia telah ditandatangani tanggal 19 November 2011 dan mulai efektif sejak tanggal 2 April 2013 dan akan berlaku sampai dengan 1 April 2018 (tidak dapat diperpanjang lagi).

Tabel 3.12 Gambaran umum Hibah Program MCC Compact

Gambaran Umum		
Instansi Penanggung jawab	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	
Sumber Dana	<i>Millennium Challenge Corporation</i> (MCC)	
Waktu Efektif	2 April 2013 – 1 April 2018 (5 Tahun)	
Nilai Hibah	USD 600.000.000	
		<i>Implementing Entity</i>
Komponen kegiatan	<i>Green prosperity</i>	KemenPPN/Bappenas
	<i>Community-based Health and Nutrition</i>	Kementerian Kesehatan
	<i>Procurement modernization</i>	LKPP

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Hibah Program MCC Compact sebesar USD 600 juta untuk membiayai komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 3.13 Komponen Pembiayaan Program MCC Compact

No.	Komponen	Nilai (USD)	Persentase (%)
1	<i>Green Prosperity</i>	332.500.000	55,40
2	<i>Community-based Nutrition</i>	131.500.000	22,00
3	<i>Procurement Modernization</i>	50.000.000	8,00
4	<i>Administration and Control</i>	75.800.000	12,60
5	<i>Monitoring and Evaluation</i>	10.200.000	2,00
Total		600.000.000	100,00

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

1. Kinerja Pelaksanaan

Dana Hibah senilai USD 600 juta dipergunakan untuk membiayai kegiatan dengan tingkat penyerapan sebagai berikut:

Tabel 3.14 Penyerapan Program MCC Compact

No.	Kegiatan	Jumlah (USD)	Penyerapan (s/d 28 Februari 2014)	
			USD	%
1	<i>Green Prosperity Project</i>	332.500.000	160.617,55	0,05
2	<i>Community-based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project</i>	131.500.000	22.479.105,00	17,09
3	<i>Procurement Modernization Project</i>	50.000.000	700.012,064	1,40
4	<i>Monitoring & Evaluation</i>	75.800.000	-	0,00
5	<i>Administration and Control</i>	10.200.000	6.420.299,93	8,47
Total		600.000.000	29.760.035,12	4,96

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Kemajuan dan perkembangan Program Compact sampai dengan Maret 2014:

- ***Green Prosperity Project***
 - a. Pada tahun pertama (April 2013- April 2014), GP Project merampungkan kajian awal proyek (*District Readiness Assessment* dan Pra FS 8 model projects), serta menyiapkan sistem dan struktur organisasi pelaksana proyek, yang mencakup rekrutmen staf dan konsultan, penyusunan *draft operation manual* dan lain-lain.
 - b. Saat ini MCA-Indonesia sedang melakukan finalisasi *Operation Manual* (*Grant Window* dan *Commercial Window*). Diharapkan pada bulan Mei 2014 sudah dilakukan *Call for Proposal* atau memasukkan usulan proyek *Green Prosperity* dari masyarakat.
 - c. Sudah diidentifikasi 8 tipologi proyek di 4 Kabupaten (Merangin, Muaro Jambi, Mamuju, Mamasa).
 - d. Perluasan lokasi proyek *Green Prosperity* dari 4 Kabupaten starter menjadi 13 Kabupaten di 4 Provinsi. Saat ini 6 Kabupaten telah menandatangani MoU dengan MCA-Indonesia dan 7 Kabupaten baru lainnya direncanakan akan menandatangani MoU pada bulan April ini.

- ***Community-based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project***
 - a. Lokasi proyek atau program meliputi 5,294 desa di 499 kecamatan pada 64 Kabupaten yang terletak di 11 Provinsi.
 - b. MCA-Indonesia bersama tim koordinasi PNPM Generasi sudah menyelesaikan pengembangan modul fasilitator PNPM Generasi Sehat dan Cerdas untuk kegiatan *Demand Side* (Pemberdayaan Masyarakat). Modul sudah mulai digunakan pada TOT Fasilitator pada akhir Maret.
 - c. MCA-Indonesia mengawali pelatihan konseling PMBA (Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak) pada bulan Maret 2014, dengan target sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 112 petugas Kabupaten, 4,771 Bidan Desa, 9,542 Kader Posyandu.

- ***Procurement Modernization Project***
 - a. Telah ditandatangani MoU untuk 29 ULP (Unit Layanan Pengadaan) Percontohan antara Kepala Daerah dan Instansi dengan Kepala LKPP. Sampai dengan April 2018 target 100 ULP Percontohan harus tercapai.
 - b. MCA-Indonesia sedang memfinalisasi Modul Pelatihan SDM dan direncanakan pelatihan pertama dimulai pada bulan April 2014 dengan target peserta pelatihan sebanyak 500 orang hingga 2018.

- c. MCA-Indonesia telah menyelenggarakan Lokakarya *Maturity Model* dan menghasilkan model pengembangan ULP untuk selanjutnya dilaksanakan mentoring terhadap 29 ULP Percontohan.

2. Rencana Tindak Lanjut

MWA MCA-Indonesia akan meminta Direktur Eksekutif MCA-Indonesia beserta jajarannya untuk:

- a. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan penyerapan yang hingga saat ini baru mencapai 4,96% dari USD 600 juta mengingat waktu pelaksanaan tinggal 4 (empat) tahun lagi;
- b. Segera menyelesaikan dokumen *Operation Manual (Grant Window and Commercial Window)* sebagai syarat pelaksanaan *Green Prosperity Project*
- c. Segera menandatangani MoU antara MCA-Indonesia dengan 18 kabupaten perluasan dari total 24 kabupaten di 10 Provinsi rencana lokasi *Green Prosperity Project*;
- d. Segera menyelesaikan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak untuk Program *Compact*;
- e. Segera menyelesaikan usulan revisi PMK 124/2012 berkenaan dengan mekanisme pencairan dan penyaluran dana untuk skema hibah dan skema komersial dari *Green Prosperity Project*;
- f. Menyelesaikan struktur organisasi dan staffing agar kegiatan *Compact* berjalan optimal.

Satker Pengelola Hibah MCC TW I Tahun 2014

1. Kinerja Pelaksanaan

DIPA Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC Tahun Anggaran 2014 telah diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp 260.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pagu Rupiah Murni sebesar Rp 10.000.000.000,00
- b. Pagu Hibah Langsung Luar Negeri Rp 250.000.000.000,00

Pencapaian kinerja *output* pelaksanaan *Program Implementation Agreement-Grant Agreement* MCC sampai dengan Triwulan I tahun 2014, Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC telah mengesahkan dana hibah sebesar Rp 12.897.882.449,00 (5,15%) dari Rp 250.000.000.000,00 dana hibah yang dialokasikan pada tahun 2014 dalam bentuk SPHL sebagai berikut:

Tabel 3.15 Pengesahan Hibah Langsung *Program Implementation Agreement-Grant Agreement* MCC TW I Tahun 2014

No.	Tanggal	Nomor SPHL	Nilai SPHL (Rp)	Komponen	Nilai per Komponen (Rp)
1	6 Maret 2013	10001T/966009/2014	12.897.882.449	Pembayaran Belanja Barang	12.897.882.449

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Penyerapan yang dicapai pada TW I untuk Rupiah Murni (RM) Satker pengelola Hibah MCC senilai Rp 2.066.981.107 (20,67%) dari total anggaran sebesar Rp 10.000.000.000 pada tahun 2014. Untuk penyerapan Komponen Hibah pada TW I senilai 12.897.882.449 (5,16%) dari total anggaran sebesar Rp 250.000.000.000 pada tahun 2014. Dengan demikian Penyerapan total Rupiah Murni dan Komponen Hibah mencapai Rp 14.964.863.556 atau 5,76% dari total Rp 260.000.000.000 di tahun 2014.

Tabel 3.16 Penyerapan Anggaran Satker Pengelola Hibah MCC TW I Tahun 2014

No.	Komponen	Total Anggaran	Penyerapan (s.d. 31 Maret 2014)			
			Target	(%)	Realisasi	(%)
1	Rupiah Murni (RM)	10.000.000.000	3.143.986.364	31,44	2.066.981,107	20,67
2	Hibah	250.000.000.000	25.000.000.000	10,00	12.897.882.449	5,16
Total		260.000.000.000	28.143.986.364	10.82	14.964.8633.556	5.79

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

Rendahnya penyerapan anggaran pada TW I untuk Rupiah Murni (RM) disebabkan karena kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mendukung kegiatan Program Compact terhambat karena menunggu revisi anggaran yang diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Sementara untuk Komponen Hibah, rendahnya tingkat penyerapan disebabkan sebagai berikut:

- Kegiatan GP yaitu PLUP *activities*, *Technical Assistance & Oversight Activities*, dan *Green Knowledge activities*, berstatus **masih tahap persiapan**.
- Kegiatan *Procurement Modernization* yaitu Kegiatan Profesionalisasi Pengadaan dan Kegiatan Pengembangan Prosedur dan Kebijakan, berstatus **program belum berjalan**.
- Kegiatan *Community Based Health and Nutrition* yaitu Penguatan Penyedia Pelayanan, Kampanye Perubahan Perilaku, Monitoring & Evaluasi, berstatus **masih tahap permulaan**.
- Kegiatan Monev untuk baseline survey, pengembangan *design* monitoring-evaluasi dan dampak dari *Program Compact*, berstatus **program belum berjalan**.

2. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil diskusi dengan Karo Renortala mengenai Alokasi Anggaran Hibah MCC pada Tahun 2014, jika pada akhir TW II masih belum ada perkembangan yang signifikan untuk kegiatan *Program Compact* maka akan didiskusikan kembali apakah alokasi Komponen Hibah akan tetap sebesar Rp 260.000.000.000.- atau akan diturunkan sesuai dengan hasil diskusi lebih lanjut.

Tabel 3.17 Rencana Penyerapan Anggaran Hibah Satker Pengelola Hibah MCC TW I Tahun 2014

No	Komponen	Total Anggaran	TW II (Apr – Jun 2014)		TW III (Jul – Sept 2014)		TW IV (Okt – Des 2014)	
			Target	%	Target	%	Target	%
1	Rupiah Murni (RM)	10.000.000.000	2.362.542.726	23,63	2.218.295.455	22,18	2.218.295.455	22,18
2	Dana Hibah	250.000.000.000	25.000.000.000	10,00	50.000.000.000	20,00	150.000.000.000	60,00
Total		260.000.000.000	25.236.542.726	9,71	52.218.295.455	20,08	152.218.295.455	58,55

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2014 (diolah)

BAB IV

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI

Domestic Gas Market Development Project (4810-IND)

Domestic Gas Development Project bertujuan untuk memperluas penggunaan bahan bakar gas di area Jawa Barat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan mengurangi polusi dengan cara mengganti bahan bakar yang lebih mahal dan menyebabkan tingkat pencemaran yang lebih tinggi (misalnya diesel, bahan bakar minyak dan batu bara) dengan bahan bakar gas.

Tabel 4.1 Profil *Domestic Gas Development Project*

Kode Loan	4810-IND
Nama Proyek	<i>Domestic Gas Market Development Project</i>
Instansi Penanggung Jawab	PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Nilai Pinjaman	USD 69,38 juta
Masa Laku Pinjaman	08 Mei 2006 s.d 31 Oktober 2013

Capaian *Project Development Objectives* dan *Intermediate Result*

- ***Project Development Objectives (PDO)***

Hasil evaluasi akhir proyek menunjukkan bahwa proyek berhasil mencapai PDO dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pencapaian seluruh indikator PDO yang melampaui target diantaranya jumlah penjualan gas, jumlah pelanggan yang beralih ke gas dan juga pengurangan polusi udara.

- ***Intermediate Result***

Selama pelaksanaan proyek terdapat beberapa perubahan pada indikator PDO baik dari aspek pembiayaan maupun targetnya. Hal ini karena beberapa indikator sangat tergantung pada dinamika pasar dan konsumen, meskipun demikian sebagian besar indikator *intermediate result* telah berhasil dicapai.

a. Part A: Infrastruktur Distribusi Gas

Part A terdiri dari instalasi jaringan pipa gas (*Banten supply mains, Banten reticulation mains, the Greater Jakarta main line dan the Greater Jakarta reticulation mains*), *off take station*, dan instalasi sistem SCADA.

Instalasi jaringan pipa gas yang berhasil diselesaikan dengan pendanaan dari pinjaman Bank Dunia adalah *Banten supply mains, Banten reticulation mains* dan *the Greater Jakarta main line*, dengan jumlah total 123 km, sedangkan *the Greater Jakarta reticulation mains* dipindahkan pendanaannya dari *loan* menjadi pendanaan dari PT. PGN. Total jaringan pipa yang berhasil dibangun dengan menggunakan dana PT. PGN mencapai 256 km.

Off take station (control station) terdiri dari: i) lima MRS (Meter Regulating Stations) yang berlokasi di Banten (Cikande, Bitung 2, Bitung 3), Karawang (Walaha) dan Bogor (Cimanggis); dan ii) dua *regulating station* di Cikupa dan Bitung 2. Baik MRS maupun *regulating station* telah berhasil diselesaikan.

Sistem SCADA didesain untuk memungkinkan operator dalam melakukan monitoring dan kontrol terhadap fungsi dan proses penting melalui sistem telekomunikasi antara *master control station* dengan *station* lainnya. Hal ini diperlukan untuk mengatur bisnis dan transaksi gas di jaringan distribusi Jawa Barat. Pada tahun 2011, manajemen PT. PGN meminta untuk

mengalihkan pendanaan instalasi sistem SCADA dari porsi *loan* menjadi pendanaan dari PT. PGN. Meskipun demikian instalasi sistem SCADA telah selesai dilaksanakan pada bulan November 2013.

b. Part B: Penguatan Kapasitas Institusi

Kegiatan pada Part B berupa peningkatan kapasitas PT. PGN dalam manajemen keuangan, perencanaan infrastruktur, pemanfaatan dan pemasaran gas, keamanan sistem distribusi gas, serta transmisi gas. Selain itu pada komponen ini juga dilakukan penyusunan rekomendasi berupa *framework* metode penghitungan harga/tarif gas dan *framework* untuk akses pihak ketiga terhadap jaringan gas Indonesia (*open access framework*).

Dalam rangka meningkatkan kapasitasnya dalam perencanaan dan operasional sistem distribusi gas, PT. PGN bekerjasama dengan *Tokyo Gas Engineering & Proys Consortium* sebagai konsultan untuk menyediakan *Long Term Collaboration Services (LTCS)*. LTCS tersebut mencakup 7 aspek yaitu i) *engineering and planning*, ii) *operation and integrity management system*, iii) *quantitative risk assessment*, iv) *gas transmission*, v) *review of IT requirement*, vi) *risk management* dan vii) *training*. Semua kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan dan memberikan manfaat yang sangat besar dalam peningkatan kualitas SDM PT. PGN.

Untuk akses pihak ketiga terhadap jaringan gas, semua jalur transmisi gas PT. PGN terbuka untuk diakses pihak ketiga, saat ini PT. PGN telah mengimplementasikan akses pihak ketiga untuk lebih dari 2.045 Km jaringan pipa transmisi dan mendirikan PT. Transportasi Gas Indonesia (TGI) sebagai "*transporter*" untuk segmen Grissik-Duri dan Grissik-Singapura. Sementara itu, *framework* untuk metode penetapan tarif gas telah selesai disusun dan disampaikan kepada BPH Migas untuk ditindaklanjuti.



Gambar 4.1 Lokasi Domestic Gas Market Development Project

Sumber: PT. PGN, 2014

Pembelajaran Domestic Gas Market Development Project

- Pembelajaran selama proses perencanaan:

- a. Status ijin prinsip harus dipenuhi sebelum proses pelelangan dan dicantumkan ke dalam dokumen lelang, begitu juga dengan proses pengadaan tanah sebaiknya sudah selesai secara fisik maupun administrasi. Permasalahan perijinan tersebut sangat menghambat pelaksanaan pekerjaan.

- b. *Conceptual design* dan *Overall Plan* harus disusun dengan matang sebelum proses lelang dan telah mengadopsi perkembangan teknologi. Dalam pelaksanaan proyek yang tergantung pada dinamika pasar hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan.
 - c. *Detail soil investigation* harus dilaksanakan sebelum proses lelang dan hasil investigasi tersebut dicantumkan di dalam dokumen lelang. Hal ini penting karena selama pelaksanaan banyak infrastruktur eksisting (dibawah permukaan tanah) yang tidak sengaja rusak karena tidak adanya investigasi sebelumnya.
 - d. Detail investigasi mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan proyek harus sudah jelas sebelum proses lelang.
 - e. Diperlukan adanya persyaratan teknis dan administrasi dalam dokumen lelang yang relevan dengan kondisi lapangan.
- **Pembelajaran selama proses pelaksanaan:**
 - a. Memberdayakan potensi sumber daya lokal akan memberikan nilai lebih bagi peningkatan kualitas kontraktor lokal.
 - b. Material utama dan *long lead item* sebaiknya disediakan oleh PGN. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas material dan juga untuk efisiensi waktu.
 - c. Penerapan proses kepabeanaan dengan penggunaan mekanisme *master list* terbukti lebih cepat dan mudah.
 - d. Diperlukan percepatan persetujuan lender terhadap tahapan-tahapan lelang untuk menghindari keterlambatan jadwal pelaksanaan proyek dan timbulnya klaim atas eskalasi harga.
 - **Pembelajaran Pascapelaksanaan:**
 - a. Menerapkan prinsip *safety first* dalam setiap tahapan pekerjaan sangat penting agar tidak menimbulkan permasalahan pada saat pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan proyek.
 - b. Penerapan integritas jaringan terbukti dapat meningkatkan kehandalan jaringan.
 - c. Penerapan sistem SCADA pada jaringan distribusi gas terbukti dapat membuat fungsi monitoring dan kontrol terhadap jaringan distribusi gas menjadi lebih mudah , efektif dan efisien.

Tabel 4.2 Manfaat dari Proyek *Domestic Gas Market Development Project*

No	Hasil /Manfaat dari Proyek	Upaya untuk Menjaga Keberlanjutan/ dan Memperluas Rentang Manfaat
1.	Jumlah penjualan dan pelanggan meningkat seiring dengan penguatan jaringan penyaluran gas di Jawa Bagian Barat .	Dengan infrastruktur gas yang handal khususnya di Jawa Barat, diperlukan kontinuitas pasokan gas.
2.	Membantu pengembangan daerah industri baru.	Dukungan pemerintah atas upaya PGN dalam mengembangkan infrastruktur gas bumi.
3.	Mendukung program pemerintah dalam konversi BBM ke bahan bakar gas.	Dukungan pemerintah dalam upaya PGN mengembangkan <i>city gas</i> dan SPBG.
4.	Mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca.	Sosialisasi kepada masyarakat bahwa gas bumi adalah energi yang bersih dan ramah lingkungan.
5.	Efisiensi utilisasi gas dengan penerapan sistem SCADA.	Maintenance peralatan secara rutin dan pengoperasian sesuai SOP.

Sumber: Hasil Diskusi Identifikasi Pembelajaran Proyek Bank Dunia, 7 Maret 2014

Rural Infrastructure Support to PNPM-II/RIS-PNPM II (2575-INO)

Proyek RIS-PNPM II bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang tercantum dalam RPJM Nasional dan SNPK. Pendekatan pelaksanaan kegiatan RIS PNPM Mandiri II menggunakan pendekatan pembangunan berbasis *Community Driven Development* yaitu pemberdayaan masyarakat untuk menyusun prioritas kegiatan/proyek, merencanakan, dan melaksanakan sendiri kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proyek yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum ini berlaku sejak 1 Februari 2010 dan berakhir pada 31 Desember 2013 dengan jumlah pinjaman sebesar USD 84,2 juta.

Adapun keluaran utama (*output*) untuk kegiatan ini adalah:

1. Peningkatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat
2. Peningkatan layanan dan infrastruktur desa
3. Peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program.

Tabel 4.3 Profil Proyek *Rural Infrastructure Support to PNPM-II*

Kode Loan	2575-INO
Nama Proyek	<i>Rural Infrastructure Support to PNPM-II</i>
Instansi Penanggung Jawab	Kementerian Pekerjaan Umum
Nilai Pinjaman	USD 84,2 juta
Masa Laku Pinjaman	01 Februari 2010 s.d 31 Desember 2013

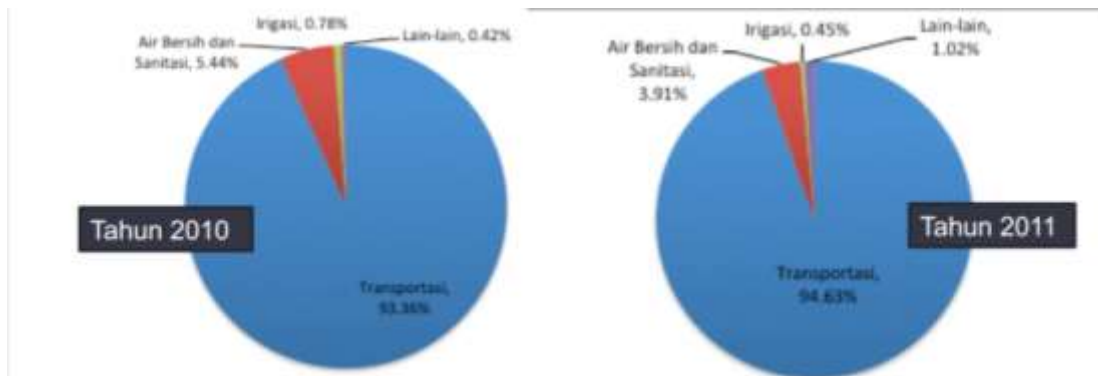
Lingkup kegiatan RIS-PNPM adalah 1500 Desa di 215 Kecamatan di 37 Kabupaten di 4 Provinsi yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Jambi dan Riau. Namun karena penguatan nilai tukar USD terhadap Rupiah di TA 2011, maka 1393 Desa didanai melalui dana pinjaman dan 107 desa dibiayai melalui APBN-P 2011.

Dalam rangka peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kapasitas para pelaku program serta masyarakat penerima manfaat, dilakukan beberapa kegiatan *workshop* dan *training* di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 *Workshop dan Training* Proyek *Rural Infrastructure Support to PNPM-II*

No.	Kegiatan	Sumber Pembiayaan	Tahun Pelaksanaan		
			2010	2011	2012
1	Sosialisasi di tingkat Pusat dan Provinsi	APBN	√	√	
2	Pelatihan Fasilitator	APBN	√	√	
3	Pelatihan OMS	APBN	√	√	
4	<i>Training of trainer</i> Pelatihan OMS dan KPP	APBN	√	√	√
5	Pelatihan KPP	<i>Loan</i> 2575-INO	√	√	√
6	<i>Workshop</i> dan Pelatihan PPIU dan Satker	<i>Loan</i> 2575-INO	√	√	
7	Sosialisasi Nasional Penguatan Pemda dan Integrasi Perencanaan	<i>Loan</i> 2575-INO			√
8	Sosialisasi Regional Penguatan Kelembagaan dan Integrasi Perencanaan	<i>Loan</i> 2575-INO			√
9	<i>Workshop</i> Pengembangan RIS-PNPM	<i>Loan</i> 2575-INO			√
10	<i>Exit</i> Strategi RIS-PNPM	<i>Loan</i> 2575-INO			√

Terkait pembangunan infrastruktur, sebagian besar dana yang dikelola oleh masyarakat digunakan untuk membangun sektor transportasi. Setidaknya 90% dana digunakan untuk membangun sektor transportasi, adapun sisanya digunakan untuk membangun sanitasi dan irigasi.



Gambar 4.2 Infrastruktur Terbangun Tahun 2010 dan Tahun 2011

Tabel 4.5 Jenis Infrastruktur Terbangun Tahun 2010 dan Tahun 2011

Jenis Infratraktur	2010		2011		2010 – 2011	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Transportasi	359.476.219.795	93,36	286.954.497.283	94,60	646.430.717.078	93,92
Air Bersih dan Sanitasi	20.938.463.991	5,44	11.846.406.321	3,90	32.784.870.312	4,76
Irigasi	2.985.175.895	0,78	1.357.582.321	0,40	4.342.758.216	0,63
Lain-lain	1.630.751.086	0,42	3.091.616.053	1,00	4.722.367.139	0,69
TOTAL	385.030.610.767		303.250.101.978		688.280.712.745	

Melalui dana tersebut, telah dilakukan pembangunan/perbaikan jalan akses sepanjang 1.800 km, jalan setapak sepanjang 1.450 km, pembuatan/perbaikan 2.750 unit jembatan, pembuatan saluran drainase sepanjang 309.148 meter, dan pembuatan tambatan/dermaga perahu sebanyak 61 unit. Selain itu, telah dilakukan juga pembangunan 521 unit MCK, pembuatan bak penampung air bersih sebanyak 456 unit, pemasangan jaringan pipa air bersih sepanjang 35.455 meter, serta pembuatan sumur bor sebanyak 259 unit dan sumur gali sebanyak 1.213 unit. Demikian halnya di sektor irigasi, telah dibangun pembangunan saluran irigasi sepanjang 13.000 meter dan normalisasi aliran sungai sepanjang 2.454 meter serta pembuatan bangunan pendukung sistem irigasi sebanyak 6 unit.

Kualitas infrastruktur yang dibangun telah dievaluasi pada tahun 2012. Hasil evaluasi menunjukkan kualitas teknis infrastruktur yang dibangun sudah cukup baik dan telah memberikan kepuasan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh konsultan di 10% desa sasaran 2011, dihasilkan bahwa 94,70% responden menyatakan hasil pembangunan infrastruktur berkualitas baik. Capaian ini telah melebihi target 70% yang ditetapkan dalam pedoman. Selanjutnya, sebanyak 98,80% responden menyatakan infrastruktur telah memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat yang dirasakan antara lain :

- Akses transportasi lebih cepat & mudah (30,50% responden)
- Menghemat biaya transportasi (28,80% responden)
- Memudahkan pengangkutan hasil pertanian (19,75% responden)
- Harga lahan sekitar meningkat (8,25% responden)

Hal lain yang menjadi catatan adalah proporsi *gender* dalam pelaksanaan kegiatan RIS-PNPM II. Fasilitator Masyarakat telah direkrut dengan komposisi 30% perempuan, sesuai dengan target capaian. Adapun keterlibatan kaum perempuan pada kegiatan musyawarah dan sosialisasi rata-rata mencapai 37,6% dari peserta yang hadir. Indikator ini belum memenuhi 40% yang ditargetkan. Demikian halnya dengan keterlibatan perempuan sebagai pengurus di kelembagaan rata-rata mencapai 35% untuk OMS dan 28% untuk KPP. Hal ini belum memenuhi 40% yang ditargetkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.6% perempuan menyatakan puas terhadap hasil keputusan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, 26,80% menyatakan cukup puas dan hanya 1,6% menyatakan tidak puas.

Terkait dengan isu *gender*, telah dilakukan *post-audit gender* yang bertujuan untuk mengevaluasi kualitas peran serta kaum perempuan dalam mendapatkan akses informasi dan sosialisasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan, keterlibatan sebagai tenaga kerja, dan ikut dalam proses pengawasan dan pengaturan keputusan pemanfaatan dan pemeliharaan. Berdasarkan audit tersebut, ditemukan bahwa:

- Kualitas keterlibatan kaum perempuan dalam musyawarah sudah baik, walaupun suara kaum perempuan belum secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan.
- 63,30% responden menyatakan bahwa perempuan telah menyampaikan aspirasinya dan hanya sebanyak 9,90% perempuan berpendapat dan mempengaruhi keputusan musyawarah. Sedangkan sisanya sebanyak 20% hanya hadir saja dan sebanyak 6,80% menyatakan tidak hadir.



Gambar 4.3 Pelaksanaan Proyek *Rural Infrastructure Support to PNPM-II*

Vocational Education Strengthening Project/INVEST (2416-INO)

Vocational Education Strengthening Project (INVEST) adalah program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan di SMK sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompetitif di sektor ekonomi dan industri. Proyek ini didanai menggunakan pinjaman ADB sebesar USD 77,9 juta dan menggunakan pendanaan Pemerintah Indonesia sebesar USD 35 juta. Program ini berlangsung selama lima tahun sejak 9 Juni 2008 dan berakhir pada 30 November 2013.

Tabel 4.6 Profil *Vocational Education Strengthening Project*

Kode Loan	2416-INO
Nama Proyek	<i>Vocational Education Strengthening Project</i>
Instansi Penanggung Jawab	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nilai Pinjaman	USD 77,9 juta
Masa Laku Pinjaman	9 Juni 2008 s.d 30 November 2013

Melalui proyek ini, dibentuk sebuah sistem model aliansi antar SMK. 1 SMK Model akan menjalin kemitraan dengan 2 hingga 3 SMK aliansi dengan menggunakan *School Business Plan* (SBP) yang direncanakan dan diimplementasikan sendiri oleh kemitraan sekolah tersebut. Proyek ini menitikberatkan pada lima aktivitas kunci, yaitu:

- Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendidikan di SMK
- Memperkenalkan pendekatan bisnis pada manajemen sekolah sehingga mampu mendukung sektor perekonomian dan industri
- Membangun jejaring yang kuat dengan industri dan meningkatkan pelatihan akademis dan pelatihan teknis bagi tenaga pengajar
- Melaksanakan kebijakan pemerintah dimana beberapa SMK yang menjadi model dapat memenuhi standar sekolah vokasi internasional
- Memenuhi *international benchmark* melalui kemitraan dengan perusahaan multinasional dan sertifikasi ISO (*International Organization for Standarditation*).



Gambar 4.4 Siswi SMK Melakukan Perakitan *Notebook* Dan Pelatihan Nautika Kapal Penangkapan Ikan di SMKN 1 Mundu Cirebon

Proyek ini dilaksanakan di 90 SMK Model di seluruh Indonesia dan memiliki empat *output* yaitu i) pelaksanaan manajemen sekolah vokasi dengan pendekatan bisnis, ii) peningkatan kualitas kegiatan belajar-mengajar, iii) peningkatan kemitraan dengan sektor industri dan iv) peningkatan fokus kewirausahaan. Seluruh *output* tersebut telah tercapai, dengan pencapaian indikator *output* sebagai berikut:

Tabel 3.18 *Outcome Vocational Education Strengthening Project*

Output 1 Refocused VS Management Using a Business Approach	Progress (%)
100% of model and alliance VS principals and 20% of other VS staff complete programs in management and leadership by end-2009 and 80% of VS principals complete follow-up training by 2011	100%
Structures and procedures for VS SBP reviews and formal approval designed and in place by mid-2008	100%
100% of model VS principals and 20% of other VS staff complete programs in management and leadership by mid-2010 and all VS principals complete follow-up training by mid-2012	100%
100% of model VS principals and 20% of other VS staff complete programs in entrepreneurship development by mid-2011 and 80% of all involved VS staff complete follow-up training by mid-2012	100%
100% of target VSs have computer systems in place and staff trained in MIS use by end-2009	100%
Indicators are included in business plans submitted in 2008	100%
All teachers complete training in the use of the MONE EMIS by 2009; carry out annual audits to assess the extent of use of EMIS in schools	100%
Internal network system in place by 2009	100%
School websites developed by end-2009	100%

Output 2 Improved Quality of Teaching and Learning in VSs	Progress (%)
Improve facilities for learning (equipment and civil works) in model VSs to allow expanded enrolments, longer hours of operation, and better efficiency by 2011.	100%
Develop new learning methodologies in model VSs suitable for large institutions by 2010.	100%
<i>Provide new textbooks, materials, and software to model VSs.</i>	
VSs to purchase all textbooks and software by 2009 to be in place by 2010	100%
100% of teachers complete training needs analysis and 30% of teachers commence programs to meet needs identified by 2010	100%
100% of teachers complete training needs analysis and 30% of teachers commence programs to meet needs identified by 2010	100%
Model VSs contract companies to teach English to teachers by 2009	100%
40% of teachers attain MONE-required English test score by 2011	100%
Model VSs contract institutions for in-service training in mathematics and science by 2009	100%
DTVE issues new guidelines for mathematics and science by mid-2008	100%
Identify workable systems for certifying technical skills of VS teachers and issue guidelines by 2010, in collaboration with QITEP.	100%
Review outputs of the Project and innovations introduced by VSs, and prepare a "what works" manual describing successful innovations. Circulate to all VSs with enrolment exceeding 500 in 2012.	100%
Output 3 Strengthened School-Industry Linkages	Progress (%)
Each model VS enters at least one formal arrangement with a local industry to share knowledge and expertise by 2010	100%
New courses developed to meet local industry needs in collaboration with industry by 2009	100%
Each model VS holds discussions with local employers and draws up list of priority needs by 2009; by 2010 each VS has two courses developed and marketed to local industry	100%
Examine models for VSs to develop and trial programs to upgrade skills and certification for workers, and develop a coherent policy framework for sustainable activities in the VS system.	100%
40 model VSs enter arrangements with multinational or international companies or organizations for mutual skills recognition arrangements by 2011	100%
MONE enters into MOUs with 10 multinational or international organizations for mutual recognition or international skills recognition by 2012	100%
Output 4 Enhanced Entrepreneurship Focus	Progress (%)
50% of schools have assistance programs in place for entrepreneurship start-up by students by 2010	100%
Introduce entrepreneurship training into all student courses by end-2009.	100%
Review existing production units and develop plans for enhancement by 2009.	100%

Melalui proyek ini, terbangun sistem baru dalam sekolah dimana Sekolah Model mampu menjadi rujukan bagi peningkatan kualitas Sekolah Aliansi, sekaligus dengan *sharing* sumber daya pendidikan seperti guru dan fasilitas belajar. Selain itu, *School Business Plan (SBP)* yang direncanakan oleh pihak sekolah mampu mendorong partisipasi pihak sekolah untuk turut aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan di SMK tersebut. Pembelajaran lain dari proyek ini adalah memberikan pengalaman bagi pihak sekolah dalam mengelola institusi pendidikan serta menjalin komunikasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah, DPRD, Bappeda serta konsultan pendidikan di tingkat nasional.

Sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan dari proyek ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merumuskan beberapa upaya untuk memperluas dampak yang diberikan bagi masyarakat. Konsep Sekolah Model-Sekolah Aliansi dan SBP akan direplikasi dalam program-program peningkatan kualitas pendidikan di SMK yang dikelola oleh pemerintah.

Pada tahun 2014, Ditjen Dikti memperkenalkan konsep SMK Rujukan yang telah dimulai pada 250 SMK di seluruh Indonesia. Konsep dari SMK Rujukan mengacu pada konsep SMK Model-SMK

Aliansi pada proyek INVEST. Setiap SMK Rujukan memiliki kewajiban untuk mengembangkan lima hingga enam SMK aliansi. Pada tahun 2019, ditargetkan terdapat 1650 SMK Rujukan di seluruh Indonesia. Adapun persyaratan yang harus dimiliki untuk menjadi SMK Rujukan adalah sebagai berikut:

- Memiliki lebih dari 1000 siswa
- Memiliki lebih dari 75 guru produktif
- Memiliki jaringan kerjasama dengan 100 industri
- Memiliki lahan yang siap dikembangkan seluas 5000 m²
- Memiliki fasilitas dasar yang baik
- Memiliki lulusan dengan nilai UN yang baik

Sekolah aliansi nantinya diperbolehkan untuk memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada di SMK Rujukan. Adapun biaya yang digunakan untuk mengembangkan SMK menjadi SMK Rujukan adalah sekitar Rp 20 miliar. Jumlah ini tidak mutlak, karena SMK yang telah disiapkan menjadi SMK Rujukan telah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang baik, sehingga biaya yang digunakan untuk mengembangkan menjadi SMK Rujukan dapat ditekan di bawah Rp 20 miliar.



Gambar 4.5 Fasilitas Pendukung Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan di SMKN 27 Jakarta dan Siswi SMK Mengikuti Kompetisi Perhotelan Tingkat Dunia.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Hasil pemantauan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri di Triwulan I TA 2014 yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 143 proyek yang dipantau di Triwulan I TA 2014 dengan nilai total pinjaman sebesar ekuivalen USD 19.317,86 juta. Total penyerapan kumulatif sampai dengan Triwulan I TA 2014 (posisi 31 Maret 2014) adalah sebesar ekuivalen USD 7.305,95 juta atau 37,82% dari total nilai pinjaman. Realisasi penyerapan pada TA 2014 periode Januari – Maret 2014 sebesar ekuivalen USD 826,65 juta atau 27,49% dari target penyerapan TA 2014 sebesar ekuivalen USD 3.007,1 juta.
2. Permasalahan yang diidentifikasi pada pelaksanaan proyek di Triwulan I TA 2014 antara lain pengadaan lahan, pencairan dana pinjaman, revisi DIPA dan *No Objection Letter* (NOL).
3. Terdapat 105 proyek hibah yang dilaporkan oleh 12 Kementerian/Lembaga dengan total nilai hibah sebesar ekuivalen USD 871.962.689 di Triwulan I TA 2014. Dari 12 Kementerian/Lembaga, Kementerian Pertanian mengelola 79 proyek dengan total nilai hibah sebesar USD 125.811.658, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengelola 6 proyek dengan total nilai hibah USD 23.910.877, dan Bappenas mengelola 5 proyek dengan total nilai hibah USD 614.481.879.
4. Laporan pelaksanaan proyek yang telah selesai dan ditampilkan di triwulan ini yaitu proyek *Domestic Gas Development Project* dari sumber pinjaman Bank Dunia, *Vocational Education Strengthening Project* (INVEST) dan *Proyek Rural Infrastructure Support to PNPM II* dari sumber pinjaman ADB. Beberapa contoh pengalaman dan pembelajaran yang dapat diambil pada proyek-proyek ini adalah i) *conceptual design* dan *overall plan* harus disusun dengan matang sebelum proses lelang dan telah mengadopsi perkembangan teknologi, ii) memberdayakan potensi sumber daya lokal akan memberikan nilai lebih bagi peningkatan kualitas kontraktor local dan iii) menerapkan prinsip *safety first* dalam setiap tahapan pekerjaan sangat penting agar tidak menimbulkan permasalahan pada saat pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan proyek.

TINDAK LANJUT

Tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada pelaksanaan proyek di Triwulan I TA 2014 dalam upaya peningkatan kinerja pelaksanaan yaitu:

1. Proyek yang baru efektif harus melakukan peningkatan kualitas persiapan pelaksanaan proyek dengan cara menyusun perencanaan awal proyek dengan matang, mengadopsi perkembangan teknologi dan memperkirakan permasalahan yang dapat muncul sehingga permasalahan diselesaikan sesingkat mungkin.

2. Mengoptimalkan SDM perencana untuk pendamping *Project Management Unit* (PMU) sebagai salah satu upaya mengatasi kurang-tercermatan/lemahnya koordinasi dalam penentuan anggaran.
3. Koordinasi intensif antara pihak terkait dalam penyelesaian pengadaan lahan dan penjelasan lebih masif dan menyeluruh kepada Pemda dan masyarakat mengenai dampak negatif apabila proyek tidak diselesaikan.
4. Proyek yang memiliki *progress variant* ≤ -30 (*serious delay*) perlu memerlukan peningkatan kapasitas pengelolaan proyek terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa, peningkatan kerja sama dalam melaksanakan prosedur pengadaan barang dan jasa antara Pemerintah Indonesia dengan mitra pembangunan dan melakukan koordinasi yang lebih intensif.
5. Pemantauan terhadap hibah memerlukan format yang lebih baik agar berbagai variasi hibah dapat teridentifikasi dan dapat dilakukan perbaikan pengelolaan hibah pada masa mendatang.